

**KEKUASAAN PEDAGANG DALAM SISTEM
PEMASARAN IKAN**

(Studi Kasus Ketergantungan Nelayan Terhadap Pedagang

(Bakul Ikan / Tengkulak) Di TPI Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek)

LAPORAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERIKANAN**

Oleh:

BIMA WAHYU HARIADI

NIM. 0410840010



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

MALANG

2009

**KEKUASAAN PEDAGANG DALAM SISTEM
PEMASARAN IKAN**

**(Studi Kasus Ketergantungan Nelayan Terhadap Pedagang
(Bakul Ikan / Tengkulak) Di TPI Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek)**

LAPORAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERIKANAN**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

BIMA WAHYU HARIADI

NIM. 0410840010



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

MALANG

2009

SKRIPSI
KEKUASAAN PEDAGANG DALAM SISTEM
PEMASARAN IKAN

(Studi Kasus Ketergantungan Nelayan Terhadap Pedagang
(Bakul Ikan / Tengkulak) Di TPI Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek)

Oleh:
BIMA WAHYU HARIADI
NIM. 0410840010

telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 13 Februari 2009 dinyatakan telah
memenuhi syarat

Menyetujui,

Dosen Penguji I

(Ir. Mimit Primyastanto, MP)

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

(Ir. Ismadi, MS)

Tanggal :

Dosen Penguji II

(Wahyu Handayani, S.Pi)

Tanggal :

Dosen Pembimbing II

(Ir. Edi Susilo, MS)

Tanggal :

Mengetahui,

Ketua Jurusan

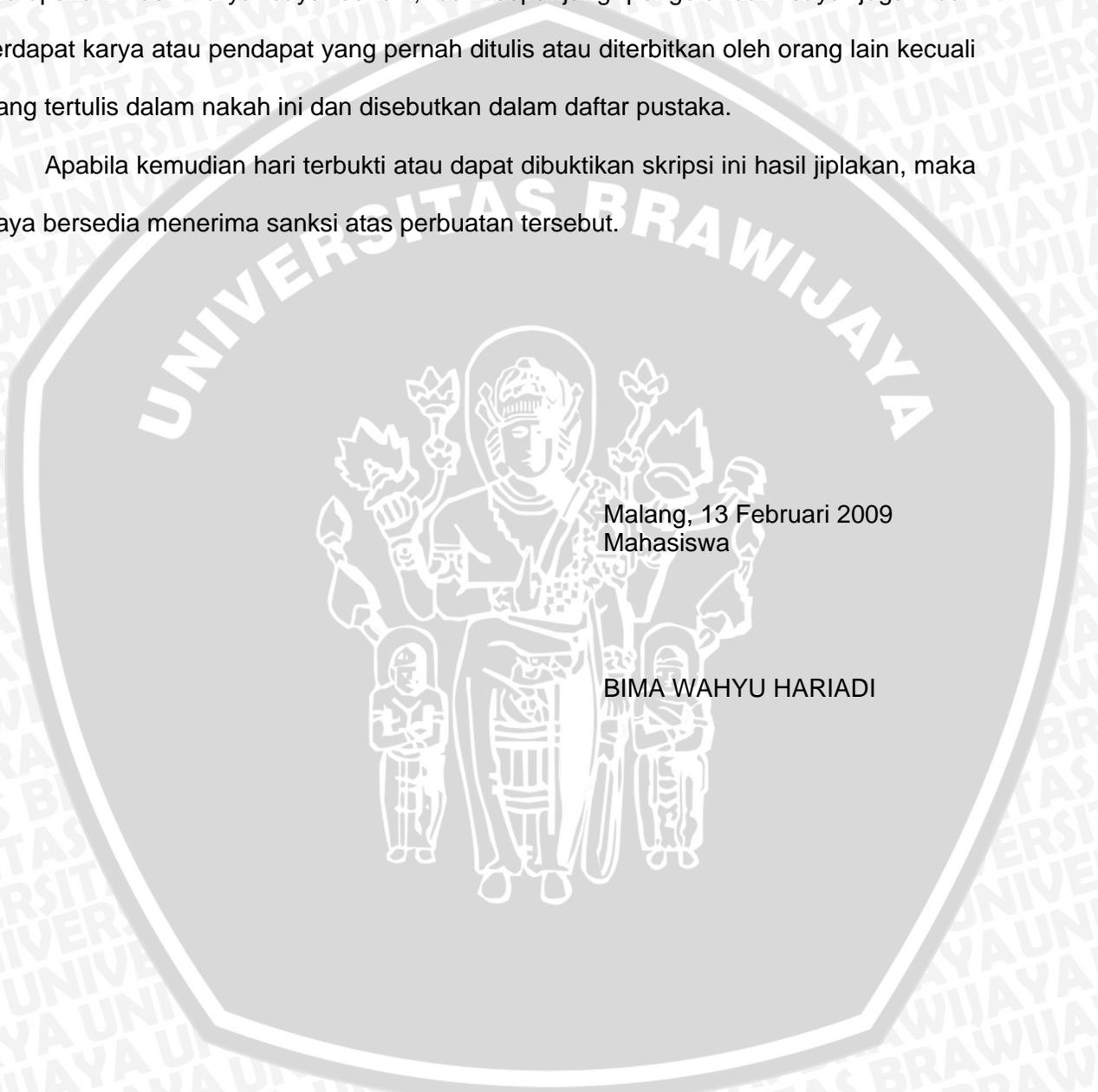
Ir. Maheno Sri Widodo, MS

Tanggal :

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Malang, 13 Februari 2009
Mahasiswa

BIMA WAHYU HARIADI

RINGKASAN

BIMA WAHYU HARIADI, Kekuasaan Pedagang Dalam Sistem Pemasaran (Studi Kasus Ketergantungan Nelayan Terhadap Pedagang (bakul Ikan/Tengkulak Di TPI Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek) (di bawah bimbingan **Ir. Ismadi, MS** dan **Ir. Edi Susilo, MS**)

Ada dua faktor yang menyebabkan kondisi kesejahteraan nelayan tidak pernah membaik, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan sifat hasil produksi nelayan yang acap kali rentan waktu alias cepat busuk, maka satu-satunya jalan keluar untuk menyasati kebutuhan hidup adalah menjual secepat mungkin hasil tangkapannya kepasar walaupun pembayaran yang diterima sering kurang memuaskan. *Kedua*, karena perangkap utang. Akibat irama musim ikan yang tidak menentu, maka sering terjadi keluarga miskin kemudian harus menjual sebagian atau bahkan semua aset produksi yang mereka miliki untuk menutupi utang dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tak kunjung usai (Suyanto, 2004 *dalam* Kusnadi, 2004)

Sebagai akibat timbulnya kemiskinan karena faktor-faktor diatas pada saat dilanda musim paceklik maka para nelayan yang modalnya kurang dengan terpaksa akan menggantungkan hidupnya kepada tengkulak/bakul ikan untuk memperoleh pinjaman utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kondisi demikian, menjadi peluang bagi tumbuh suburnya para tengkulak dengan memanfaatkan berbagai macam kelemahan yang dimiliki para nelayan tersebut. Pada kenyataannya banyak menunjukkan fakta bahwa banyak nelayan di Indonesia lebih banyak tertarik dan nyaman bekerja sama dengan tengkulak, dan mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya dirinya telah dieksploitasi oleh tengkulak. Tengkulak untuk menjaga kelancaran usahanya, mengharapkan semua hasil tangkapan di jual kepadanya dengan harga yang berbeda (lebih rendah dari harga umum, karena nelayan mempunyai tanggungan hutang). Nelayan menjaga hubungan dengan tengkulak atau pedagang ikan dengan harapan akan bisa memperoleh pinjaman apabila membutuhkan sewaktu-waktu. Tali ikatan ini dihargai para nelayan karena tengkulak tersebut menjadi sumber pinjaman. Pinjaman ini jarang didapat dari badan pemerintah. Hubungan ini sudah bertahan cukup lama "*Patron clien*" dalam kehidupan masyarakat nelayan, walaupun sebagian orang beranggapan bahwa tengkulak dengan kekuatannya selalu merugikan para nelayan.. Selain itu dalam proses jual beli antara nelayan dan tengkulak, jarang ditemukan nelayan bisa menang tawar menawar harga dengan pedagang yang menyebabkan kekuasaan pedagang dalam menentukan harga, dan apabila pedagang luar ingin membeli ikan, maka terlebih dahulu harus melewati pedagang lokal karena telah menjadi kesepakatan.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kekuasaan pedagang atau tengkulak dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi, 2) Kekuasaan pedagang atau tengkulak dalam mendominasi atau menguasai daerah pemasaran dan menolak adanya bakul dari daerah lain dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi, 3) Persepsi nelayan dengan adanya pedagang.

Kegunaan dari penelitian ini : (1) Bagi Pemerintah, diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik yang nantinya benar-banar dapat membantu dan bermanfaat dan bagi nelayan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi dan sosial nelayan sehingga kehidupan nelayan menjadi

lebih baik dan maju. Dalam Kasus Ketergantungan nelayan kepada pedagang, (2) Bagi masyarakat nelayan dan poedagan, memberikan saran bagi nelayan dan pedagang agar hubungan tersebut tidak hanya menguntungkan pihak tengkulak saja melainkan kedua belah pihak agar hubungan tersebut benar-banar seimbang.

Penelitian ini dilakukan di TPI Prigi, kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai bulan Oktober 2008 sampai Desember 2008. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, jenis data yang diambil data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi, wawancara, observasi partisipan. Jumlah responden dalam penelitian adalah 2 pedagang (tengkulak), 2 nelayan yang meminjam modal dan 2 nelayan setempat yang menjual hasil tangkap di TPI. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembuatan eksplanasi dan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pemasaran hasil perikanan tangkap nelayan dilakukan di TPI Prigi. Sistem alur Proses pelelangan hasil perikanan tangkap nelayan di TPI Prigi secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu: Pra lelang; Lelang, Pasca lelang. Pembayaran retribusi neyan yaitu 3% sedangkan pedagang 2% dari total pendapatan. Keadaan yang memprihatinkan dari sistem pemasaran di TPI Prigi adalah sistem keamanan terhadap hasil perikanan akibat dari pihak-pihak yang tidak berhak sehingga hal ini merugikan nelayan, sehingga bayak nelayan atau pedagang enggan membayar retribusi. Hasil jumlah ikan yang dilelang di TPI Prigi pada tahun 2007 sebanyak 7.944.441 kg dengan nilai total sebesar Rp 15.348.536.000,- dengan jenis ikan pelagis terbanyak yang di lelang yaitu tongkol, layang, dan teri. Perkembangan retribusi dari tahun 2003 sampai 2007. Target retribusi pelelangan ikan pada tahun 2007 sebesar Rp 400.000.000,- dengan realisasi retribusi sebesar Rp 260.000.000,- disebabkan karena kurangnya kesadaran nelayan dalam membayar pada waktu pelelangan akibat kurangnya keamanan terhadap hasil tangkap.

Mengingat jumlah stok ikan dari tahun-ketahun yang mengalami penurunan akibat penangkapan lebih, perolehan hasil tangkap yang tidak menentu akibat irama musim serta bahaya resiko, mahalnya biaya sarana dan prasarana proses penangkapan dan gaya hidup sebagian yang cenderung konsumtif membut para nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi diwaktu musim paceklik. Untuk memperoleh biaya yang cukup besar tersebut para nelayan cenderung melakukan pinjaman kepedagang yang berskala besar. Alasannya yaitu selain prosesnya mudah dengan lisan serta modal bisa langsung cair bila dibandingkan denga lembaga lembaga formal seperti bank yang prosesnya berbelit-belit dan modal belum tentu bisa segera cair. Pola hubungan tersebut dinamakan patron-klien. Sebagai jaminan pengembalian hutang tersebut, nelayan harus menyerahkan semua hasil tangkapan kepedagang yang telah meminjamkan modal dengan potongan yang telah dise pakati kedua belah pihak.

Andaikatapun nelayan yang tidak terjerat hutang, umumnya mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya kepada pedagang dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang.. Hal ini disebabkan karena sifat produk yang rentan terhadap waktu, mahalnya biaya untuk mengolah hasil tangkap serta pemasaran ke daerah lain. Umumnya mereka pasrah dengan dengan keadaan tersebut asalkan dapat uang untuk melaut besoknya, walaupun secara kasat mata pihak nelayan yang dirugikan pada waktu penjualan hasil tangkap. Dengan pola hubungan patron-klien kondisi demikian menjadi lemahnya posisi tawar nelayan (*bargaining power*) pada waktu penjualan yang mengakibatkan kekuasaan pedagang dalam menentukan harga di TPI Prigi. Mengenai

masuknya pedagang dari daerah lain, ada ketentuan yang harus dipatuhi bahwa harus melewati pedagang lokal dulu apabila ingin membeli hasil tangkapan. Persepsi nelayan dengan adanya pedagang adalah sebagai patner kerja yang baik, dimana kedua belah pihak saling membutuhkan.

Kesimpulan dari penelitian ini : Sistem pemasaran hasil perikanan tangkap dilakukan di TPI Prigi. Alur pemasaran: pra lelang (pendaratan ikan), lelang, Pasca lelang. Penguasaan daerah pemasaran di TPI Prigi sampai sekarang masih dipegang oleh pedagang lokal. Mengenai penguasaan daerah pemasaran didominasi oleh pedagang lokal, seakan-akan pedagang dari daerah lain ditolak waktu pelelangan (pengakuan atas daerah tempat tinggal).Persepsi nelayan adanya pedagang adalah sebagai patner kerja yang baik,dimana kedua belah pihak saling membutuhkan. Saran yang dianjurkan antara lain perlu adanya profesionalisme tinggi mengenai peningkatan pengelolaan tpi mengenai faktor tingkat keamanan agar fungsi tpi bisa berjalan semaksimal mungkin, kemudahan perlu adanya lembaga keuangan yang menyediakan kredit lunak, mudah dan segera cair bagi nelayan guna mengurangi ketergantungan pada pedagang (*patron-client*) dalam kehidupan sehari-hari atau pengembangan usaha lain, serta perlu adanya peningkatan sdm melalui penyuluhan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga sosial lain secara berkesinambungan bagi nelayan agar lebih mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanansecara maksimal tanpa merusak ekosistem yang ada.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi dengan judul “Kekuasaan Pedagang Dalam Sistem Pemasaran (Studi Kasus Ketergantungan Nelayan Terhadap Pedagang (bakul Ikan/Tengkulak Di TPI Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek)”. Di dalam laporan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi Kekuasaan pedagang atau tengkulak dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi, Kekuasaan pedagang atau tengkulak dalam mendominasi atau menguasai daerah pemasaran dan menolak adanya bakul dari daerah lain dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi, serta persepsi nelayan dengan adanya pedagang.

Sangat penulis sadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan penulis untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan sehingga saran dan masukan sangat diperlukan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan

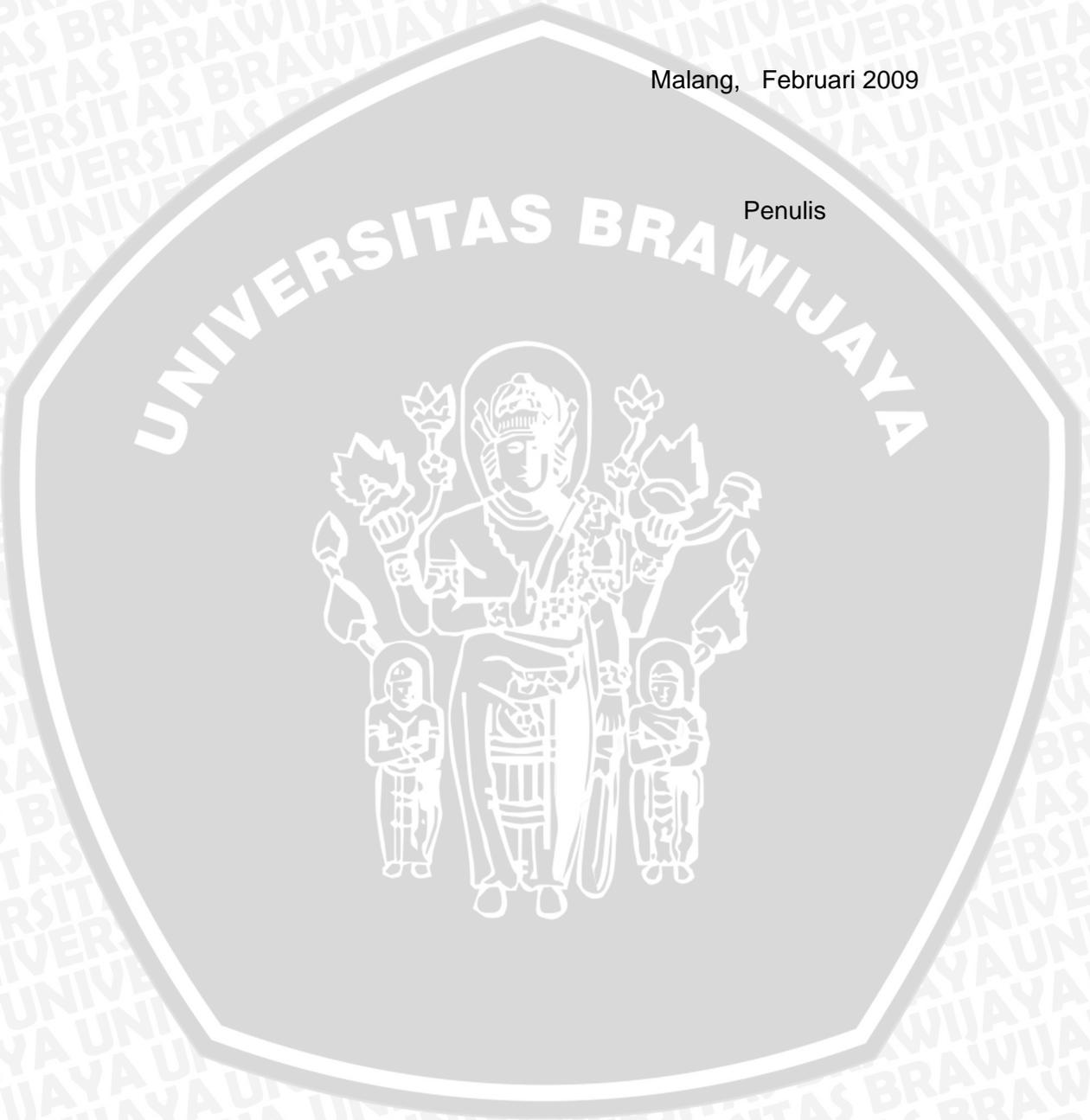
Sehubungan dengan selesainya laporan ini, dengan segenap hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Ismadi, MS selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan berharga dengan sabar mulai dari proses penyusunan usulan skripsi di tengah kesibukan beliau yang sangat padat.
2. Bapak Ir. Edi Susilo, MS selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi hingga penulisan laporan ini.
3. Para responden bapak Abi Suprpto, ibu Wiji, bapak Imam, bapak Toha, terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang telah diberikan selama penelitian di Prigi.
4. Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi serta Nelayan dan pedagang ikan di Pantai Prigi atas waktu, bantuan dan informasinya dalam penelitian ini.
5. Orang tua dan seluruh seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, doa dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

6. Rekan-rekan SOSEK '04 atas diskusi dan tukar informasi, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Malang, Februari 2009

Penulis



RINGKASAN

BIMA WAHYU HARIADI, Kekuasaan Pedagang Dalam Sistem Pemasaran (Studi Kasus Ketergantungan Nelayan Terhadap Pedagang (bakul Ikan/Tengkulak) Di TPI Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek) (di bawah bimbingan **Ir. Ismadi, MS dan Ir. Edi Susilo, MS**)

Ada dua faktor yang menyebabkan kondisi kesejahteraan nelayan tidak pernah membaik, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan sifat hasil produksi nelayan yang acap kali rentan waktu alias cepat busuk, maka satu-satunya jalan keluar untuk menyalahi kebutuhan hidup adalah menjual secepat mungkin hasil tangkapannya kepasar walaupun pembayaran yang diterima sering kurang memuaskan. *Kedua*, karena perangkap utang. Akibat irama musim ikan yang tidak menentu, maka sering terjadi keluarga miskin kemudian harus menjual sebagian atau bahkan semua aset produksi yang mereka miliki untuk menutupi utang dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tak kunjung usai (Suyanto, 2004 dalam Kusnadi, 2004)

Sebagai akibat timbulnya kemiskinan karena faktor-faktor diatas pada saat dilanda musim paceklik maka para nelayan yang modalnya kurang dengan terpaksa akan menggantungkan hidupnya kepada pedagang ikan untuk memperoleh pinjaman utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kondisi demikian, menjadi peluang bagi tumbuh suburnya para pedagang ikan dengan memanfaatkan berbagai macam kelemahan yang dimiliki para nelayan tersebut. Pada kenyataannya banyak menunjukkan fakta bahwa banyak nelayan di Indonesia lebih banyak tertarik dan nyaman bekerja sama dengan pedagang ikan atau tengkulak, dan mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya dirinya telah dieksploitasi oleh pedagang. pedagang ikan untuk menjaga kelancaran usahanya, mengharapkan semua hasil tangkapan di jual kepadanya dengan harga yang berbeda (lebih rendah dari harga umum, karena nelayan mempunyai tanggungan hutang). Nelayan menjaga hubungan dengan tengkulak atau pedagang ikan dengan harapan akan bisa memperoleh pinjaman apabila membutuhkan sewaktu-waktu. Tali ikatan ini dihargai para nelayan karena pedagang tersebut menjadi sumber pinjaman. Pinjaman ini jarang didapat dari badan pemerintah. Hubungan ini sudah bertahan cukup lama "Patron-klien" dalam kehidupan masyarakat nelayan, walaupun sebagian orang beranggapan bahwa pedagang dengan kekuatannya selalu merugikan para nelayan. Selain itu dalam proses jual beli antara nelayan dan pedagang ikan, jarang ditemukan nelayan bisa menang tawar menawar harga dengan pedagang yang menyebabkan kekuasaan pedagang dalam menentukan harga, dan apabila pedagang luar ingin membeli ikan, maka terlebih dahulu harus melewati pedagang lokal karena telah menjadi kesepakatan.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kekuasaan pedagang atau tengkulak dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi, 2) Kekuasaan pedagang atau tengkulak dalam mendominasi atau menguasai daerah pemasaran dan menolak adanya bakul dari daerah lain dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi, 3) Persepsi nelayan dengan adanya pedagang.

Kegunaan dari penelitian ini : (1) Bagi Pemerintah, diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik yang nantinya benar-benar dapat membantu dan bermanfaat dan bagi nelayan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi dan sosial nelayan sehingga kehidupan nelayan menjadi lebih baik dan maju. Dalam Kasus Ketergantungan nelayan kepada pedagang, (2) Bagi masyarakat nelayan dan pedagang, memberikan saran bagi nelayan dan pedagang agar hubungan tersebut tidak hanya menguntungkan pihak tengkulak saja melainkan kedua belah pihak agar hubungan tersebut benar-benar seimbang.

Penelitian ini dilakukan di TPI Prigi, kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai bulan Oktober 2008 sampai Desember 2008. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, jenis data yang diambil data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi, wawancara, observasi partisipan. Jumlah responden dalam penelitian adalah 2 pedagang (tengkulak), 2 nelayan yang meminjam modal dan 2 nelayan setempat yang menjual hasil tangkap di TPI. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembuatan eksplanasi dan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem pemasaran hasil perikanan tangkap nelayan dilakukan di TPI Prigi. Sistem alur Proses pelelangan hasil perikanan tangkap nelayan di TPI Prigi secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu: Pra lelang; Lelang, Pasca lelang. Pembayaran retribusi nelayan yaitu 3% sedangkan pedagang 2% dari total pendapatan. Keadaan yang memprihatinkan dari sistem pemasaran di TPI Prigi adalah sistem keamanan terhadap hasil perikanan akibat dari pihak-pihak yang tidak berhak sehingga hal ini merugikan nelayan, sehingga banyak nelayan atau pedagang enggan membayar retribusi. Hasil jumlah ikan yang dilelang di TPI Prigi pada tahun 2007 sebanyak 7.944.441 kg dengan nilai total sebesar Rp 15.348.536.000,- dengan jenis ikan pelagis terbanyak yang di lelang yaitu tongkol, layang, dan teri. Perkembangan retribusi dari tahun 2003 sampai 2007. Target retribusi pelelangan ikan pada tahun 2007 sebesar Rp 400.000.000,- dengan realisasi retribusi sebesar Rp 260.000.000,- disebabkan karena kurangnya kesadaran nelayan dalam membayar pada waktu pelelangan akibat kurangnya keamanan terhadap hasil tangkap.

Mengingat jumlah stok ikan dari tahun-ketahun yang mengalami penurunan akibat penangkapan lebih, perolehan hasil tangkap yang tidak menentu akibat irama musim serta bahaya resiko, mahalnya biaya sarana dan prasarana proses penangkapan dan gaya hidup sebagian yang cenderung konsumtif membuat para nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi diwaktu musim paceklik. Untuk memperoleh biaya yang cukup besar tersebut para nelayan cenderung melakukan pinjaman kepedagang yang berskala besar. Alasannya yaitu selain prosesnya mudah dengan lisan serta modal bisa langsung cair bila dibandingkan dengan lembaga lembaga formal seperti bank yang prosesnya berbelit-belit dan modal belum tentu bisa segera cair. Pola hubungan tersebut dinamakan patron-klien. Sebagai jaminan pengembalian hutang tersebut, nelayan harus menyerahkan semua hasil tangkapan kepedagang yang telah meminjamkan modal dengan potongan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Andaikatapun nelayan yang tidak terjerat hutang, umumnya mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya kepada pedagang dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang.. Hal ini disebabkan karena sifat produk yang rentan terhadap waktu, mahalnya biaya untuk mengolah hasil tangkap serta pemasaran ke daerah lain. Umumnya mereka pasrah dengan dengan keadaan tersebut asalkan dapat uang untuk melaut besoknya, walaupun secara kasat mata pihak nelayan yang dirugikan pada waktu penjualan hasil tangkap. Dengan pola hubungan patron-klien kondisi demikian menjadi lemahnya posisi tawar nelayan (*bargaining power*) pada waktu penjualan yang mengakibatkan kekuasaan pedagang dalam menentukan harga di TPI Prigi. Mengenai masuknya pedagang dari daerah lain, ada ketentuan yang harus dipatuhi bahwa harus melewati pedagang lokal dulu apabila ingin membeli hasil tangkapan. Persepsi nelayan dengan adanya pedagang adalah sebagai patner kerja yang baik, dimana kedua belah pihak saling membutuhkan.

Kesimpulan dari penelitian ini : Sistem pemasaran hasil perikanan tangkap dilakukan di TPI Prigi. Alur pemasaran: pra lelang (pendaratan ikan), lelang, pasca lelang. Penguasaan daerah pemasaran di TPI Prigi sampai sekarang masih dipegang oleh pedagang lokal. Mengenai penguasaan daerah pemasaran didominasi oleh pedagang lokal, seakan-akan pedagang dari daerah lain ditolak waktu pelelangan (pengakuan atas daerah tempat tinggal).Persepsi nelayan adanya pedagang adalah sebagai patner kerja yang baik,dimana kedua belah pihak saling membutuhkan. Saran yang dianjurkan antara lain perlu adanya profesionalisme tinggi mengenai peningkatan pengelolaan tpi mengenai faktor tingkat keamanan agar fungsi TPI bisa berjalan semaksimal mungkin, kemudahan perlu adanya lembaga keuangan yang menyediakan kredit lunak, mudah dan segera cair bagi nelayan guna mengurangi ketergantungan pada pedagang dalam kehidupan sehari-hari atau pengembangan usaha lain, serta perlu adanya peningkatan SDM melalui penyuluhan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga sosial lain secara berkesinambungan bagi nelayan agar lebih mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara maksimal tanpa merusak ekosistem yang ada.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi dengan judul “Kekuasaan Pedagang Dalam Sistem Pemasaran (Studi Kasus Ketergantungan Nelayan Terhadap Pedagang (bakul Ikan/Tengkulak Di TPI Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek)”. Di dalam laporan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi Kekuasaan pedagang atau tengkulak dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi, Kekuasaan pedagang atau tengkulak dalam mendominasi atau menguasai daerah pemasaran dan menolak adanya bakul dari daerah lain dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi, serta persepsi nelayan dengan adanya pedagang.

Sangat penulis sadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan penulis untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan sehingga saran dan masukan sangat diperlukan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan

Sehubungan dengan selesainya laporan ini, dengan segenap hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Ismadi, MS selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan berharga dengan sabar mulai dari proses penyusunan usulan skripsi di tengah kesibukan beliau yang sangat padat.
2. Bapak Ir. Edi Susilo, MS selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi hingga penulisan laporan ini.
3. Para responden bapak Abi Suprpto, ibu Wiji, bapak Imam, bapak Toha, bapak Mat, bapak Supriyono atas segala waktu dan kesempatan yang telah diberikan selama penelitian di Prigi.

4. Petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi serta Nelayan dan pedagang ikan di Pantai Prigi atas waktu, bantuan dan informasinya dalam penelitian ini.
5. Orang tua dan seluruh seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, doa dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
6. Rekan–rekan SOSEK '04 atas diskusi dan tukar informasi, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

Malang, Februari 2009

Penulis



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pemasalahan Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan penelitian	9
II. TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Kemiskinan Nelayan	10
2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	10
2.3 Eksploitasi	16
2.4 Hubuan Patron-Klien	20
2.5 Kekuasaan	25
2.6 Stratifikasi Sosial.....	28
2.7 Arti Penting Tataniaga Perikanan.....	30
2.8 Sistem Pelelangan Ikan.....	33
2.9 Kerangka Berfikir	35
III. METODOLOGI PENELITAIAN	
3.1Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.2 Metode Penelitian Studi Kasus.....	37
3.2.1 Pendesainan Studi Kasus Tunggal	38
3.3 Langkah-Langkah Metode Studi Kasus.....	40
3.3.1 Persiapan Pengumpulan Data	40
3.3.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	41
3.3.3 Teknik Pengumpulan Responden.....	42
3.3.4 Analisis Data.....	43
3.3.5 Deskriptif Kualitatif.....	45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian.....	46
4.2 Keadaan Umum Perikanan.....	47
4.2.1 Sumber Daya Alam Dan Kegiatan Usaha Perikanan.....	47
4.2.2 Jumlah Nelayan, Armada Perikanan dan Jenis Alat Tangkap.....	50
4.2.3 Produksi Perikanan.....	53
4.2.4 Jumlah Pedagang Ikan Berdasarkan Karakter Usaha.....	55
4.2.5 Pengolahan Dan Pemasaran Ikan.....	55
4.2.6 Musim Penangkapan Ikan.....	57
4.3 Lembaga Formal Perikanan.....	57
4.3.1 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).....	57
4.3.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi.....	58
4.3.3 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi.....	60
4.4 Aspek Hukum.....	70
4.5 Kekuasaan Pedagang Dalam menentukan Harga Ikan Di TPI Prigi.....	71
4.5.1 Hubungan Pedagang Dengan Nelayan.....	71
4.5.2 Hubungan Pedagang Lokal Dengan Pedagang Luar Daerah.....	76
4.5.3 Menciptakan Pasar Oliogopsoni.....	76
4.6 Persepsi Nelayan Dengan Adanya Pedagang (tengkulak).....	78
V. Kesimpulan Dan Saran	
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
Daftar Pustaka	84
Lampiran	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di PPN Prigi Tahun 2003-2007.....	50
2. Komposisi Nelayan di PPN Prigi pada tahun 2007.....	50
3. Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun 2003-2007.....	51
4. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2003–2007.....	53
5. Jumlah Produksi Ikan Tahun 2006 Dan Tahun 2007 Berdasarkan Jenisnya.....	54
6. jumlah pedagang berdasarkan karakter karakter usaha.....	55
7. Jenis Dan Jumlah Pengolahan Ikan Di PPN Prigi tahun 2007.....	56
8. daerah pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2007.....	56
9. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	60
10. Perkembangan Retribusi TPI Prigi Selama 5 Tahun.....	70



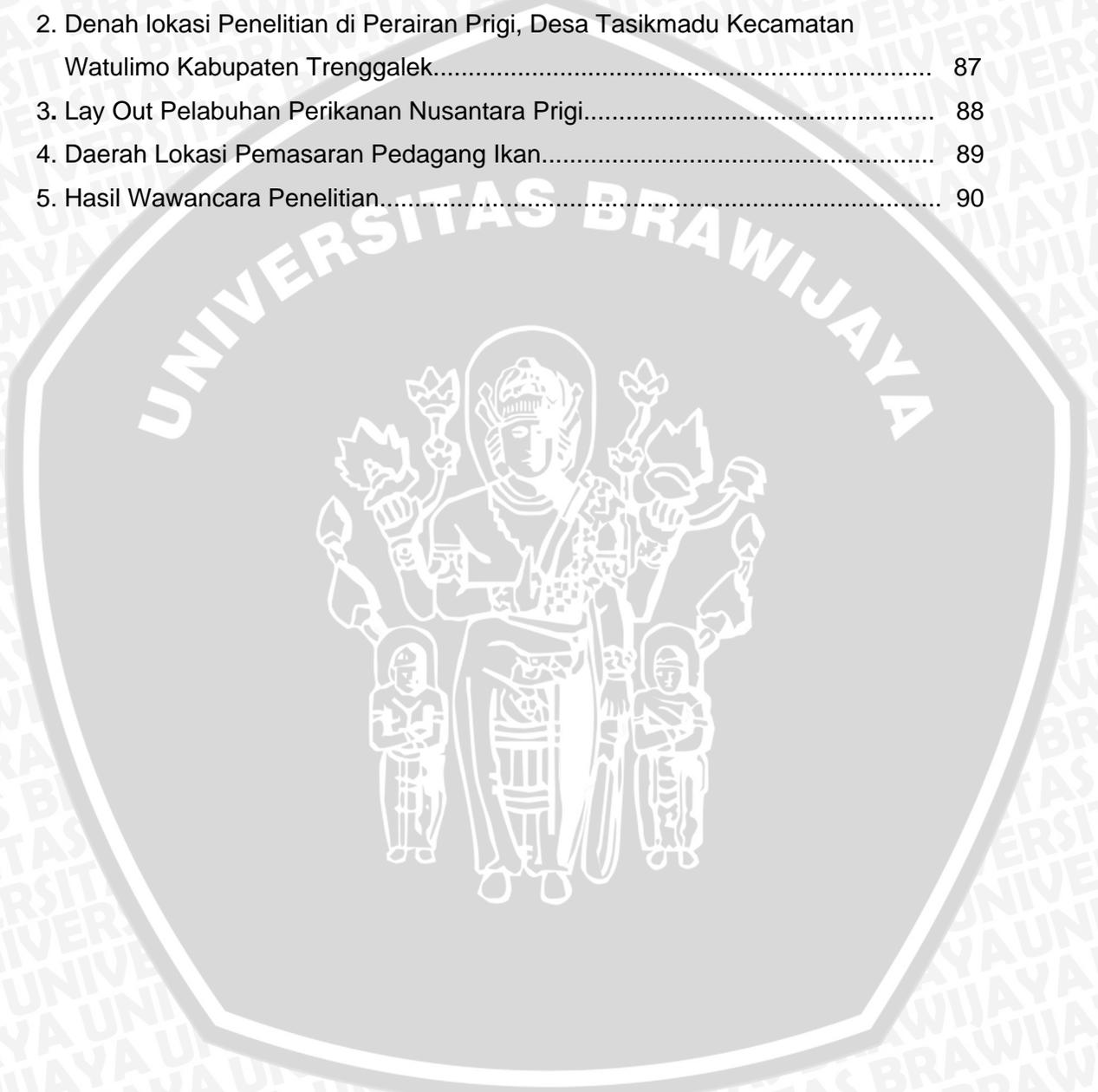
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tingkat Ketergantungan Nelayan Pada Tengkulak.....	16
2. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	36
3. Kondisi Perairan di TPI Prigi.....	47
4. Hasil Tangkap Nelayan.....	48
5. Pabrik Tepung Ikan.....	49
6. Kantor PPN Prigi.....	59
7. Kantor Umum PPN di Prigi.....	60
8. Tempat Pelelangan Ikan PPN Prigi Bagian Barat >15 GT.....	63
9. Tempat Pelelangan Ikan PPN Prigi Bagian Timur < 15 GT.....	63
10. Alur Pelelangan di TPI Prigi.....	64
11. Proses Pendaratan Ikan.....	66
12. Pengangkutan Hasil Tangkap Oleh Manol.....	66
13. Proses Penimbangan Ikan.....	67
14. Proses Pelelangan.....	68
15. Pengangkutan Ikan Ke Pick up.....	69
16. Kurva Harga keseimbangan.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lamiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Trenggalek.....	86
2. Denah lokasi Penelitian di Perairan Prigi, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.....	87
3. Lay Out Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.....	88
4. Daerah Lokasi Pemasaran Pedagang Ikan.....	89
5. Hasil Wawancara Penelitian.....	90



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nelayan yang sumber mata pencaharian utamanya menangkap ikan mampu mengembangkan bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka mampu membuat teknologi pelayaran, teknik perdagangan diatas laut, dan atau desa-desa pantai, serta aturan-aturan hukum dibidang perdagangan dan sosial kemasyarakatan lainnya. Nelayan merupakan bagian kekayaan bangsa yang memiliki potensi besar dalam mengisi pembangunan, terutama dalam penyediaan sumber pangan. Potensi tersebut berciri khusus, berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat yang sumber mata pencahariannya tidak berasal dari laut akan sulit beradaptasi dan memanfaatkan sumberdaya tersebut untuk kehidupan mereka (Rahardjo, 2002)

Kawasan pesisir dan lautan yang dimiliki Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur membentang dengan garis pantai sepanjang ± 96 km dimana sebagian besar pantainya berbentuk teluk yaitu terdiri dari Teluk Panggul di Kecamatan Panggul, Teluk Munjungan di Kecamatan Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi di Kecamatan Watulimo dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 35.424 km^2 . Kawasan tersebut berpotensi dalam menopang pembangunan daerah ke depan. Selain terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara bertaraf Nasional, di kawasan pesisir tersebut juga dikembangkan potensi sektor pariwisata. Berbagai kekayaan sumber alam tersebut bisa menjadi sumber penghidupan masa depan bila dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariaanya (DKP Trenggalek, 2005)

Mengingat jumlah sumberdaya laut, khususnya ikan disuatu perairan yang jumlahnya dari tahun ke tahun makin menurun dan perolehan hasil tangkap yang tidak menentu, membuat para nelayan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya akibat penangkapan yang berlebihan. Selain itu ketergantungan nelayan terhadap BBM untuk proses produksi (menangkap ikan) yang kian hari harganya semakin melambung, membuat nelayan semakin tercekik akibat dampak kenaikan BBM tersebut.

Selain itu jumlah stok ikan disuatu perairan yang dipengaruhi oleh musim tertentu. Bila musim ikan maka para nelayan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya bahkan ibarat makan daging setiap hari pun bisa, sebaliknya bila musim ikan telah surut atau paceklik maka hasil tangkapan akan menurun dan kegiatan penangkapan pun dihentikan. Disaat inilah para nelayan akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya, padahal pemenuhan kehidupan sehari-hari terus berlangsung yang menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan.

Intensitas tekanan sosial-ekonomi dan kemiskinan yang membawa akibat dan mempersulit kehidupan rumah tangga pandhiga di desa pesisir dalam memenuhi kehidupan sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Kompleksitas permasalahan diperparah oleh ketidakpastian (uncertain) dan terus menurunnya tingkat pendapatan pandhiga. Salah satu faktor yang secara dominan menyumbangkan proses akselerasi permasalahan sosial adalah kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap (Kusnadi, 2000)

Masalah kemiskinan sudah ada pada sejak jaman dahulu dan sampai sekarang ini. Miskin dalam artian ini bukan disebabkan oleh adanya kurang pangan, akan tetapi miskin ini dalam bentuk minimnya kemudahan dalam pemenuhan modal usaha dan gaya hidup sebagian nelayan yang cenderung konsumtif. Ada berapa faktor yang menyebabkan kemiskinan pada nelayan

tersebut yang semestinya pada saat musim paceklik bisa bekerja diluar sektor perikanan menjadi terbengkalai akibat keadaan tersebut. Faktor- faktor tersebut diantaranya : *pertama*, pendapatan nelayan yang bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan akibat tergantung musim dan status nelayan tersebut. *Kedua*, tingkat pendidikan yang umumnya relatif rendah sehingga sulit mencari pekerjaan lain selain melaut. *Ketiga*, sifat produk yang dihasilkan berupa ikan tersebut cepat rusak sehingga ikan tersebut harus segera dipasarkan. *Keempat*, keterbatasan modal untuk memperluas daerah penangkapan. *Kelima*, ketergantungan sebagian besar nelayan yang hidupnya di laut.

Ada dua faktor yang menyebabkan kondisi kesejahteraan nelayan tidak pernah membaik, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan sifat hasil produksi nelayan yang acap kali rentan waktu alias cepat busuk, maka satu-satunya jalan keluar untuk menyasati kebutuhan hidup adalah menjual secepat mungkin hasil tangkapannya ke pasar walaupun pembayaran yang diterima sering kurang memuaskan. *Kedua*, karena perangkap utang. Akibat irama musim ikan yang tidak menentu, maka sering terjadi keluarga miskin kemudian harus menjual sebagian atau bahkan semua aset produksi yang mereka miliki untuk menutupi utang dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tak kunjung usai (Suyanto, 2004 dalam Kusnadi, 2004)

Kemiskinan masyarakat pesisir berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif. Keterbatasan akses permodalan ditandai dengan realisasi modal melalui investasi pemerintah dan swasta selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) terutama dalam pemenuhan kebutuhan permodalan dipenuhi oleh para tengkulak, toke, atau ponggawa, yang kenyataannya tidak banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, malah cenderung menjeratnya dalam lilitan utang yang tidak pernah bisa dilunasi. Demikian pula kultur

kewirausahaan mereka masih bercorak manajemen keluarga dengan orientasi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (DKP, 2005).

Sebagai akibat timbulnya kemiskinan karena faktor-faktor diatas pada saat dilanda musim paceklik maka para nelayan yang modalnya kurang dengan terpaksa akan menggantungkan hidupnya kepada pedagang ikan untuk memperoleh pinjaman utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kondisi demikian, menjadi peluang bagi tumbuh suburnya para pedagang/tengkulak dengan memanfaatkan berbagai macam kelemahan yang dimiliki para nelayan tersebut. Dalam proses peminjaman tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tidak berbelit-belit, terutama dalam penyediaan sarana produksi dan permodalan yang diperlukan oleh nelayan tersebut pada saat musim ikan ataupun untuk menyambung hidup sehari-hari pada musim paceklik dimana kedaan tersebut tidak musim ikan. Dengan kata lain pedagang/tengkulak tersebut dengan segera memberi layanan yang cepat yang menjadikan nelayan semakin lebih memilih masuk dalam lingkaran tersebut. Dalam keadaan demikian ketergantungan nelayan terhadap pedagang semakin tinggi.

Pada kenyataannya menunjukkan bahwa banyak nelayan di Indonesia lebih banyak tertarik dan nyaman bekerja sama dengan pedagang, dan mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya dirinya telah dieksploitasi oleh pedagang. Pedagang untuk menjaga kelancaran usahanya, mengharapkan semua hasil tangkapan dijual kepadanya dengan harga yang berbeda (lebih rendah dari harga umum, karena nelayan mempunyai tanggungan hutang. Nelayan menjaga hubungan dengan tengkulak atau pedagang ikan dengan harapan akan bisa memperoleh pinjaman apabila membutuhkan sewaktu-waktu. Tali ikatan ini dihargai para nelayan karena tengkulak tersebut menjadi sumber pinjaman. Pinjaman ini jarang didapat dari badan pemerintah. Hubungan ini sudah bertahan

cukup lama “patron-klien” dalam kehidupan masyarakat nelayan, walaupun sebagian orang beranggapan bahwa tengkulak dengan kekuatannya selalu merugikan para nelayan. Kondisi demikian banyak dialami oleh sebagian nelayan yang umumnya keterbatasan modal.

Dalam kasus hubungan antara nelayan dan pedagang/ tengkulak ini sifatnya “mengikat/memaksa” dari pada atas dasar sukarela karena pemberian uang pengikat dari pedagang tersebut kepada nelayan. Pemberian uang pengikat tersebut bertujuan tidak lain apabila pada saat musim ikan, maka nelayan tersebut menyerahkan atau menjual hasil tangkapan tersebut kepada pedagang atau bakul yang memberi utang yang telah menjadi bagian dari kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Selain itu dalam proses jual-beli antara nelayan dan pedagang, jarang ditemukan nelayan bisa menawar menawar harga dengan pedagang, hal ini disebabkan karena sifat hasil produksi mereka yang cepat busuk serta keterbatasan dana dalam mengolah hasil tangkap dan terhimpitnya nelayan karena terjerat hutang. Hal ini yang menyebabkan lemahnya posisi tawar nelayan terhadap pedagang. Selain itu, posisi tawar menawar nelayan yang lemah disebabkan karena sedikitnya produksi yang disebabkan karena rendahnya produktifitas. Dalam situasi ini, nelayan menerima harga yang ditentukan oleh pasar atau pedagang dan menjalankan hidupnya dari hari ke hari dengan uang tunai yang di dapatkan dari melaut.

Disisi lain apabila nelayan ingin menjual hasil tangkapan kepada orang lain yang bukan pedagang lokal dengan harga yang lebih tinggi, maka akan berakibat negatif terhadap nelayan tersebut karena sebagian besar sistem pemasarannya telah dikuasai atau didominasi oleh pedagang lokal tersebut dan sebaliknya. Dan apabila pedagang luar tersebut ingin membeli hasil tangkapan tersebut, maka pedagang luar daerah tersebut harus melewati pedagang lokal

dulu dan ini sudah menjadi kesepakatan dari pedagang lokal yang ada di TPI. Dengan kata lain pedagang ikan lokal tersebut menentang adanya pedagang dari daerah lain untuk menentukan harga ikan. Oleh karena itu mengapa penelitian ini penting dilakukan yaitu untuk meneliti mengetahui permasalahan mengapa para pedagang ikan/ tengkulak memiliki kekuasaan dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi.

1.2. Permasalahan penelitian

Asas yang menyatakan bahwa para pelaku dalam hubungan tengkulak-nelayan masing-masing menguasai sumberdaya secara timpang, kiranya penting sekali artinya. Kalau tidak, bagaimana lagi hubungan ketergantungan dapat ketergantungan dapat dilestarikan? Dalam konteks yang ada terdapat tolok ukur berupa perbandingan kekayaan, kedudukan, atau pengaruh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tuan (tengkulak)-hamba (nelayan). Dalam pendekatan diungkapkan bahwa: *Pertama*, bahwa “kedudukan, kekayaan, atau pengaruh” dapat dipertukarkan; dan *kedua*, bahwa para tuan (tengkulak) dan hamba (nelayan) masing-masing mempunyai sistem nilai yang sama. Perbedaan antara ikatan-ikatan yang mempertalikan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas kekayaan, kedudukan, atau memiliki pengaruh yang sama besar. Dalam hal ini mengandung artian pertukaran “timbang balik” (Legg, 1983)

kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering timbul dari kalangan nelayan. Karena sebagian besar masyarakat nelayan tersebut kehidupannya sangat bergantung pada laut pada saat musim ikan. Dan apabila waktu musim paceklik tiba, maka para nelayan kebingungan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keterbatasan pendidikan yang umumnya rendah, tidak dimilikinya modal yang cukup, sifat produk yang rentan terhadap waktu atau cepat busuk, dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada

satu mata pencaharian adalah faktor-faktor internal yang sering kali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan para nelayan tradisional. Dilain pihak, ada sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumberdaya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, ketergantungan terhadap pedagang, posisi tawar nelayan dihadapan pedagang yang lemah dan keadaan infrastruktur perikanan yang tidak mendukung makin memperparah keadaan. Ibarat pasien yang mengalami komplikasi penyakit, perangkat kemiskinan yang melanda kehidupan komunitas desa pantai sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks.

Keadaan kehidupan nelayan di Madura, Paciran Lamongan dan Palang Tuban juga terlihat pada nelayan di Prigi, Kecamatan Watulimo, Trenggalek dimana dimana berdasarkan survei dan wawancara yang saya lakukan di dapatkan bahwa beberapa nelayan di Prigi tersebut pada waktu musim paceklik atau kesulitan keuangan memutuskan bekerjasama dengan pedagang, dan membutuhkan modal yang cepat. Mereka dapat segera mendapatkannya dari tengkulak atau bakul ikan tanpa adanya prosedur-prosedur yang rumit. Meskipun di daerah tersebut terdapat lembaga perbankan ataupun koperasi, tapi para nelayan tidak pernah tertarik untuk meminta bantuan pinjaman kepada lembaga tersebut. Karena lembaga perbankan atau koperasi selalu memberikan prosedur yang menyulitkan dan prosesnya yang berbelit-belit. Disaat kondisi paceklik tersebutlah para nelayan meminjam uang atau modal untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari dan proses produksi berupa menangkap ikan di laut. Sebagai jaminan dikemudian hari pada waktu musim ikan, para nelayan tersebut dengan kesepakatan kepada pedagang ikan untuk menjual hasil tangkapnya kepada pedagang ikan untuk melunasi hutang.

Dari survei di lapang terhadap terhadap nelayan di Pantai Prigi, Kecamatan watulimo, Trenggalek dapat disimpulkan bahwa nelayan disana suka dan menikmati hubungan kerjasama tersebut dengan pedagang/tengkulak seakan akan hubungan kerjasama tersebut menguntungkan nelayan. Mereka tidak menyadari bahwa yang seharusnya yang menentukan harga ikan tersebut adalah nelayan yang menyebabkan lemahnya posisi tawar, padahal dengan adanya kerjasama tersebut para pedagang/tengkulak bisa leluasa dalam hal menentukan harga ikan di TPI.

Dengan melihat kehidupan nelayan di tiga lokasi diatas , dapat dikatakan bahwa masih belum adanya suatu kejelasan atau kepastian tentang peranan pedagang terhadap para nelayan di indonesia, apakah memang terdapat unsur eksploitasi dalam hubungan tersebut atau masih belum adanya suatu kejelasan bahwa hubungan sosial-ekonomi antara nelayan dan pedagang yang dijadikan salah satu penyebab kekuasaan pedagang atau bakul ikan untuk mendominasi atau menguasai daerah pemasaran dan menolak adanya pedagang dari daerah lain dalam menentukan harga ikan Di TPI Prigi.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Faktor kekuasaan apa saja yang menyebabkan pedagang lokal dalam menentukan harga ikan di TPI ?
2. Mengapa pedagang dari luar daerah tidak boleh masuk dalam menentukan harga ikan di TPI ?
3. Bagaimana persepsi nelayan terhadap adanya pedagang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kekuasaan pedagang atau "*bakul ikan*" dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi
2. Kekuasaan pedagang atau "*bakul ikan*" lokal dalam mendominasi daerah pemasaran dan menolak adanya pedagang dari daerah lain dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi
3. Persepsi nelayan dengan adanya pedagang

1.4 Kegunaan Penelitian

kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapang.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik yang nantinya benar-benar dapat membantu dan bermanfaat dan bermanfaat bagi nelayan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi dan sosial nelayan sehingga kehidupan nelayan menjadi lebih baik dan maju. Contohnya ketergantungan masyarakat nelayan kepada pedagang dalam penyediaan modal dan mendoktrin pedagang/tengkulak sebagai pihak yang merugikan selain itu belum ada lembaga ekonomi lokal yang benar-benar dapat menjamin kehidupan ekonomi nelayan.
3. Bagi masyarakat nelayan dan tengkulak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi nelayan dan tengkulak agar hubungan tersebut tidak hanya menguntungkan pihak tengkulak saja melainkan kedua belah pihak agar hubungan tersebut benar-benar seimbang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan yaitu keadaan dimana semua kebutuhan serba kekurangan atau kurang tercukupi. Kemiskinan merupakan suatu masalah utama bagi kalangan masyarakat nelayan yang kebutuhan modalnya masih kurang. Kemiskinan masyarakat pesisir berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif.

Keterbatasan akses permodalan ditandai dengan realisasi modal melalui investasi pemerintah dan swasta selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) yang hanya 0,02 % dari keseluruhan modal pembangunan. Konsekuensinya, terutama nelayan, kebutuhan permodalan dipenuhi oleh para tengkulak, toke, atau ponggawa, yang kenyataannya tidak banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, malah cenderung menjaturnya dalam lilitan utang yang tidak pernah bisa dilunasi. Demikian kultur kewirausahaannya masih bercorak manajemen keluarga dengan orientasi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (DKP, 2005)

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya sebagian besar bersumber dari aktivitas menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut lainnya. Mereka umumnya hidup di kawasan pesisir pantai dan sangat dipengaruhi kondisi alam terutama angin, gelombang, dan arus laut, sehingga aktivitas penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang tahun. Pada waktu tertentu nelayan tidak melaut karena angin kencang, gelombang besar dan arus laut yang kuat. Kondisi alam ini kerap kali disebut musim paceklik yaitu suatu

musim dimana nelayan tidak beraktivitas sama sekali. Guna mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka umumnya mengutang pada tengkulak (Karim.M, 2005)

Menurut Kusnadi (2004) Jika diamati secara seksama, kemiskinan nelayan disebabkan oleh dua faktor kompleks yang saling terkait satu sama lain. Faktor faktor tersebut dapat dikategorikan kedalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adalah faktor-faktor yang berkaitan berkaitan dengan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktifitas kerja mereka. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi diluar diri dan aktivitas kerja nelayan.

Faktor-faktor internal mencakup masalah: (1) keterbatasan kualitas sumberdaya nelayan, (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi masa depan.

Faktor-faktor kemiskinan yang bersifat eksternal ini mencakup masalah:

1. Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial, dan tidak memihak nelayan tradisional.
2. Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara.
3. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hukum bakau di kawaan pesisir.

4. Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan
5. Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan.
6. Terbatasnya peluang-peluang kerja disektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan.
7. Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun.
8. Terbatasnya teknologi pengolahan hasil pengolahan pasca tangkap.
9. Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Diberbagai wilayah desa pantai, saat ini persoalan yang dihadapi para nelayan bukan sekedar semakin terbatasnya sumber daya laut yang bisa dieksploitasi, tetapi juga karena keterbatasan usaha mereka sendiri. Usaha perikanan yang ditekuni penduduk desa pantai, sebagian besar masih didominasi usaha berskala kecil, teknologi sederhana sangat dipengaruhi irama musim dari hasil-hasil produksinya pun terbatas hanya untuk konsumsi lokal. Dibandingkan dengan desa-desa agraris, desa-desa pantai atau pesisir umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang acap kali lebih mencemaskan. Diberbagai desa pesisir, sejumlah kajian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya menemukan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan dan program pembangunan untuk perbaikan kehidupan nelayan sebagian besar belum mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Suyanto (2004) dalam Kusnadi (2004), Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas desa pantai, selain dipengaruhi faktor eksternal seperti makin terbatasnya potensi sumberdaya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, irama musim, mekanisme pasar, kedaan infrastruktur pelabuhan perikanan, dan sebagiannya yang tak

kalah penting adalah keterbatasan kondisi internal komunitas nelayan itu sendiri. Studi yang dilakukan penulis di sejumlah komunitas pesisir di Jawa Timur menemukan paling tidak ada dua faktor yang menyebabkan kondisi kesejahteraan nelayan tidak pernah beranjak membaik.

Pertama, adalah berkaitan dengan sifat hasil produksi nelayan yang acap kali rentan waktu alias cepat busuk. Bagi nelayan tradisional yang tidak memiliki dana dan kemampuan cukup untuk mengolah hasil tangkapan mereka, maka satu-satunya jalan keluar untuk menyalasi kebutuhan hidup adalah bagaimana mereka menjual secepat mungkin ikan hasil tangkapannya kepasar. Bagi nelayan miskin, persoalan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa memperoleh uang dalam waktu cepat, meskipun sering kemudian mereka harus rela menerima pembayaran yang kurang memuaskan dari para tengkulak terhadap ikan hasil tangkapan mereka. Di komunitas pesisir manapun jarang terjadi nelayan bisa menang tawar-menawar harga dengan tengkulak, karena secara struktural posisi nelayan selalu kalah akibat hasil sifat hasil produksi mereka yang sangat rentan waktu. Seorang tengkulak yang menunda membeli ikan, tidak akan bermasalah karena uang simpanan mereka ada di bank dan tetap berbunga. Sementara itu, seorang nelayan yang mencoba melawan hegemoni tengkulak, maka harga jual ikan miliknya justru kemudian merosot drastis karena kesegarannya berkurang;

Kedua, karena perangkap utang. Akibat irama musim ikan yang tidak menentu dan kondisi perairan yang sudah ditangkap lebih, maka sering terjadi keluarga nelayan miskin kemudian harus menjual sebagian atau bahkan semua aset produksi yang mereka miliki untuk menutupi utang dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tak kunjung usai. Bagi para nelayan yang sumber penghasilannya serba tidak pasti, dan bahkan ada kecenderungan menurun,

maka jangan heran jika mereka ibaratnya seperti orang jatuh tertimpa tangga: sakit dan bahkan terkadang mematikan.

Menurut Raymond Firth, kemiskinan nelayan paling tidak dicirikan oleh lima karakteristik:

- 1) Pendapatan nelayan bersifat harian (*daily increment*) dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya juga sangat bergantung pada musim dan status nelayan tersebut.
- 2) Dilihat dari pendidikan, tingkat pendidikan nelayan atau anak-anak nelayan pada umumnya rendah.
- 3) Dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan, sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang /tangkulak. Hal ini menyebabkan harga ikan dari nelayan dikuasai oleh pedagang/tengkulak.
- 4) Bidang perikanan membutuhkan investasi yang cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang cukup besar dibandingkan sektor usaha lainnya.
- 5) Kehidupan nelayan yang diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan terhadap satu mata pencaharian, yaitu menangkap ikan (Sutawi dan Hermawan, 2004 *dalam* Kusnadi, 2004)

Faktor kelangkaan sumberdaya perikanan dan kemiskinan memiliki kontribusi dalam peningkatan intensitas konflik. Karena itu upaya pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kegiatan kenelayanan dan pembuatan peraturan daerah untuk mengatur pengelolaan sumber daya perikanan lokal, merupakan langkah meminimalisasi konflik. Salah satu sebab kemiskinan nelayan yang

cukup potensial adalah masih kuatnya cengkraman tengkulak dalam kegiatan ekonomi perikanan. Kehadiran tengkulak tidak selalu bersifat negatif, karena mereka juga berperan dalam membantu kebutuhan sosial ekonomi nelayan dan menggerakkan roda perekonomian desa-desa nelayan. Hal ini bisa dilihat pada nelayan madura atau kehidupan nelayan di Prigi-Trenggalek dan Palang-Tuban.

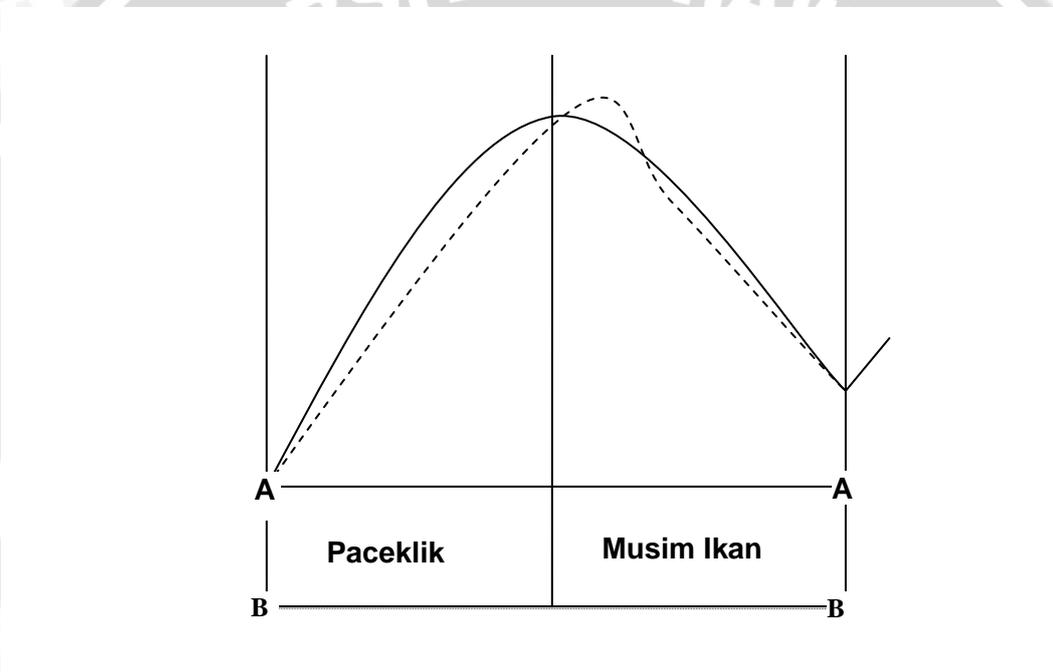
Dalam mengatasi kemiskinan nelayan, strategi diversifikasi usaha non perikanan serta dilakukan pembenahan non perikanan serta dilakukan pembenahan arah dan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih berfokus, tidak semata-mata berorientasi pada produktifitas dan pola perubahan yang bersifat linier. Pembangunan masyarakat nelayan mencapai keberhasilan, hendaknya harus menempatkan nelayan sebagai subjek pembangunan (Suyanto, 2004). Diversifikasi usaha berbasis perikanan sebenarnya mudah dan sudah banyak dilakukan oleh nelayan, akan tetapi usaha ini terkendala karena keterbatasan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memasarkannya.

Satria, (2002) mengungkapkan bahwa sosiologi masyarakat pesisir merupakan bidang kajian sosiologi yang relatif baru dan berkembang di Indonesia. Secara geografis bangsa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang lautnya mencapai 70% total wilayah. Dengan kondisi laut yang demikian luas disertai kekayaan alam yang begitu besar, pada kenyataannya Indonesia belum mampu menjadi bangsa yang maju. Salah satu penyebabnya adalah pelaku usaha perikanan yang masih didominasi nelayan tradisional. Kondisi ini bukanlah suatu yang umum, melainkan akibat pilihan kebijakan pembangunan masa lalu yang terlalu mengandalkan daratan dan mengabaikan lautan. Dampaknya, masyarakat pesisir yang kurang berkembang dan terus dalam posisi yang marjinal atau dibawah.

2.3 Eksploitasi

Menurut susilo (1986), menentukan bahwa fase-fase hubungan antara nelayan dan tengkulak secara hipotesis:

- ❖ Fase I : kondisi kehidupan nelayan yang penuh "ketidakpastian" perolehan hasil tangkap mengidentikkan nelayan pada satu posisi yang siap untuk "dimangsa" oleh tengkulak. Kondisi tersebut dilukiskan pada gambar 1 berikut:



_____ : Tingkat Pinjaman Nelayan

----- : Tingkat Kesempatan Pedagang ikan Memberikan Pinjaman

Gambar 1. Tingkat Ketergantungan Nelayan Pada Tengkulak

Pada fase ini terjadi hubungan antara orang-orang yang ingin mempertahankan hidupnya (sebagai hak atas subsistensi) dari pemberian bantuan, dengan orang yang menarik keuntungan atas bantuan yang diberikan. Tingkat kebutuhan pinjaman pada waktu periode berikut tidak kembali pada titik

B, tetapi berada pada titik A, demikian pula tingkat kesempatan tengkulak. Garis AB menunjukkan peningkatan ketergantungan nelayan pada tengkulak.

- ❖ Fase II : ketergantungan tingkat awal, tengkulak mendapat peluang untuk melakukan pinjaman-pinjaman jual beli yang adil. Agar nelayan dapat merasakan hal itu sebagai perjanjian yang adil, perjanjiannya masih memerlukan persetujuan dari nelayan. Pada fase ini nelayan masih merasakan bahwa kehadiran tengkulak memang diperlukan.

Jika tidak ada persetujuan dari nelayan, nelayan akan mencari sumber pinjaman lain. Sehingga perjanjian mengenai harga dan bunga atas pinjaman belum bersifat eksploitatif. Harga ikan bisa berkurang, sama atau lebih dengan harga pasar dan bunga pinjaman masih rendah. Persetujuan nelayan pada tahap ini masih dapat disebut sebagai persetujuan dalam arti yang sebenarnya (bukan keterpaksaan), karena masih memenuhi kriteria tentang keadilan. Perjanjian ini belum mengancam taraf taraf hidupnya atau tidak berpaling kepada sumber lain. Nelayan masih merasakan kesepadanan pertukaran itu sebagai harga yang adil sehingga nelayan menerima tata hubungan nelayan itu.

- ❖ Fase III : karena nelayan tidak merasa di eksploitasi maka tengkulak semakin leluasa untuk melakukan perjanjian-perjanjian jual-beli lebih tidak adil. Kadaan ini menyebabkan nelayan berada pada tingkat ketergantungan yang lebih tinggi. Justru pada fase ini nelayan enggan untuk memutuskan hubungan, suatu keadaan yang diciptakan oleh tengkulak untuk memperkokoh posisinya. Kedudukan tengkulak yang telah diperkokoh itu memungkinkan eksploitasi lebih mendalam. Walaupun nelayan sebenarnya ketidakadilan itu, tetapi ia sudah tidak kuasa untuk menghindari.

Untuk mengatakan bahwa fase lebih tidak adil dan fase II memang agak sulit. Tetapi yang jelas ada peningkatan perjanjian yang lebih tinggi dari fase II. Masalahnya, mengapa nelayan berharap memperkokoh hubungan itu? Dalam fase ini ia terpaksa menerima juga walaupun pertukaran semakin tidak seimbang, nelayan tunduk kepada kekuasaan tengkulak. Mungkin nelayan tidak dapat menuntut kewajiban kepada tengkulak karena kewajiban atas itu (menuntut nelayan) bukan sebagai tanggung jawab tengkulak, tetapi sebagai kewajiban alam (laut) untuk menyediakan ikan lebih banyak. Yang dapat nelayan menuntut (lebih tepat berharap) adalah penambahan pinjaman atau penundaan pembayaran. Walaupun mungkin, dengan bunga yang lebih tinggi itu, masih lebih baik bagi nelayan. Sehingga ia mengambil keputusan: lebih baik berada dalam ketergantungan tetapi terjamin dari pada bebas tanpa pinjaman.

- ❖ Fase IV : tengkulak dapat dengan mudah melakukan perjanjian-perjanjian tanpa harus melalui persetujuan dengan nelayan. Ia harus tunduk pada kekuasaan itu, dan nelayan akan memenuhi hampir segala permintaan tengkulak termasuk permintaan untuk tidak menjual ikan di TPI.

Memang tidak mudah menarik kesimpulan apakah terjadi eksploitasi nelayan oleh tengkulak atau tidak. Tetapi jika sampai pada fase IV sulit juga untuk tidak mengatakan bahwa keadaan itu eksploitatif. Agar ada suatu kriteria yang pasti tentang eksploitasi tengkulak kepada nelayan, maka perlu ditambahkan ukuran-ukuran perlengkapan. Ukuran itu adalah perbandingan antara aturan jual beli antara nelayan dan tengkulak dan nelayan bukan tengkulak.

Ajaran agama islam juga memperhatikan masalah keadilan dalam perdagangan (*tijarah*). Islam lahir dalam lingkungan tataniaga/perdagangan Makah dan karena itu di dalam konteks sosial-ekonomi, ia menekankan kebaikan-kebaikan perdagangan (*tijarah*) dan kemudian menempatkan posisi seorang pedagang yang jujur setelah nabi dan *syuhada* yang mati di jalan Allah. Pada saat yang sama ia menghukum berat para pedagang dan saudagar-saudagar yang melakukan praktik tidak jujur dan berusaha memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil. Transaksi apa pun yang berkaitan baik dengan masalah produksi maupun perdagangan, harus dilakukan dengan adil dan bebas dari eksploitasi.

Allah Berfirman dalam Al-qur'an :

“Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”¹. QS. Al-Muthafifin (83) : 1-6

Bila kita melihat uraian diatas, maka kita seakan-akan menganggap bahwa tengkulak/pedagang ikan ibarat “setan desa”-nya nelayan. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya disetujui para peneliti. Kusnadi menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, tengkulak justru harus dipandang sebagai roda penggerak perekonomian desa-desa nelayan. Tanggapan pemerintah dalam melihat realitas diatas adalah dengan membangun TPI di pusat-pusat pendaratan ikan. Dengan dibangunnya TPI tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *bargaining* nelayan dalam penentuan harga hasil tangkapan.

¹ QS. Al-Muthafifin (83) : 1-6

2.4. Hubungan Patron-Klien

Menurut Satria (2002), struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-Klien. Kuatnya ikatan patron-klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola patron-klien merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi nelayan.

Mengenai hubungan patron-klien ini, dalam tata hubungan patron-klien berkaitan dengan :

- 1) hubungan antara pelaku yang menguasai sumberdaya yang tidak sama
- 2) hubungan yang bersifat khusus yang merupakan hubungan yang merupakan hubungan pribadi yang mengandung keakraban
- 3) hubungan yang didasarkan asas saling menguntungkan

Sementara itu, Scott (1993) *dalam* Satria (2002) melihat hubungan patron-klien sebagai sebagai fenomena yang terbentuk atas dasar ketidaksamaan dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi. Dalam pertukaran itu, berarti ada arus dari patron ke klien dan sebaliknya. Arus dari patron ke klien meliputi:

1. penghidupan subsisten dasar, berupa pemberian pekerjaan tetap, penyediaan saprodi (sarana produksi), jasa pemasaran, dan bantuan teknis
2. jaminan krisis subsisten berupa pinjaman yang diberikan pada saat klien menghadapi kesulitan ekonomi

3. perlindungan terhadap klien dari ancaman pribadi (musuh pribadi) maupun ancaman umum (tentara, pejabat, atau pemungut pajak)
4. memberikan jasa kolektif berupa bantuan untuk mendukung sarana umum setempat (sekolah, tempat ibadah, atau jalan) serta mendukung festival serta perayaan desa

Masih menurut Scott (1983) dalam Satria (2002) arus dari klien ke patron sulit dikategorikan karena klien adalah "*milik*" patron yang menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron, seperti pekerjaan dasar, jasa tambahan bagi rumah tangga patron, jasa domestik pribadi. Selain itu klien merupakan anggota setia dari fraksi lokal patron tersebut. Meskipun penggambaran Scott merupakan hasil kajian berdasarkan konteks sosial masyarakat agraris, gambarannya tentang hubungan patron-client masih dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat pesisir. Berdasarkan hubungan tadi, jelaslah bahwa hubungan antara nelayan dengan patron yang menguasai sumberdaya tidak sama. Artinya, patron menguasai sumberdaya modal jauh lebih besar dari pada nelayan. Dengan ketidaksamaan penguasaan sumberdaya itu, terjalinlah ikatan patron-klien. Selanjutnya, nelayan akan mencari hutang kepada patron dengan jaminan ikatan pekerjaan atau hasil tangkapan yang hanya akan dijual kepada patron dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, ikatan patron klien tersebut merupakan mekanisme pertukaran antara patron dan klien, dalam hal ini patron memberikan bantuan modal, kapal motor, serta alat tangkap kepada klien. Patron menyediakan juga berbagai bentuk bantuan yang diperlukan klien diluar kepentingan di luar kepentingan modal. Adapun cicilan pelunasan utang klien kepada patron dibayarkan pada setiap penjualan hasil tangkapan. Jadi, nelayan klien harus menjual hasil tangkapannya kepada patron dengan harga yang ditetapkan patron secara sepihak. Dengan pola patron seperti itu, klien sering dihadapkan pada

sejumlah masalah seperti pelunasan kredit yang tidak pernah berakhirnya. Menurut patron, hal itu karena klien tidak disiplin dan mementingkan pengeluaran konsumtif seperti pembelian barang-barang elektronik. Diphak lain, nelayan klien menganggap itu merupakan taktik patron untuk mengikat klien sehingga bisnisnya dapat terus berjalan.

Diluar itu semua, pola patron-klien terus terjadi dalam komunitas nelayan karena memang belum ada institusi formal yang mampu berperan sebagaimana patron. Institusi tersebut tersebut belum berjalan secara efektif karena ada kesenjangan kultur institusi yang dibangun secara formal dengan kultur nelayan yang masih menekankan aspek personalitas. Disisi lain, nelayan sendiri belum mampu membangun institusi baru secara mandiri. Meski diakui bahwa para nelayan itu memiliki etos kerja dan mobilitas tinggi serta solidaritas sesama yang kuat, tatap saja mereka masih memiliki sejumlah kelemahan, khususnya kemampuan dalam mengorganisasi diri untuk kepentingan ekonomi (koperasi) maupun profesi. Sebagai nelayan, karena status nelayan dianggap sebagai *way of life*, etika subsisten masih menjadi pegangan mereka. Umumnya, ikatan-ikatan komunal yang ada pun (seperti ikatan dengan patron) dipertahankan untuk menjaga kepentingan subsisten mereka. Oleh karena itu, jelaslah alasan sulit dilepaskannya ikatan patron-klien.

Menurut Scott (1986) dalam Kusnadi (2000), berdasarkan status sosial-ekonomi individu yang terlibat dalam suatu jaringan, terdapat dua jenis hubungan sosial, terdapat dua jenis hubungan sosial yakni, hubungan sosial yang bersifat horizontal dan vertikal. Hubungan sosial yang bersifat horizontal terjadi jika individu yang terlibat didalamnya memiliki status sosial yang relatif sama didalam kehidupan sosial akan mewujudkan diri dalam bentuk hubungan tolong-menolong. Sedangkan hubungan sosial yang bersifat vertikal sebagaimana terwujud dalam bentuk hubungan patron-klien.

Hubungan patron-klien merupakan kasus-kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang kedudukan sosialnya (*patron*) lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimiliki untuk memberikan perlindungan atau keuntungan, atau kedua-duanya kepada orang yang kedudukannya (*client*) lebih rendah. Pada gilirannya, klien membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa kepada patron.

Pada dasarnya, hubungan patron-klien berkenaan dengan:

1. hubungan diantara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumberdaya yang tidak sama;
2. hubungan yang bersifat khusus (*particularistic*), hubung pribadi, dan sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*); dan
3. hubungan yang berdasarkan atas dasar saling menguntungkan serta saling memberi dan menerima (*take and give*).

Tujuan utama kedua belah pihak menjalani hubungan patron-klien mendapatkan keuntungan berupa barang, jasa, atau sumberdaya lain yang tidak dapat diperoleh melalui cara lain atas pengorbanan yang telah mereka berikan. Konsekuensinya, syarat timbal-balik dalam hubungan tersebut tidak harus bermakna seimbang (satu banding satu), melainkan sekedar keseimbangan, dalam arti satu sama lain saling mengharapkan (legg, 1983)

Menurut Acheson (1981) dalam kurnadi (2000), dalam banyak masyarakat nelayan diberbagai tempat, nelayan dan pedagang perantara/tengkulak terikat oleh hubungan kerjasama yang kuat demi kepentingan jangka panjang. Hubungan kerjasama tersebut bertujuan untuk mengatasi kesulitan nelayan dalam memasarkan hasil perikanan berupa tangkapan ikan yang kualitasnya cepat menurun dan karena keterbatasan modal

usaha. Disisi lain, nelayan selalu dirugikan dalam hubungan kerjasama tersebut. Selain menyediakan pinjaman modal usaha kepada para nelayan, tugas utama pedagang pedagang perantara adalah menyelenggarakan kegiatan pasar secara terus-menerus agar ikan tetap tersedia untuk konsumen dan menyelamatkan harga ikan ketika hasil tangkapan nelayan sedikit atau berlimpah. Pengamba di pesisir didominasi oleh *perempuan*.

Pengamba atau tengkulak dalam masyarakat nelayan dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab urusan domestik dan pencari nafkah memainkan peranan yang sangat penting dalam sebagian besar aktivitas domestik dan kegiatan perdagangan di desa pesisir. Besarnya peranan yang dilakukan oleh pengamba, karena mereka memiliki dasar materiil yang memadai untuk menyokong peranan itu. Pengamba atau tengkulak adalah sumber pinjaman utama berkaitan dengan pekerjaan kenelayan bagi nelayan yang umumnya keterbatasan dalam pemenuhan modal (Kusnadi, 2000)

1. Pedagang Ikan/ tengkulak

Bagi Pedagang, TPI merupakan institusi yang akan merebut ladang bisnisnya. Mereka beranggapan dengan adanya TPI, maka posisi mereka sebagai patron/orang tua asuh akan tereduksi. Hal ini otomatis akan mengakibatkan keuntungan yang mereka peroleh akan berkurang. Oleh sebab itu, pedagang akan berusaha mempertahankan posisinya dengan jalan mencari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem penjualan lewat pelelangan di TPI ini. Apabila mereka telah menemukan titik lemah tersebut, maka usaha eksploitasi mereka akan lebih kuat bila dibanding sebelumnya, hal ini sebagai bentuk anti klimaks.

2. Nelayan

Walaupun selama ini mereka tahu kalau pedagang dalam mengambil keuntungan lebih besar dari hasil tangkapannya, mereka tidak berdaya untuk

melawan. Mereka menganggap pedagang sebagai orang tua asuh yang harus dipatuhi. Bila dilanggar permintaannya, mereka takut terlantar, bagai anak ayam ditinggal induknya. Bila dilihat tujuan awal dibangunnya TPI, maka secara kasat mata pihak yang paling diuntungkan adalah nelayan. Hal ini karena di TPI diharapkan sistem pelelangan menempatkan nelayan berada pada posisi yang tidak diperdayai lagi oleh pedagang.

Nelayan hati-hati dalam mengambil keputusan dalam menyikapi TPI. Walaupun TPI menawarkan kemudahan-kemudahan, tapi mereka sulit untuk mengambil resiko jika berpindah ke hal-hal yang baru, dan ini merupakan karakter dari masyarakat desa pesisir.

2.5 Kekuasaan

Menurut Budiardjo (1984) perbedaan dalam menganalisis kekuasaan sebagai suatu gejala sosial sudah mulai nampak kalau kita memperhatikan bagaimana kekuasaan itu diartikan. Ada suatu kelompok pendapat yang mengartikan kekuasaan itu sebagai "dominasi" (dominance) dan pada hakikatnya bersifat "paksaan" (*coercion*). Demikianlah umpamanya, Strausz-Hupe merumuskan kekuasaan sebagai "*kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain*", seraya menandakan bahwa: semua organisasi sosial, mulai dari perkumpulan philateli sampai dengan negara-negara tangsi, semuanya mempunyai suatu unsur paksaan, dimana seseorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi memaksa. Juga untuk C. Wright Mills, *kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang*. demikian pula, Harold. Laswel menganggapnya "tidak lain dan tidak bukan penggunaan paksaan yang kuat" akhirnya. Paham yang sama di anut pula oleh Barrington Moore sebagai tersimpul dalam dalam usahanya, untuk menemukan dan menerangkan

bagaimana cara-cara golongan-golongan serta individu-individu tertentu berhasil melakukan dominasi terhadap sesamanya.

Kelompok paham yang mengartikan kekuasaan sebagai dominasi yang berhakikat paksaan itu bertolak dari diktum yang tersohor dari Lord Acton " kekuasaan cenderung untuk menjadi korup, dan kekuasaan mutlak menjadi korup secara mutlak pula. " Maka persoalan kemudian untuk kelompok paham ini merupakan persoalan praktis untuk "bagaimana caranya mengekang kekuasaan". " Siapa yang harus menjaga para penjaga", ataupun " bagaimana caranya mengadakan pengawasan". Suatu pengertian yang lain tentang kekuasaan nampak dalam karangan-karangan Talcott Parsons, Robert S.Lynd dan Marion Levy, Jr. Untuk kelompok pendapat yang kedua ini pengertian pokok dari kekuasaan ialah "pengawasan" (kontrol) tetapi sifat atau fungsinya tidaklah selalu harus merupakan paksaan. Untuk Parsons umpamanya, kekuasaan adalah " pemilihan fasilitas-fasilitas untuk mengawasi". Tetapi keperluannya ialah untuk " pelaksanaan fungsi dalam dan untuk masyarakat sebagai suatu sistem,...untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ataupun akan ditentukan secara mengikat oleh " umum". Seiring dengan ini, Robert Lynd mengemukakan bahwa: "kekuasaan sebagai suatu sumber sosial (social resource)" yang utama untuk mengadakan pengawasan dapat beralih wujud dari suatu paksaan sampai dengan suatu kerja sama secara suka-rela, tergantung dari pada perumusan ketertiban dan kekacauan sebagaimana ditentukan, diubah dan dipelihara dalam suatu masyarakat tertentu. "akhirnya, Marlon Levy menjelaskan bahwa: "penggunaan kekuatan fisik hanyalah merupakan suatu bentuk yang ekstrim dari secara penggunaan otoritas dan pengawasan atas tindakan-tindakan orang lain."

Dengan perkataan lain, persoalan pokoknya untuk kelompok paham terakhir ini ialah "legitimasi" (legitimacy) atau "pembenaran" " dari" "dasar" kekuasaan sebagaimana dirumuskan oleh parsons: "legitimasi dari pengawasan

demikian itu mempunyai arti yang penting untuk kedudukan kekuasaan dalam masyarakat dalam hubungannya dengan sistem tujuan-tujuannya. ” dan selanjutnya Marlon Levy menjelaskan bahwa ”kekuasaan selalu menyimpulkan imbangannya oleh tanggung jawab, yang berarti pertanggung jawaban dari individu-individu terhadap individu-individu atau golongan-golongan lainnya atas tindakan-tindakannya sendiri dan tindakan-tindakan orang-orang lain.”

Kedua anggapan yang berbeda tentang pengertian kekuasaan itu dapat dicakup dengan menggunakan suatu konsep yang bersifat *behaviouristis*, yaitu ”kekuasaan” (*decision*). Untuk sarjana-sarjana kategori pertama, konsentrasi kekuasaan berarti pengambilan keputusan yang sentarlistis, keputusan-keputusan diambil oleh mereka yang berkuasa, yang mempunyai kekuasaan berarti ikut serta dalam pengambilan keputusan. Demikian pula untuk kelompok sarjana yang kedua, pengawasan dilaksanakan melalui keputusan-keputusan. Dan pengawasan adalah keputusan bersama pula. Lebih penting lagi, kovertensi pendapat itu tidaklah sekadar bersifat semantis. Secara eksplisit ataupun implisit, keputusan itu selalu mempunyai makna ”otoriter” atau ”berwewenang” dengan kata lain keputusan-keputusan itu dilegitimasi (dibenarkan atau ”diabsahkan”) oleh kedudukan institusional dari pelakunya, ataupun keputusan-keputusan itu diberi sanksi institusional oleh masyarakat yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kekuasaan ada dimana dan selama keputusan diambil. Keputusan-keputusan tersebut bersifat mengikat karena selalu tersimpul didalamnya bahwa keputusan-keputusan itu adalah otoritatif. Berdasarkan analisis ini maka penulisan menyarankan suatu perumusan tentang pengertian tentang kekuasaan, yaitu: ”kekuasaan adalah pengaruh atau pengawasan atas pengambilan keputusan-keputusan yang berwenang (authoritative)”. Sekarang dapatlah kita meninjau analisis selanjutnya tentang keputusan-keputusan yang

mengikat seluruh masyarakat, yakni keputusan-keputusan yang diambil pada tingkat nasional.

2.6 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial berarti perbedaan populasi berdasarkan kelas secara hierarkis (Sorokin, 1962 dalam Arif, 2002). Basis perbedaan kelas adalah hak dan privilege (*rights and privileges*), kewajiban dan tanggung jawab (*duties and responsibilities*), nilai sosial dan privasi (*social value and privations*), serta kekuasaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat (*social power and influences among the members of a society*). Membagi menjadi tiga, yaitu:

1. stratifikasi berdasarkan ekonomi (*economical stratified*), yaitu jika dalam suatu masyarakat terdapat suatu perbedaan atau ketidaksetaraan status ekonomi,
2. stratifikasi berdasarkan politik (*politically*), yaitu jika terdapat rangkaian sosial berdasarkan otoritas, prestise, kehormatan dan gelar, atau jika ada pihak yang mengatur (*the rulers*) yang diatur (*the ruled*),
3. stratifikasi berdasarkan pekerjaan (*occupationally stratified*), yaitu jika masyarakat terdiferensiasi kedalam berbagai pekerjaan dan beberapa diantara pekerjaan itu lebih tinggi statusnya dibandingkan pekerjaan lain.

Untuk konteks masyarakat pesisir, stratifikasi, kelompok superior dan inferior masyarakat pesisir dalam konteks ekonomi ,apun politik akan dapat ditemukan. Dengan demikian, semakin memudahkan kita untuk memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat pesisir itu.

Menurut Suyanto dan Narwoko (2004) dalam Virgavani (2008), stratifikasi sosial berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat dalam suatu masyarakat tertentu yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestise yang tidak sama pula. Inti dari stratifikasi sosial adalah " perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat lain dalam memanfaatkan sumberdaya". Jadi, dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan prestise individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya. Stratifikasi sosial adalah suatu strata sosial atau pelapisan orang-orang yang kedudukannya sama dengan kontinum atau rangkaian kesatuan status sosial. Dalam masyarakat pada dasarnya bisa dibedakan tiga macam stratifikasi sosial, yaitu:

1. Hierarki kelas (*Class Hierarchis*), yang didasarkan pada penguasaan atas barang dan jasa. Indikator yang digunakan untuk membagi pelapisan atas dasar dimensi ekonomi relatif yang bermacam-macam. Dalam masyarakat masa lalu, kekayaan dalam bentuk lain, seperti uang. Dan warisan kekayaan lebih bernilai dari pada kekayaan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan atau bisnis
2. Hierarki Kekuasaan (*Power Hierarchis*), yang didasarkan pada kekuasaan. Indikator yang di pergunakan untuk memilih masyarakat atas dasar dimensi politik adalah distribusi kekuasaan. Kekuasaan berbeda dengan kewenangan. Seseorang yang berkuasa tidak selalu memiliki kewenangan atau menduduki jabatan formal. Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain dan mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Asas umum yang

menjadi dasar bagi terbentuknya stratifikasi sosial, khususnya kekuasaan politik adalah :

- Kekuasaan politik, seperti halnya barang-barang sosial lain, didistribusikan dengan tidak merata
 - Pada hakikatnya orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik "penting" dan mereka yang "tidak memilikinya"
 - Secara internal, elite itu bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok
 - Elite itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaanya berasal dari lapisan masyarakat yang sangat terbatas
 - Kelompok elite pada dasarnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapapun diluar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.
3. Hierarki Status (Status Hierarchies), dalam bentuk sederhana, stratifikasi atas dasar status ini membagi masyarakat ke dalam dua kelompok masyarakat yang disegani atau terhormat dan kelompok masyarakat biasa.

2.7 Arti Penting Tataniaga Perikanan

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), Tataniaga adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan atau penambahan kegunaan daripada barang dan jasa. Maka yang dimaksud tataniaga perikanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan atau penambahan kegunaan daripada barang dan jasa di bidang perikanan.

Kegunaan yang diciptakan oleh kegiatan tataniaga adalah kegunaan waktu, tempat dan kegunaan pemilikan. Kegunaan waktu, berarti bahwa barang-barang mempunyai faedah (yang lebih besar) setelah terjadi perubahan waktu. Misalnya ikan tongkol pada waktu bukan musimnya lebih besar keuntungannya dibandingkan pada waktu musimnya. Kegunaan tempat berarti barang-barang tersebut mempunyai kegunaan lebih besar karena perubahan tempat. Misalnya ikan tongkol di tengah laut akan mempunyai kegunaan lebih besar bila dibawa ke daratan/pantai. Kegunaan pemilikan berarti bahwa-barang tersebut mempunyai kegunaan lebih besar karena perubahan kepemilikannya. Berdasarkan uraian diatas, maka tataniaga pada dasarnya adalah tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan Bergeraknya barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

Di dalam masalah pemasaran hasil-hasil perikanan terdapat hubungan yang sangat erat antara kegiatan produksi dan pengolahan hasil perikanan, dimana satu dengan yang lainnya berpengaruh. Pemasaran hasil perikanan yang lancar dan baik merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan kegiatan produksi hasil perikanan atau merupakan salah satu faktor penunjang di dalam mengembangkan bidang perikanan walaupun menurut kenyataan kenaikan hasil produksi belum tentu membawa manfaat atau keuntungan bagi pihak produsen (nelayan) bila tidak ditunjang oleh pemasaran yang baik.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir daripada tataniaga adalah menempatkan barang-barang ketangan konsumen akhir. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan tataniaga yang dibangun berdasarkan arus barang yang meliputi proses pengumpulan (konsentrasi), proses pengimbangan (equalisasi) dan proses penyebaran (dispersi).

Proses konsentrasi merupakan tahap pertama dari arus barang. Barang-barang yang dihasilkan dalam jumlah kecil dikumpulkan menjadi jumlah yang besar, agar dapat disalurkan ke pasar-pasar eceran yang lebih efisien. Proses equalisasi merupakan tindakan-tindakan penyesuaian permintaan dan penawaran, berdasarkan tempat, waktu, jumlah dan kualitas. Dispersi merupakan proses tahap akhir daripada arus barang, dimana arus yang terkumpul disebarkan ke arah konsumen atau pihak yang menggunakannya.

Barang-barang hasil perikanan baik yang berasal dari perairan laut maupun perairan darat, dapat digolongkan ke dalam :

1. barang-barang konsumsi,
2. bahan-bahan.

Barang-barang konsumsi adalah produk perikanan yang langsung dipergunakan oleh konsumen akhir dalam bentuk yang sama seperti sewaktu meninggalkan bidang perikanan. Bahan-bahan adalah produk perikanan yang dipergunakan oleh pabrik atau pengolah untuk dijadikan atau menghasilkan barang baru.

Menurut Hanafiah dan Saefudin (2006), produk perikanan mempunyai ciri-ciri yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan masalah dalam tataniaganya. Ciri-ciri tersebut antara lain :

1. Produksi perikanan berlangsung secara musiman, sehingga panennya terbatas dalam periode tertentu yang relatif singkat dan di daerah yang terpencar-pencar sehingga mengakibatkan beban musiman (*peak load*).
2. Konsumsi hasil perikanan berupa bahan makanan yang relatif stabil sepanjang tahun. Sifat demikian ini dihubungkan dengan sifat produksinya yang musiman dan jumlahnya tidak berketentuan karena pengaruh cuaca, menimbulkan masalah dalam penyimpanan dan pembiayaan.

3. Barang-barang hasil perikanan berupa bahan makanan yang mempunyai sifat cepat atau mudah busuk (*perisable food*). Barang-barang hasil perikanan adalah organisme hidup dan karenanya cepat mudah busuk karena diakibatkan aktivitas bakteri, enzimatik dan oksidasi. Masalah ini memerlukan perawatan khusus dalam proses tataniaganya guna mempertahankan mutu.
4. Jumlah atau kualitas hasil perikanan dapat berubah-ubah menyebabkan timbulnya fluktuasi harga yang besar sebagai akibat dari perubahan kondisi penawaran dan variasi yang besar dalam kualitas cenderung mengakibatkan tidak terorganisirnya pasar, hal ini menyebabkan perubahan dalam harga menambah ongkos dalam penyimpanan, dan sukar di dalam grading.

Keempat hal diatas sangat berpengaruh dalam penentuan harga hasil perikanan, walaupun ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi.

2.8 Sistem Pelelangan Ikan

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Jika kita perhatikan dengan seksama, diri kita terdiri dari berbagai sistem untuk mengantar kita kepada tujuan hidup kita. Setiap sistem terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai

sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Menurut Mulyadi (2001) dalam Rohani (2009) :

“suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu”².

Pendekatan sistem memberikan banyak manfaat dalam memahami lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dipandang dari sudut pandangan sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur yang membentuk sistem tersebut dan mengidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dalam aspek pelelangan, yang lebih penting adalah sistem pelelangannya. Tujuan sesungguhnya daripada sistem pelelangan di daerah produksi adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual ikan hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan nelayan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

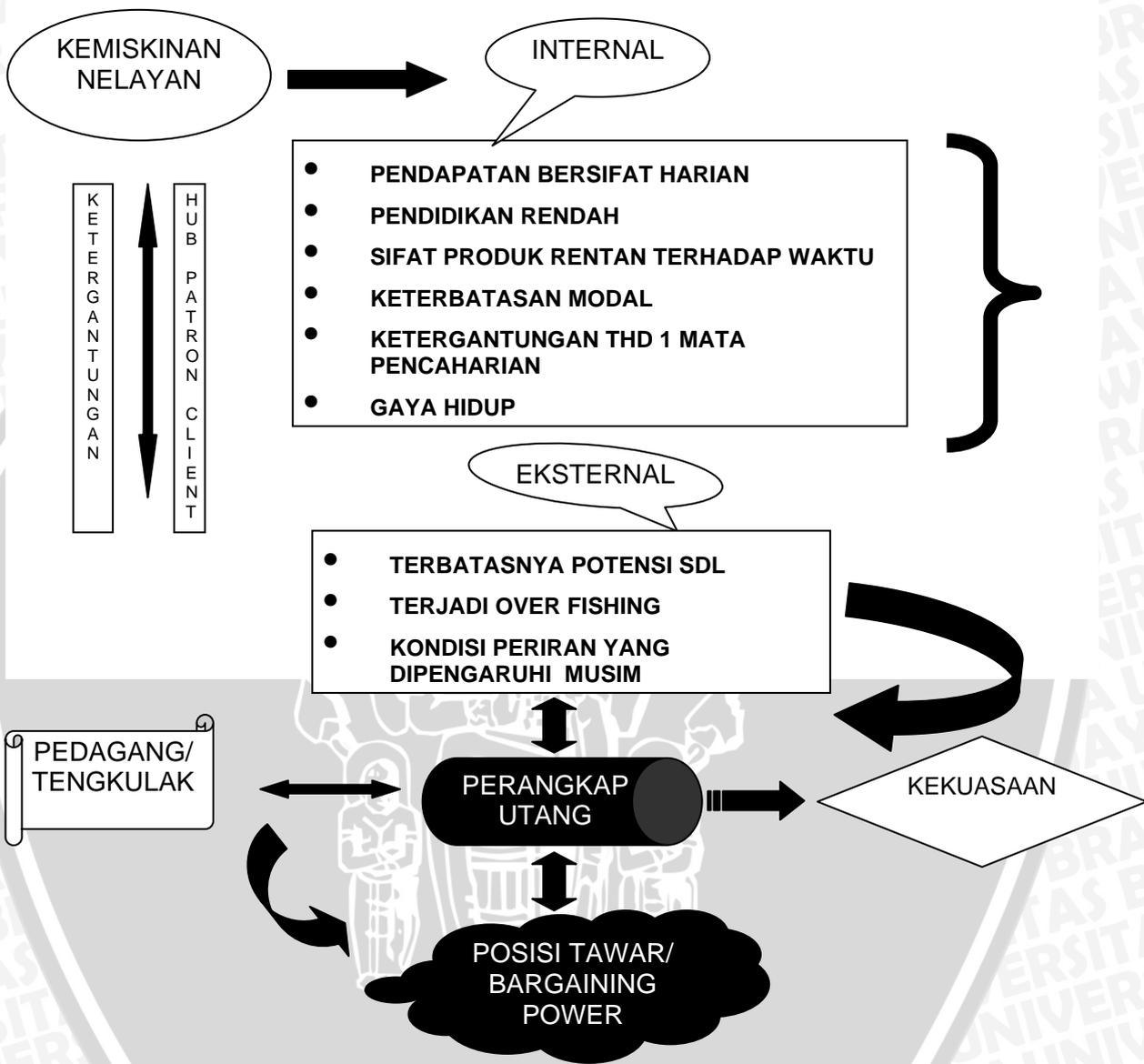
Pelelangan ikan diselenggarakan oleh penyelenggara lelang secara terbuka diantara penjual dan pembeli yang dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak baik untuk nelayan maupun pedagang. Keuntungan bagi nelayan adalah : Nelayan dapat menjual dengan harga terbaik, dalam pelelangan ikan berlaku sistem bersaing, dimana harga ditentukan atas penawaran dan permintaan sehingga nelayan mempunyai *bargaining position* yang bagus terhadap pedagang atau tengkulak, pelelangan ikan dapat digunakan sebagai stabilator harga, dalam arti kalau harga turun dan dianggap merugikan nelayan, penyelenggara pelelangan dapat ikut membeli ikan untuk mempertahankan harga, ikan dapat cepat terjual, nelayan tidak perlu menjajakan sendiri hasil produksinya yang akan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih.

Sedangkan untuk pedagang/tengkulak keuntungannya antara lain : mereka mendapatkan ikan dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar, lebih cepat mencari barang sebagai dagangan, dan dapat menyediakan barang secara kontinyu.

2.9 Kerangka Berfikir

Dalam penggolongan masyarakat nelayan pesisir umumnya dicirikan dengan kuatnya hubungan pola ikata patron-klien tersebut merupakan konsekuensi minimnya dalam pemenuhan modal untuk kegiatan, kegiatan penangkapan yang penuh dengan resiko serta ketidakpastian. Bagi nelayan yang kekurangan modal, menjalin ikatan dengan tengkulak (patron) merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan hidup. Hal ini terjadi sampai saat ini karena nelayan masih belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kelangsungan hidup perekonomian nelayan. Hubungan yang terjalin antara nelayan dan tengkulak jika dilihat menurut analisa James Scott, hubungan tersebut akan timbul eksploitasi didalamnya, sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang adanya eksploitasi dalam hubungan nelayan dengan tengkulak/bakul ikan, selain itu ada dugaan bahwa hubungan tersebut merupakan penyebab terjadinya kekuasaan pedagang/tengkulak atau bakul ikan dalam menentukan harga di pasaran.

Penelitian ini berusaha mencari jawaban tentang ada tidaknya gejala eksploitasi antara nelayan dengan tengkulak serta mencari kepastian apakah benar hubungan tersebut merupakan penyebab terjadinya kemiskinan yang berdampak pada kekuasaan pedagang tengkulak atau bakul ikan dalam menentukan harga ikan dipasaran. Untuk lebih jelas, dilihat pada alur kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang hubungan sosial ekonomi antara nelayan dan pedagang ikan atau tengkulak sebagai salah satu penyebab kekuasaan pedagang ikan dalam menentukan harga ikan di TPI. Untuk menghimpun informasi, mengingat tempat tersebut adalah daerah asal peneliti. Penelitian tersebut dilaksanakan di TPI Prigi, kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai bulan Oktober 2008 sampai Desember 2008.

3.2 Metode Penelitian Studi Kasus

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kasus (*case study*) adalah salah satu metode penelitian sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini digunakan untuk melacak peristiwa-peristiwa di dalam konteks kehidupan nyata dan memusatkan pada suatu kasus secara mendalam dan mendetail. Ada tiga kondisi yang perlu di perhatikan dalam hal ini, (a) tipe pertanyaan yang diajukan, (b) luas kontrol yang di miliki peneliti atas peristiwa perilaku yang akan diteliti, (c) fokus terhadap adanya peristiwa kontemporer. Pertanyaan-pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” pada dasarnya lebih eksplanatoris dan lebih mengarah ke penggunaan studi kasus, historis, dan eksperimen. Hal ini disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini berkenaan dengan kaitan-kaitan operasional yang menuntut pelacakan waktu tersendiri, dan bukan sekedar frekuensi atau kemunculan. Sedangkan metode

survei adalah menggunakan pertanyaan yang berhubungan dengan siapakah, apakah, dan berapa banyak. Metode ini menguntungkan bilamana tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan kejadian atau kelaziman suatu fenomena yang berkenaan dengan memprediksi hasil-hasil tertentu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus tunggal (Yin, 2006)

3.2.1 Pendesainan Studi Kasus Tunggal

Desain penelitian adalah logika keterkaitan antara data yang dikumpulkan (dan kesimpulan-kesimpulan yang akan dihasilkan) dan pertanyaan awal dalam suatu penelitian. Selain itu desain penelitian adalah suatu rencana tindakan untuk berangkat dari sini kesana, dimana “disini” bisa diartikan sebagai rangkaian pertanyaan awal yang harus dijawab dan “disana” merupakan rangkaian konklusi (jawaban) pertanyaan tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian studi kasus adalah pendesainan studi kasus tunggal.

Dalam studi kasus, terdapat lima komponen desain penelitian yang sangat penting, yaitu: pertanyaan-pertanyaan penelitian, proposisi, unit analisis, logika, dan kriteria untuk menginterpretasikan temuan.

1. Pertanyaan – pertanyaan penelitian

Dalam studi kasus disarankan agar bentuk pertanyaan tersebut berkenaan dengan: siapa, apa, dimana, bagaimana, mengapa memberi rambu-rambu penting terhadap strategi penelitian yang akan digunakan. Tapi dalam syudi kasus yang paling cocok, strategi yang paling cocok adalah dengan menggunakan pertanyaan “bagaiman” dan “mengapa”. Karena dalam penelitian ini berkenaan dengan permasalahan-permasalahan hubungan social ekonomi yang berkaitan dengan kekuasaan pedagang ikan dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi , maka pertanyaan –pertanyaannya yang diajukan berkenan dengan:

- a. Mengapa para pedagang ikan dengan kekuasaannya bisa menentukan harga ikan di TPI Prigi ?
- b. Bagaimana para pedagang ikan bisa menentukan harga ikan di TPI Prigi ?
- c. Mengapa pedagang ikan menolak adanya pedagang dari daerah lain untuk menentukan harga ikan di TPI Prigi ?
- d. Bagaimana persepsi nelayan dengan adanya pedagang atau bakul ikan ?

2. Proposisi Penelitian

Bahwa setiap proposisi mengarahkan perhatian peneliti kepada suatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Penelitian ini mengacu pada topik kekuasaan pedagang ikan dalam menentukan harga, maka mengapa pedagang ikan dengan kekuasaannya bisa menentukan harga ikan serta bagaimana persepsi nelayan terhadap adanya pedagang atau bakul ikan.

3. Unit - unit Analisis

Komponen ini secara fundamental berkaitan dengan fundamental berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan “kasus” yang bersangkutan, merupakan suatu problema yang telah mengganggu banyak peneliti diawal studi kasusnya. Pada penelitian ini “kasus” atau permasalahan yang dimaksud yaitu berbicara tentang penyebab ketergantungan masyarakat nelayan terhadap pedagang ikan yang menyebabkan kekuasaan pedagang ikan dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi. Pada keadaan seperti ini, maka kesatuan hubungan antara pedagang ikan atau tengkulak dengan nelayan merupakan permasalahan utama yang akan dikaji.

4. Logika

Komponen-komponen ini menyetengahkan tahap-tahap analisis data dalam penelitian studi kasus dan desain penelitian perlu meletakkan dasar-dasar bagi analisis ini (Yin, 2002)

3.3 Langkah – Langkah Metode Studi Kasus

3.3.1 Persiapan Pengumpulan Data

A. Keterampilan-keterampilan Dari Peneliti Studi Kasus

Menurut Yin, (2006), ada pokok-pokok keterampilan yang harus dimiliki peneliti studi kasus pada waktu persiapan pengumpulan data pada umumnya dapat ditegaskan sebagai berikut:

1. Peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik dan menginterpretasikan jawaban-jawaban
2. Peneliti harus menjadi “pendengar” yang baik dan tidak terperangkap oleh ideologi atau prakonsepsi dirinya sendiri
3. Peneliti harus mampu menyesuaikan diri dan fleksibel
4. Peneliti harus mempunyai daya tangkap yang kuat terhadap isu-isu yang akan diteliti
5. Peneliti harus tidak bias oleh tanggapan-tanggapan yang sudah ada sebelumnya.

B. Latihan Dan Daya Studi Kasus Yang Spesifik

Selain ketrampilan-ketrampilan tersebut, latihan dan persiapan formal merupakan pendahuluan yang esensial bagi kegiatan-kegiatan pengumpulan data yang sebenarnya. Latihan-latihan tersebut antara lain:

1. Latihan studi kasus sebagai pengalaman seminar
2. Pengembangan dan peninjauan ulang protokol (alat pemandu)
3. Permasalahan yang harus dituju

3.3.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1. Dokumentasi

Tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai bentuk dan hendaknya menjadi objek rencana-rencana pengumpulan data yang eksplisit. Sebagai contoh: surat, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian, artikel-artikel yang muncul dimedia massa (Yin, 2006). Dalam penelitian ini dokumen sumber yang di dapat merupakan data yang didapat dari instansi-instansi tertentu, seperti kantor kelurahan, pembukuan di TPI Prigi nanti dijadikan data sekunder karena data ini berisi tentang keadaan umum lokasi penelitian dan data demografi dari lokasi penelitian.

2. Wawancara

Menurut Yin (2006), salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara merupakan sumber informasi yang esensial bagi studi kasus. Bahwa tipe yang paling umum wawancara studi kasus adalah *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan disamping itu adalah opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah nelayan dan pedagang ikan (tengkulak) di TPI Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai alat bantu penelitian yaitu dengan menggunakan kuisisioner pertanyaan secara terbuka. Jenis data primer yang dikumpulkan berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan responden yaitu nelayan dan pedagang ikan serta profil dari setiap responden. Secara keseluruhan, wawancara merupakan sumber bukti yang

esensial (utama) bagi studi kasus, karena studi kasus pada umumnya berkenaan dengan urusan kemanusiaan, pada lampiran 5.

3. Observasi Langsung (pengamatan Secara Langsung)

Observasi langsung dapat dilakukan dengan cara membuat kunjungan langsung terhadap situasi studi kasus, peneliti melakukan kesempatan untuk observasi langsung. Dalam penelitian ini dilakukan observasi/pengamatan langsung ini dapat diketahui bagaimana keadaan lokasi dan penduduk disekitar TPI Prigi. Data dari observasi ini berupa foto-foto yang ada di lapang. Data ini termasuk data primer.

4. Observasi Partisipan

Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. Sebagai contoh, bisa ikut langsung dalam kegiatan melaut dalam menangkap ikan dan ikut serta dalam transaksi jual beli ikan dan menjadi penduduk dilingkungan sosial yang bersangkutan sebagai pelaku studi kasus disekitar TPI Prigi. Data ini termasuk data primer.

3.3.3 Teknik Penentuan Responden

Menurut Arikunto (1998) dalam Virgavani (2008), responden adalah orang yang dipilih dan dapat dipercaya untuk bisa memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan peneliti. Penentuan responden ini dilakukan dengan cara sampling yang menggunakan teknik *purpoisive sampling* yakni, penilaian sekelompok subyek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang di pandang mempunyai hubungan erat dengan populasi yang diketahui. Digunakan teknik pengambilan *purposive sampling* ini karena kesederhanaan prosedur yang akan memberikan hasil yang cukup baik, karena populasinya tidak tersebar dalam bidang bagian

yang luas. Alasan peneliti mengambil sampel dari responden dan bukan atas didasarkan strata, random, atau daerah tatapi sesuai dengan tujuan yang ada di dalam penelitian ini. Dasar pertimbangan pemilihan responden ini adalah adanya informasi yang dimiliki oleh responden yang mencakup permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini (ketergantungan ke pedagang ikan yang menyebabkan kekuasaan pedagang ikan dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi). Responden dalam penelitian ini adalah:

- **Pedagang atau tengkulak di TPI Prigi**

Responden pedagang berjumlah 2 orang yang masih memberikan pinjaman kepada nelayan, dimana untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama dalam hal peminjaman modal pada nelayan.

- **Nelayan yang mengutang pada pedagang**

Responden nelayan yang menghutang berjumlah 2 orang, yang ditujukan pada nelayan yang bekerjasama dengan pedagang.

- **Nelayan yang menjual hasil tangkap pada pedagang**

Responden nelayan yang menjual hasil tangkap berjumlah 2 orang, yang ditujukan pada nelayan yang bekerjasama dengan pedagang.

- **Karyawan TPI Prigi**

Responden ini ditujukan kepada staf TPI berjumlah 1 orang, yaitu untuk mengetahui mekanisme proses sistem pelelangan di TPI Prigi.

3.3.4 Analisis Data

Analisis bukti atau data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, atau pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposal awal suatu penelitian. Dalam analisis data, persiapan yang terbaik untuk melakukan analisis studi kasus adalah dengan memiliki suatu strategi umum analisis. Tanpa strategi ini (strategi umum), akan berlangsung secara sulit.

Suatu cara untuk mengatasi kesulitan ini adalah bermain dengan data, dengan menggunakan beberapa teknik yang telah diperhitungkan, bentuk-bentuk analisis yang dominan yaitu berisi 3 teknik, yaitu: penjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu (Yin, 2006)

Analisis data dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan analisa pembuatan eksplanasi, proses pembuatan eksplanasi yang perlu diperhatikan bahwa eksplanasi akhir merupakan hasil dari serangkaian perulangan sebagai berikut :

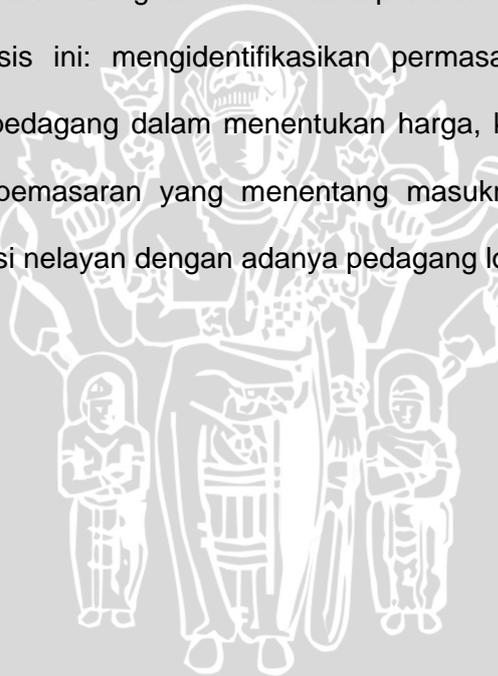
- I. Membuat suatu pertanyaan teoritis awal atau proposisi awal tentang kebijakan atau perilaku sosial
- II. Membandingkan temuan-temuan kasus awal dengan pernyataan atau proposisi tadi
- III. Memperbaiki pernyataan atau proposisi
- IV. Membandingkan rincian-rincian kasus lainnya dalam rangka kebaikan tersebut
- V. Memperbaiki lagi pernyataan atau proposisi
- VI. Membandingkan perbaikan tersebut dengan fakta-fakta dari kasus kedua, ketiga, atau lebih
- VII. Mengulangi proses ini sebanyak mungkin sebagaimana diperlukan.

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisa deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti tentang status manusia, suatu kondisi, suatu sistem penilaian atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, dan aktual mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Marzuki, 1983 *dalam* Priyana, 2007).

3.3.5 Deskriptif Kualitatif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah obyek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif dilakukan peneliti untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai beberapa obyek atau subyek muatan secara rinci. Didalam penelitian deskriptif pertanyaan diajukan berkenan dengan the what, who, why, where, when, dan how sebagai obyek penelitiannya (Suyanto, 2005)

Menurut Arikunto (1992) *dalam* Prianata (2007), deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Yang termasuk dalam analisis ini: mengidentifikasi permasalahan faktor-faktor penyebab kekuasaan pedagang dalam menentukan harga, kekuatan pedagang mendominasi daerah pemasaran yang menentang masuknya pedagang dari daerah lain dan persepsi nelayan dengan adanya pedagang lokal di TPI Prigi.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian

Secara umum kondisi topografis Desa Tasikmadu adalah perpanjangan lereng pegunungan kapur selatan dengan rata-rata ketinggian tiga meter di atas permukaan laut. Struktur tanahnya sangat bagus untuk tanaman jati, selain itu juga digunakan untuk area persawahan yang banyak terdapat di bagian utara Desa Tasikmadu. Perairan Desa Tasikmadu merupakan perairan teluk dengan dasar lumpur bercampur pasir dan sedikit berbatu karang. Teluk ini dinamakan teluk prigi yang mempunyai kedalaman 6-45 meter.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang dibangun di atas lahan seluas 27,5 Ha dengan luas tanah 11,5 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha. Terletak di Teluk Prigi pada posisi koordinat $111^{\circ} 43' 58''$ BT dan $08^{\circ} 17' 22''$ LS, yang tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Dengan jarak ke ibu kota Propinsi (Surabaya) adalah ± 200 km, dan jarak ke ibu kota Kabupaten (Trenggalek) adalah ± 47 km. Sungai-sungai di wilayah Watulimo berukuran kecil, oleh karena itu hanya berfungsi sebagai sarana pengairan sawah. Tinggi daerah Watulimo sekitar 299 meter dari permukaan laut. Suhu perairan Watulimo rata-rata 27° C. Sedangkan keadaan curah hujan pertahun di wilayah Watulimo 27,0 mm per tahun (PPN Prigi, 2007)

Iklm di wilayah Watulimo adalah iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

4.2 Keadaan Umum Perikanan

4.2.1 Sumber Daya Alam Dan Kegiatan Usaha Perikanan

kegiatan usaha perikanan di kabupaten Trenggalek terdiri dari penangkapan ikan di laut, pengolahan ikan tradisional, kegiatan budidaya air tawar, budidaya air payau (tambak) dan budidaya laut. Hasil usaha tersebut di pasarkan dalam bentuk segar maupun olahan baik untuk konsumsi didalam kabupaten maupun diluar kabupaten. Jenis komoditas perikanan dominan adalah ikan layang, tuna, tongkol, kembung. Sedangkan komoditas ekspor adalah ikan layur, tuna, cakalang udang barong (lobster) dan udang putih (DKP, 2006)



Gambar 3. Kondisi Perairan di TPI Prigi

Pada masyarakat pesisir, kegiatan usaha perikanan yang paling yang paling menonjol didaerah pesisir pantai Prigi adalah adalah usaha penangkapan. Selain itu ada juga kegiatan pengolahan ikan seperti pindang, ikan basah (ikan yang di es), ikan asap maupun ikan yang dikeringkan. Untuk daerah operasi jaring purse seine dan payang hampir tumpang tindih. Namun perbedaan terletak pada jaring payang lebih memungkinkan untuk dioperasikan di daerah pinggir, bahkan mendekati tepi karang dan pantai curam. Daerah operasi kedua alat tangkap ini terletak pada sekitar gugus pulau-pulau didalam teluk Prigi (pulau Saai, Anakan, Tanengan, Bayulangu, Solno, Batay, Siklapa, Sababahan,

Seksal), Munjungan, Panggol, Mlorok, Pacitan, Sendang Biru, bahkan ada yang sampai muncar. Adapun dalam kegiatan penangkapan tersebut biasanya pada waktu berangkat pukul 17.00 – 05.00 WIB. Dalam kegiatan operasi penangkapan dalam per trip ada 12 jam. Setiap kali tri terdapat 3 – 5 kali setting tergantung banyak sedikitnya ikan yang didapat.

Selain hasil tangkap ditentukan dengan adanya musim tetapi harus melihat cuaca dan kondisi perairan. Produksi nelayan tiap nelayan tidak sama. Apabila pada kondisi perairan sedang baik maka hasil tangkapan bisa mencapai 40 keranjang atau sekitar 4000 kg akan tetapi ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali. Produksi hasil tangkapan meliputi: ikan cakalang, layang deles, layur, lemuru, tongkol como, tuna mata besar dan lain-lain. Setiap hasil tangkapan ada yang dibawa untuk diolah sendiri, atau dijual ke bakul langsung pada saat itu juga karena mahalnya sarana transportasi untuk di pasarkan kedaerah lain dan karena adanya keterikatan dengan tengkulak tentang penyediaan modal. Kegiatan selain menjual ikan juga tampak di daerah ini, ditunjukkan dengan adanya pedagang kaki lima, konter pulsa ataupun warung makanan yang sengaja dipersiapkan untuk para nelayan ataupun yang lainnya.



Gambar 4. Hasil Tangkapan Nelayan

Kegiatan usaha perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi baik dibidang penangkapan maupun pengolahan pada umumnya masih bersifat tradisional. Pada tahun 2005 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pelabuhan masih sedikit jumlahnya. Selain Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Prigi (PPPS Cabang Prigi), kegiatan perusahaan perikanan yang sudah menginvestasikan usahanya di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah:

- a. PT. Prima Indo Bahari Sentosa bidang usaha *cold storage* dan pabrik es.
- b. PT. Bumi Mina Jaya bidang usaha tepung ikan dan pengolahan hasil perikanan.
- c. PT. Sumber Pangan Nasional bidang usaha *cold storage*.
- d. Perusahaan perseorangan sebanyak 7 (tujuh) unit dengan bidang usaha pengepakan ikan.
- e. Perusahaan pengelola ubur-ubur sebanyak 7 (tujuh) unit (PPN, 2007)



Gambar 5. Pabrik Tepung Ikan

4.2.2 Jumlah Nelayan, Armada Perikanan dan Jenis Alat Tangkap

Dengan melihat rincian penyerapan tenaga kerja yang melakukan kegiatan perikanan di PPN Prigi dari tahun 2003-2007 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di PPN Prigi Tahun 2003-2007

No.	Tahun	Nelayan	Pedagang / Pengolah Ikan	Pekerja Lainnya	Jumlah (orang)
1	2003	4.325	337	319	4.981
2	2004	5.526	975	1.043	7.544
3	2005	6.235	975	1.328	8.538
4	2006	6.271	975	1.373	8.619
5	2007	6.271	1.201	1.392	8.864

(Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007: 108)

Penyerapan tenaga kerja yang melakukan kegiatan perikanan di PPN Prigi pada tahun 2007 adalah sebesar 8.864 orang. Dibanding tahun 2006 yaitu sebesar 8.619 orang, maka pada tahun 2007 di lingkupan PPN Prigi terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 245 orang atau 2,84%.

Sedangkan untuk melihat jumlah nelayan berdasarkan alat tangkap yang ada di PPN Prigi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Nelayan di PPN Prigi pada tahun 2007

No	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan (Jiwa)
1	Nelayan alat tangkap <i>purse seine</i>	3.000
2	Nelayan alat tangkap <i>gill net</i>	129
3	Nelayan alat tangkap jaring klitik	106
4	Nelayan alat tangkap pancing ulur	1.092
5	Nelayan alat tangkap pukot pantai	1.008
6	Nelayan alat tangkap payang	576
7	Nelayan alat tangkap pancing tonda	360
	Jumlah	6.271

(Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007: 38)

Bila kita lihat tabel diatas, maka nelayan yang paling banyak jumlahnya adalah yang menggunakan alat tangkap *purse seine* sebesar 3.000 orang atau 45,85%. Hal ini terjadi karena dalam satu alat tangkap *purse seine* dioperasikan oleh rata-rata 20 orang ABK.

Jumlah alat tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi pada tahun 2007 adalah sebesar 948 yang terdiri dari pancing ulur berjumlah 546 unit (57,59 %), pukat cincin berjumlah 120 unit (12,66 %), pancing tonda berjumlah 72 unit (7,59 %), pukat pantai berjumlah 42 unit (4,43 %), pancing prawe berjumlah 36 unit (3,80 %), jaring klitik berjumlah 53 unit (5,59 %), jaring insang berjumlah 43 unit (4,54 %), payang berjumlah 36 unit (3,80 %). Dibanding dengan jumlah alat tangkap pada tahun 2006 sebesar 1.677 unit, berarti mengalami penurunan sebesar 729 unit.

Berikut ini rincian jumlah alat tangkap menurut jenisnya yang ada di PPN Prigi Kabupaten Trenggalek bisa dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun 2003-2007

No	Jenis Alat Tangkap	Tahun (unit)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pukat Cincin / <i>Purse Seine</i>	112	230	240	115	120
2	Jaring Insang / <i>Gill Net</i>	10	17	34	43	43
3	Payang / <i>Boat Seine</i>	35	28	20	36	36
4	Pukat Pantai / <i>Beach Seine</i>	33	40	42	42	42
5	Pancing Prawe / <i>Long Line</i>	282	25	36	36	36
6	Pancing Ulur / <i>Hand Line</i>	286	1.158	1.298	1.298	546
7	Pancing Tonda / <i>Trawl Line</i>	0	28	51	57	72
8	Jaring Klitik / <i>Gill Net</i>	2	30	36	50	53
Jumlah (unit) / <i>Total (units)</i>		760	1.556	1.757	1.677	948

(Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 200: 105)

Alat tangkap gill net dioperasikan didaerah luar pantai, diluar teluk Prigi sampai ± 40 mil kearah Samudera Indonesia. Alat tangkap ini sering dioperasikan dengan alat tambahan pancing prawe. Hasil tangkapan gill net ini

terutama adalah jenis ikan tuna dan cakalang. Alat ini yang juga dioperasikan pada daerah diluar teluk Prigi ini adalah pancing ulur.

Untuk daerah operasi jaring purse seine dan payang hampir tumpang tindih. Namun perbedaan terletak pada jaring payang lebih memungkinkan untuk dioperasikan di daerah pinggir, bahkan mendekati tepi karang dan pantai curam. Daerah operasi kedua alat tangkap ini terletak pada sekitar gugus pulau-pulau didalam teluk Prigi (pulau Sari, Anakan, Tanengan, Boyolangu, Solimo, Batay, Siklapa, Sasah, Seksal).

Daerah operasi jaring tarik di Prigi dibagi manjadi 3 lokasi utama yaitu, 1) Labuhan Prigi, 2) Labuhan Damas, 3) Labuhan Karanggongso. Masing-masing daerah terbagi atas sub area. Area Prigi terdiri dari penangkapan : Siwaan-1, Siwaan-2, Udang Galah, Waru Doyong, Ngresep, Blandoyo dan Cengkronng Kulon. Daerah operasi pantai Damas dibagi atas sub area : Wonojoyo, Ngekel, Pancer Bang, Ngemplung Kulon, Bujelan, Ngrumpelan dan Gledong. Area penangkapan pantai Karanggongso terdiri atas : Pasir Putih, Watu Dukuh, dan Den Roso. Daerah penangkapan yang banyak dipilih adakah Prigi dan Damas.

Sedangkan untuk daerah operasi alat tangkap jaring pethotan, pithil, blengker dan edher adalah diujung goa batu dan karang malang. Karena kedua lokasi tersebut merupakan tepian pantai curam, maka banyak habitat untuk tempat berlindung ikan-ikan karang dan udang barong.

Penangkapan ikan diperairan umum dilakukan disungai dan ceck dam yang ada dengan mempergunakan alat tangkap yang sederhana seperti jala dan pancing. Meskipun jumlahnya kecil namun kegiatan penangkapan diperairan umum dilakukan disemua wilayah Kecamatan Kabupaten Trenggalek. Usaha penangkapan ikan di perairan umum merupakan usaha sampingan bagi penduduk yang mayoritas adalah pantai.

4.2.3 Produksi Perikanan

Pada tahun 2007 volume produksi perikanan yang didaratkan di PPN Prigi sebesar 22.332 ton dengan nilai Rp 92.259.150.000. Dibanding dengan tahun 2006 sebesar 23.603 ton dengan nilai Rp 83.485.900.000. Berarti mengalami penurunan volume sebesar 1.271 ton atau 5,38% dan nilai produksi mengalami peningkatan sebesar Rp 8.773.250.000 atau 10,51%.

Selengkapnya data tentang perkembangan produksi perikanan disajikan dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2003–2007

No.	Tahun	Volume (Ton)
1	2003	46.756
2	2004	17.794
3	2005	14.346
4	2006	23.603
5	2007	22.332

(Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007: 29)

Penurunan produksi ikan ini dikarenakan pada tahun 2007 tidak terjadi musim ikan, selain itu produksi ikan unggulan seperti ikan lemuru dan ikan cakalang mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya jenis ikan yang didaratkan di PPN Prigi Pada tahun 2006 - 2007 dapat dilihat pada table 5 berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Produksi Ikan Pada Tahun 2006 Dan Tahun 2007 Berdasarkan Jenisnya

Jenis ikan	Tahun 2006 (Ton)	Tahun 2007 (Ton)
Alu-alu	17	3
Bentong	45	14
Biji nangka	0	0
Cakalang	1.327	942
Cucut lanyam	141	39
Ekor merah	90	51
Kakap	0	0
Kembung	58	9
Kwee	12	124
Layang benggol	448	0
Layang deles	4.395	5.189
Layaran	0	0
Layur	446	686
Lemadang	9	33
Lemuru	8.036	4.502
Manyung	1	0
Pari kembang	100	50
Peperek	96	30
Selar hijau	0	76
Slengseng	86	156
Swanggi	1	0
Tembang	22	2
Teri ijo	7	0
Tengiri	8	0
Teri	356	0
Tetengkek	1	4
Tongkol como	7.309	9.998
Tuna mata besar	583	373
Lain-lain	9	19
Jumlah	23.603	22.332

(Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2008: 14-25)

Volume jenis ikan yang terbanyak didaratkan di PPN Prigi adalah ikan dengan produk ikan unggulan jenis ikan pelagis seperti ikan Tongkol como 9.998 ton, Layang 5.189 ton, Lemuru 4.502 ton, Cakalang 942 ton, Layur 686 ton, Tuna mata besar 373 ton, Slengseng 156 ton dan jenis lainnya 486 ton dengan total nilai Rp 92.259.150.000.

4.2.4 Jumlah Pedagang Ikan Berdasarkan Karakter Usaha

Pada waktu penelitian ini, jumlah pedagang yang ada dilokasi penelitian di TPI yang besklala besar (ikan basah) pada alat tangkap purse seine yang meminjamkan modal berjumlah 5 orang, dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. jumlah pedagang berdasarkan karakter usaha dan distribusi

No	Nama	Alamat	Omset/ bulan	Pasar
1	Wiji	Tasikmadu	± 30 Ton	Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, Gresik, Tuban, Semarang, Jakarta, Pekalongan, Pemalang, Malang, Madura, Bali.
2	Abi Suprpto	Tasikmadu	± 25 Ton	Muncar, Pasuruan, Probolinggo, Pandaan, Surabaya, Gresik, Tuban, Mbulu, Lamongan, Jepara, Mliring, Tegal, Cirebon, Lombok.
3	Ten/Gunawan	Tasikmadu	± 25 Ton	Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Surabaya, Gresik, Tuban, Pekalongan, Pemalang, Bali.
4	Ambar Muallib	Tasikmadu	± 20 Ton	Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo, Gresik, Tuban, Tuban, Lamongan, Bogor, Semarang, Surabaya, Madura, Jepara.
5	Dadang	Tasikmadu	± 20 Ton	Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Surabaya, Madura, Malang, Gresik, Tuban, Semarang, Pekalongan, Pemalang, Jakarta.

Dari data diatas lokasi daerah pemasaran para pedagang dapat disajikan pada lampiran 4.

4.2.5 Pengolahan Dan Pemasaran Ikan

Produksi hasil tangkap di wilayah PPN Prigi dipasarkan dalam kondisi segar dan dalam bentuk hasil olahan seperti pemindangan, pengasapan, pengeringan / penggaraman dan tepung ikan. Jumlah ikan yang dipasarkan sebagian besar adalah ikan olahan yaitu 17.590 ton atau 78,77% yang terdiri dari ikan pindang 57,53%, ikan kering/asin 11,31%, tepung ikan 9,06% dan ikan asap 0,87%. Tepung ikan diproduksi oleh PT. Bumi Mina Jaya yang memproduksi mulai bulan Oktober 2005 dengan bahan baku sebagian besar jenis ikan lemuru. Pemasaran produksi dalam bentuk ikan segar sebesar 4.742 ton atau 21,23%. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Jenis Dan Jumlah Pengolahan Ikan Di PPN Prigi tahun 2007

Bulan	Pengasinan	Pindang	Pengasapan	Tepung Ikan	Pendinginan	Jumlah (ton)
Januari	232	1.299	37	0	911	2.479
Pebruari	142	909	6	0	231	1.288
Maret	93	0	25	0	149	267
April	100	904	24	0	181	1.209
Mei	289	256	9	0	251	805
Juni	180	1.406	25	0	385	1.996
Juli	205	1.696	9	300	268	2.478
Agustus	277	572	23	0	551	1.423
September	350	1.131	12	811	670	2.974
Oktober	465	2.978	6	663	498	4.610
Nopember	105	1.458	12	250	364	2.189
Desember	87	238	6	0	283	614
Jumlah (ton)	2.525	12.847	194	2.024	4.742	22.332

(Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007: 35)

Pada tahun 2007 sebagian besar dipasarkan di kota-kota di Jawa Timur seperti Trenggalek, Tulungagung, Surabaya, Malang, Jombang, Kediri, madiun. Selain itu proses distribusi pemasaran luar kota meliputi Semarang, Pekalongan, Pemalang, Jakarta, Mliring, Tegal, Cirebon, Lombok. Untuk selanjutnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 8. daerah pemasaran Produksi Perikanan Tahun 2007

No.	Tujuan	Ikan Segar (ton)	Ikan Olahan (ton)	Jumlah (ton)
1.	Trenggalek	395	157	552
2.	Tulungagung	292	3.302	3.594
3.	Surabaya	4.039	7.956	11.955
4.	Jombang	0	1.323	1.323
5.	Malang	9	2.384	2.393
6.	Nganjuk	7	1.732	1.739
7.	Madiun	0	621	621
8.	Kediri	0	151	115
	Jumlah	4.742	17.590	22.332

(Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007: 35)

Disamping itu untuk kebutuhan es di lingkungan PPN Prigi untuk keperluan kapal-kapal perikanan dan kebutuhan pasca tangkap dipasok dari industri penghasil es yang ada di sekitar pelabuhan. Pada tahun 2007 jumlah es yang digunakan dalam usaha perikanan tangkap di PPN Prigi sebanyak 5.809

ton. Dibanding tahun 2006 (5.734 ton) jumlah meningkat 75 ton atau 1,31%. Produksi ikan tahun 2007 mengalami penurunan dibanding tahun 2006, namun penggunaan es meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran nelayan terhadap pentingnya mutu ikan semakin meningkat. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan, es balik masih harus didatangkan dari Tulungagung, Durenan dan daerah lain.

4.2.6 Musim Penangkapan Ikan

Musim penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2008 terjadi antara bulan April sampai November. dengan puncak musim pada bulan November. Pada bulan-bulan tersebut terjadi kenaikan produksi bila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, hal ini dipengaruhi oleh musim, angin dan arus laut.

4.3 Lembaga Formal Perikanan

4.3.1 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003.

Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 804 Tahun 2003, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 804 Tahun 2003, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan, usaha kelautan dan perikanan serta budidaya dan perbenihan perikanan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kelautan dan perikanan.
3. Penjabaran dan pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan wewenang daerah di bidang kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan.
5. Penyelenggaraan dan pengelola administrasi dan urusan rumah tangga Dinas.
6. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

(DKP, 2006: 8)

4.3.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang prasarana Pelabuhan Perikanan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2004, ruang lingkup penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan adalah sebagai prasarana perikanan meliputi perencanaan dan penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengusaha, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagai suatu lingkungan kerja menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan.
2. Pelayanan teknis kapal perikanan.
3. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
4. Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayah untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
6. Pelaksanaan pengawasan penangkapan, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
7. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan.
8. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya.
9. Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari.
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Gambar 6. Kantor PPN Prigi



Gambar 7. Kantor Umum PPN di Prigi

Fasilitas pelabuhan yang telah dibangun di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Berikut tabel rincian fasilitas pelabuhan:

Tabel 9. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

No.	Nama Fasilitas	Jumlah / Volume
I	Fasilitas Pokok	
	1. Lahan : a. Tanah	11,5 Ha
	b. Kolam	15 Ha
	2. Kolam Pelabuhan : a. Sebelah Barat	7 Ha
	b. Sebelah Timur	8 Ha
	3. Break Water	710 m
	4. Dermaga	652 m
	5. Jalan Komplek	1.123,5 m
	5. Revetment	830 m
II	Fasilitas Fungsional	
	1. Kantor	655 m ²
	2. Gedung TPI : 1. Sebelah Barat	940 m ²
	2. Sebelah Timur	400 m ²
	3. Pabrik Es	20 ton/hari
	4. SPDN / BBM	50 ton
	5. Tower Air	30 ton
	6. Bak Air	40 ton
	7. Bengkel	120 m ²
	8. Jaringan Listrik PLN	250 KVA
	9. MCK	90 m ²
	10.Pos Keamanan : a. Pos Satpam	26 m ²
	b. Pos Terpadu	120 m ²
	11.Telepon	7 unit
	12.Lampu Suar	4 unit
III	Fasilitas Penunjang	
	1. Rumah Dinas	4 unit

2. Guest House	1 unit
3. BPN	300 m ²
4. Kios BAP	54 m ²
5. Gudang	200 m ²
6. Kios Tertutup	16 unit x 24 m ²
7. Kios Terbuka	14 unit x 22,5 m ²
8. Gudang Pengemasan	180 m ²
9. Kendaraan Dinas	6 Bh. Roda 2, 2 Bh. Roda 4

(PPN, 2007)

4.3.3 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun pertama kali di Jawa Timur pada tahun 1971 di Puger (Jember) dan Panarukan (Situbondo). TPI dibangun pada Pusat-Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan pada sentra-sentra budidaya (Susilo, 1986). Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Prigi kecamatan Watulimo Kabupaten Watulimo Trenggalek pada tahun 2003 sampai dengan Juni 2003 dilakukan oleh koperasi Sinati dan Koperasi Bakul Ikan. Pada tahun 2004 Tempat Pelelangan Ikan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sistem swakelola. Berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004 tanggal 21 April 2004 maka Tempat Pelelangan Ikan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek sampai sekarang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang sudah terbentuk adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Berdasarkan keputusan Bupati Trenggalek Nomor 196 Tahun 2004 Tanggal 21 April 2004, tugas TPI adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pelayanan pelelangan ikan. Untuk melaksanakan tugas, TPI mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pelelangan ikan;
2. Penyelenggaraan tata usaha tempat pelelangan ikan;

3. Pelaksanaan koordinasi atas pelaksanaan pelayanan pelelangan ikan;
4. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan termasuk pedagang ikan;
5. Pelaksanaan pencatatan data produksi perikanan dan sumber daya laut lainnya;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pelelangan ikan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

(DKP, 2006: 20)

Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI adalah Bupati dan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Struktur organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi sebagai berikut :

1. Kepala TPI, dengan fungsi sebagai manager dan administrator.
2. Kepala Bidang Tata Usaha, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Lelang, Kepala Bidang Jasa Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Kepegawaian.
3. Kepala Sub Bidang terdiri dari 4 Juru yaitu Buku, Lelang, Timbang, Locket.
4. Jumlah petugas TPI yaitu 20 personil terdiri dari :
 - a. 7 (Tujuh) personil PNS.
 - b. 13 (Tiga belas) personil karyawan tetap.

Manfaat dan tingkat operasional dari TPI Prigi yaitu :

1. TPI I (TPI Barat), dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya lebih dari 15 GT.
2. TPI II (TPI Timur), dimanfaatkan untuk pendaratan kapal yang kapasitasnya kurang dari 15 GT.



Gambar 8. Tempat Pelelangan Ikan PPN Prigi Bagian Barat >15 GT



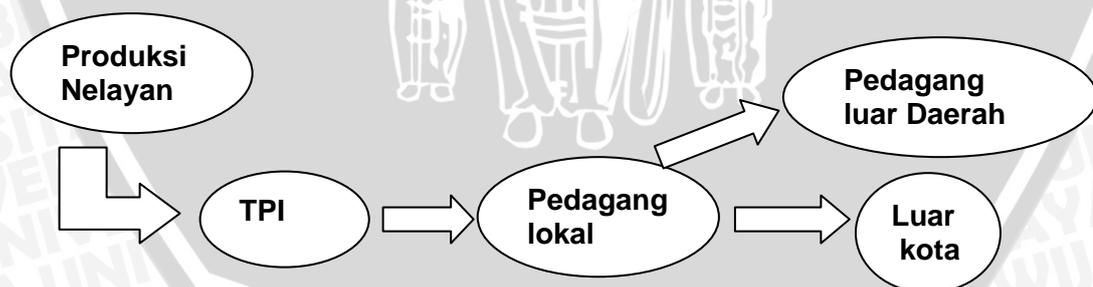
Gambar 9. Tempat Pelelangan Ikan PPN Prigi Bagian Timur < 15 GT

Adapun maksud, tujuan dan manfaat adanya TPI yaitu :

- Mendapatkan kepastian pasar dan mengusahakan stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
- Memberdayakan nelayan
- Pengumpulan data statistik perikanan
- Meningkatkan PAD
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan nelayan

Sistem pemasaran perikanan yang dilakukan di TPI Prigi pada dasarnya adalah sistem pelelangan. Sistem pelelangan ini memberikan peluang kepada nelayan untuk mengambil peran lebih dalam proses penentuan harga. Sedangkan bagi penjual, proses pelelangan ini memberikan kepastian tentang kualitas produk ikan yang dilelang.

Secara sederhana alur dan komponen-komponen yang terlibat dalam sistem pelelangan hasil perikanan tengkap nelayan purse seine di TPI Prigi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 10. Alur Pelelangan di TPI Prigi

Alur Proses pelelangan hasil perikanan tangkap nelayan di TPI Prigi secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu kegiatan pra lelang, proses pelelangan, dan pasca lelang.

A. Pra Pelelangan (Pendaratan Ikan)

Proses Kegiatan ini diawali dari proses bongkar muat di pelabuhan hingga ikan sampai ke tempat pelelangan. Ikan diangkut ke TPI dengan cara dipikul 2 orang tukang pikul (*manol*) menggunakan wadah keranjang yang dibuat dari bambu. Upah untuk kedua pemikul ini adalah Rp 5.000,-/keranjang. Ikan di keranjang sebelum dimasukan di tempat pelelangan, ikan ditimbang terlebih dahulu. Setelah penimbangan ikan ini dicatat oleh petugas TPI (juru timbang) dalam karcis timbang dengan disaksikan oleh nelayan yang bersangkutan dan pengurus perahu/ pemilik perahu atau para bakul (pedagang).

Setelah ikan ditimbang, selanjutnya ikan dimasukan ke tempat pelelangan ikan dan diberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk meneliti atau mengamati ikan yang akan dilelang, agar calon pembeli dapat menentukan harga yang dianggapnya sesuai dengan kualitas ikan. Calon pembeli sebelum ikut lelang harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada juru lelang sebagai peserta lelang.

Hal yang cukup disayangkan dari tahap pendaratan ikan/pra lelang ini adalah banyaknya pihak-pihak diluar ABK yang tidak berkepentingan yang seenaknya saja mengambil ikan yang ada di kapal atau bahkan ketika keranjang dipikul menuju tempat penimbangan (*ngetrol*). Faktor keamanan hasil tangkapan yang kurang terjamin ini cukup meresahkan dan merugikan pihak nelayan. Dari hasil wawancara dengan beberapa nelayan, ternyata hal inilah yang menyebabkan nelayan enggan untuk membayar retribusi pelelangan secara penuh sesuai dengan peraturan yang ada. Sebenarnya tentang keamanan hasil tangkapan nelayan yang mendarat ini pernah di antisipasi dengan ditugaskan pihak keamanan di lingkungan TPI Prigi, tetapi hal ini tidak efektif, karena kurangnya dukungan dari sebagian nelayan juga selain itu juga yang mengambil

masih saudara sendiri sehingga pihak TPI pun merasa kwalahan dengan keadaan tersebut.



Gambar 11. Proses Pendaratan Ikan



Gambar 12. Pengangkutan Hasil Tangkap Oleh Manol



Gambar 13. Proses Penimbangan Ikan

B. Proses Pelelangan Ikan

Gambaran umum tentang proses pelelangan ikan ialah penjualan hasil tangkap berupa ikan yang dilakukan dimuka umum (para pedagang) melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin turun atau naik atau dengan cara penawaran harga secara tertulis yang disertai dengan pengumpulan para peminat (pembeli). Dengan kata lain lelang adalah suatu bentuk penjualan barang (ikan) didepan umum (para pembeli) dengan penawaran tertinggi.

Kegiatan pelelangan di TPI Prigi dimulai dengan terlebih dahulu ikan diletakan di lantai TPI setelah ditimbang sebelumnya oleh juru timbang. Dengan menggunakan mikropon bermerk Toa, juru lelang memulai proses pelelangan ikan. Dan ikan akan diberikan kepada calon pembeli yang menawar dengan harga paling tinggi. Proses tawar menawar ini biasanya hanya dilakukan secara informal saja, antara pihak pembeli dengan nelayan/pengurus. Juru lelang seakan-akan melelangkan hasil tangkapan, tetapi mereka hanya seperti petugas penimbang, penyiaran dan penarik retribusi.

Secara sederhana, keadaan di lapang dapat dinarasikan sebagai berikut :

Juru Lelang : **“hallo...hallo...hallo!
Ulam rengis kagungane Sinar Mas setunggal kilonipun dipun awes gangsal ewu rupiah, piantun bakul menawi engkang bade ngersakne monggo....!”**
(hallo.....hallo....hallo!!!!!!!)
Ikan rengis/tongkol kepunyaan Sinar Mas ditawarkan lima ribu rupiah per kilogram, para bakul yang mau ingin membeli silahkan.....!” halo....halo...halo...!!!!!!!)

Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, juru lelang menyiarkan hasil kesepakatan tadi dan dicatat oleh pihak petugas loket loket dan diberikan faktur/karcis masing-masing untuk nelayan dan pembeli. Ikan yang sudah dibeli segera dibawa keluar dari TPI dengan faktur pembelian/karcis ikan keluar dari TPI. Akan tetapi bagi para nelayan yang terkait dengan peminjaman modal kepada bakul/pedagang maka setelah proses penimbangan dilakukan oleh petugas juru lelang, ikan hasil tangkapan nelayan tersebut langsung diambil bakul yang telah meminjamkan modal kepada nelayan tersebut dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.



Gambar 14. Proses Pelelangan

C. Pasca Pelelangan Ikan

Secara umum digambarkan kegiatan pasca pelelangan meliputi pengangkutan ketempat-tempat pembeli/bakul/pedagang, pembayaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan jaga pembayaran retribusi kepada penjual (nelayan 3%) dan pembeli (pedagang 2%). Proses hasil pembayaran dari hasil transaksi yang dilakukan di TPI tidak selalu dibayar dengan kontan kepada nelayan produsen sebagian besar para pedagang dalam pembayaran dari pembelian ikan dilakukan dengan uang muka, dan sisanya dibayarkan beberapa hari kemudian setelah transaksi dilakukan.

Setelah harga disepakati antara kedua belah pihak antara nelayan dan pedagang, maka ikan sudah menjadi milik pedagang. Selanjutnya ikan dibawa keluar oleh pembeli dengan menggunakan tukang pikul/manol untuk dipindahkan ke mobil pick up/mobil pengangkut ikan yang selanjutnya diangkut menuju tempat usaha masing-masing pedagang untuk diolah yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Hasil olahan tersebut bisa berupa ikan dipindang, diberi es yang selanjutnya akan dijual dalam bentuk ikan segar, di jemur yang digunakan untuk bahan baku ikan asin atau sentrat pakan ternak, atau bahkan ada yang dijadikan tepung ikan.



Gambar 15. Pengangkutan Ikan Ke Pick up

4.4 Aspek Hukum

Menurut Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2002, retribusi TPI digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, yaitu orang atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi dipungut sebagai kompensasi atas pelayanan penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan ikan. Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat dan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilaksanakan di TPI.

Subyek retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas TPI sebagai sarana penyelenggaraan pelelangan ikan. Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan adalah sebesar 5% dari harga transaksi penjualan ikan yang terdiri dari 3% dipungut dari nelayan dan 2% dipungut dari pedagang.

Adapun perkembangan retribusi dari TPI Prigi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 10. Perkembangan Retribusi TPI Prigi Selama 5 Tahun

TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
2003	170.000.000	158.101.775	93,00
2004	185.000.000	187.810.015	101,52
2005	195.000.000	119.843.891	61,48
2006	225.000.000	311.705.757	138,54
2007	400.000.000	260.000.000	65,00

(DKP, 2007)

Target retribusi pelelangan ikan pada tahun 2007 sebesar Rp 400.000.000,- dengan realisasi perolehan retribusi pelelangan ikan sebesar Rp 260.000.000,- (65 %) dan telah disetor ke kas daerah. Pencapaian target penerimaan dari retribusi pelelangan ikan tahun 2007 tidak dapat tercapai dikarenakan hasil tangkapan ikan dari masing-masing armada penangkapan produksinya rata-rata relative lebih sedikit dibandingkan produksi tahun 2006.

Selain itu, juga disebabkan karena kurang adanya kesadaran masyarakat nelayan untuk membayar retribusi pelelangan ikan.

4.5 Kekuasaan Pedagang Dalam Menentukan Harga Ikan Di TPI Prigi

4.5.1 Hubungan Pedagang Dengan Nelayan

Mengingat jumlah sumberdaya laut, khususnya ikan disuatu perairan yang jumlahnya dari tahun ke tahun makin menurun akibat penangkapan lebih (*over fishing*) dan perolehan hasil tangkap yang tidak menentu (ketidakpastian) akibat irama musim serta bahaya resiko yang dihadapi, membuat para nelayan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya akibat penangkapan yang berlebihan. Para nelayan pemilik di pesisir pantai kebanyakan usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap purse seine, pancing tonda (rumpon), pancing ulur atau lainnya membutuhkan modal yang jumlahnya tidak sedikit. Mahalnya biaya operasi penangkapan dan pembuatan jaring tonda (rumpon) sekitar 25 juta. Selain itu gaya hidup sebagian para nelayan yang cenderung konsumtif, hal ini terlihat pada waktu pendapatan nelayan lebih mereka cenderung menghabiskannya dan kurang pertimbangannya terhadap hari esok waktu pada musim paceklik. Karena anggapan para nelayan selama masih ada laut dan pedagang (tengkulak) yang menyediakan pinjaman, mereka tidak ada keawatiran. Hal ini terlihat pada nelayan di pesisir pantai Prigi.

Untuk mendapatkan modal sebesar itu biasanya nelayan melakukan pinjaman kepada pemilik modal yaitu bakul (pedagang yang berskala besar). Kebanyakan para nelayan (juragan darat) dalam melakukan peminjaman lebih memilih non formal (bakul) dari pada lembaga formal (bank) karena prosedurnya mudah dan tidak berbelit-belit, tidak membutuhkan surat jaminan (surat berharga), bisa sewaktu-waktu, atas dasar saling kepercayaan. Bila dibandingkan dengan dengan lembaga formal, karena prosedurnya berbelit-

belit dan belum tentu mendapat pinjaman yang diinginkan. Bahkan walaupun nelayan melakukan pinjaman uang kepada pedagang bukan untuk modal melaut, tetapi untuk biaya kebutuhan sehari-hari tetap mereka usahakan untuk diberi pinjaman. Pedagang dalam hal ini secara tidak langsung mencoba menanamkan rasa ketergantungan (*patronase*) nelayan kepada mereka. Hubungan ini dinamakan pola hubungan patron-klien.

Pola hubungan patron-klien banyak terjadi diberbagai daerah, termasuk di daerah pesisir Prigi. Patron adalah seseorang yang menggabungkan status, kekuatan, pengaruh, simbol kekuatan bagi orang lain dalam mempertahankan dirinya atau menolong orang lain untuk melindungi dirinya. klien adalah orang yang bersedia membantu patron dan memiliki ciri status yang lebih rendah. Hubungan patron-klien tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi diciptakan dengan membuat suatu kontrak kerja secara tidak tertulis. Biasanya hubungan ini bersifat kepercayaan sehingga tidak ada hitam diatas putih dan memiliki kekuatan hukum yang lemah apabila terjadi pelanggaran kontrak. Namun, hal ini jarang sekali terjadi atau bahkan tidak ada sama sekali karena hubungan kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan dan mementingkan kebutuhan bersama. Nelayan pemilik membutuhkan bakul dalam penyediaan modal yang cukup besar, Sebaliknya bakul membutuhkan hasil tangkapan dari nelayan pemilik untuk keberlangsungan usahanya. Hubungan ini bersifat struktural fungsional dimana kedua belah pihak saling ketergantungan dan membutuhkan.

Susilo (1986), mengatakan mengatakan bahwa ada 4 fase dalam kerja sama antara pedagang (tengkulak) dan nelayan yang meminjam modal. Dimana fase pertama diawali dengan kondisi nelayan yang penuh dengan kondisi ketidakpastian membuat mereka memilih pedagang (tengkulak) sebagai sarana untuk peminjaman modal. Selanjutnya fase kedua, nelayan mulai bergantung

pada tengkulak (pedagang) tapi belum sepenuhnya karena nelayan nelayan masih diizinkan oleh pedagang untuk bekerjasama dengan pedagang lain serta diperbolehkan berpartisipasi dalam penentuan harga. Kemudian fase ketiga, disini tingkat ketergantungan nelayan pada pedagang (bakul) bertambah, menyebabkan pedagang mulai melakukan perjanjian-perjanjian tidak adil. Difase terakhir nelayan harus tunduk pada kekuasaan pedagang (bakul ikan).

Sedangkan menurut Scott (1983) dalam Satria (2002) arus dari klien ke patron sulit dikategorikan karena klien adalah "*milik*" patron yang menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron, seperti pekerjaan dasar, jasa tambahan bagi rumah tangga patron, jasa domestik pribadi. Selain itu klien merupakan anggota setia dari fraksi lokal patron tersebut. Meskipun penggambaran Scott merupakan hasil kajian berdasarkan konteks sosial masyarakat agraris, gambarannya tentang hubungan patron-klien masih dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat pesisir. Berdasarkan hubungan tadi, jelaslah bahwa hubungan antara nelayan dengan patron yang menguasai sumberdaya tidak sama. Artinya, patron menguasai sumberdaya modal jauh lebih besar dari pada nelayan.

Melihat kenyataan yang ada tersebut (budaya Patronisme), pedagang memiliki peluang untuk menyelewengkan kekuasaannya. Pedagang seakan berkuasa atas nelayan dan sangat berpeluang untuk menekan dan mengeksploitasi nelayan yang mengalami ketergantungan kepada mereka. Jalan satu-satunya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menguasai pemasaran hasil tangkapan nelayan. Bagi nelayan, harga ikan hasil tangkapan mereka tidaklah terlalu rendah ketika total tangkapan seluruh nelayan sedikit, akan tetapi ketika total tangkapan nelayan banyak, mereka sangat menyesalkan harga yang mereka terima sangat rendah.

Dari hasil wawancara yang didapat, bagi beberapa nelayan yang biaya operasionalnya ditanggung oleh pedagang, sehingga mau tidak mau semua hasil tangkapan mereka harus dijual kepada pedagang yang memberikan pinjaman untuk biaya operasional penangkapan serta potongan harga yang diberikan kepada nelayan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bagi pedagang, hal itu memang umum dan sesuai hukum penawaran maupun hukum permintaan. Menurut pedagang, dalam melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan mereka tidak berusaha untuk mempermainkan harga yang ada, tetapi keadaan global yang mempengaruhi harga sejalan dengan perkembangan teknologi. Bagi mereka, ketika mereka mempermainkan harga yang diterima nelayan, maka nelayan akan memberontak dan protes (*gremeng-gremeng*). Pedagang dalam melihat nelayan bukan sebagai mangsa yang akan dimangsa, tetapi lebih sebagai partner kerja. Dengan adanya aktifitas penangkapan ikan tersebut, maka mereka bisa melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk pemasaran ikan. Faktor inilah yang mendorong pedagang untuk menjaga hubungan baik dengan nelayan dengan menanamkan hubungan patron-klien.

Berikut ini pernyataan pedagang (bapak Abi) Pada alat Tangkap purse seine yang meminjamkan modal kepada nelayan:

"...alhamdulillah mas, hubungan saya dengan nelayan masih baik sampai sekarang tentang penyediaan modal, tetapi ada potongan sedikit dari hasil penjualan...!!!"

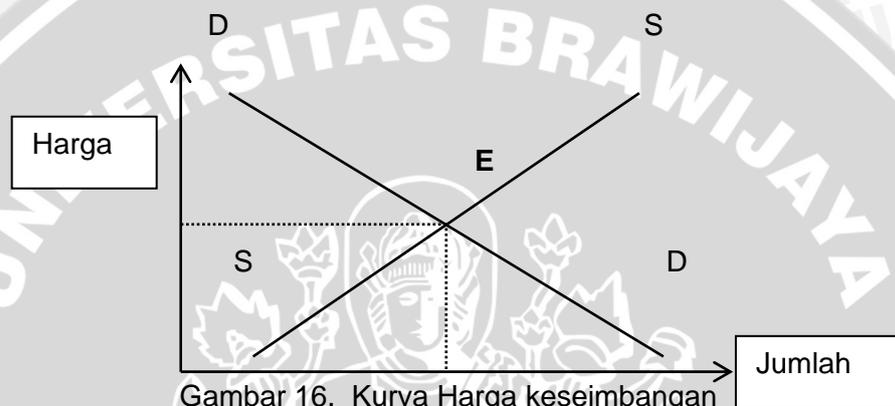
"....kami menjadi patner kerja, karena saling membutuhkan antara kedua belah pihak, dimana nelayan membutuhkan pinjaman untuk melaut, sedangkan saya menginginkan hasil tangkapannya untuk melangsungkan usaha ,,,,"

"....bagi yang sudah tidak mempunyai tanggungan, mereka bebas menjualnya kepada siapapun, tetapi mereka masih baik sama saya. Setiap ada hasil tangkap mereka menjualnya kesaya, mungkin mereka ingat jasa-jasa saya...."

"....kalau harga ikan di TPI per kg Rp 5000,00 ya saya kasih harga ke mereka Rp 5000,00"

Harga merupakan faktor dan alat yang paling penting bagi kelancaran lalu lintas barang niaga. Harga dapat merupakan alat pengawasan utama terhadap produksi dan pemasaran. Inti dari analisa permintaan dan penawaran adalah tercapainya harga keseimbangan antara harga yang diminta oleh konsumen dengan yang ditawarkan oleh produsen. Hanafiah dan Saefudin (2006: 161)

Faktor Secara sederhana dapat digambarkan proses terjadinya harga keseimbangan sebagai akibat perpotongan kurva permintaan dan penawaran:



Gambar 16. Kurva Harga keseimbangan

Dalam gambar diatas bahwa harga barang terjadi pada titik **E** akibat perpotongan kurva permintaan (D) dan Penawaran (S). Apabila harga diatas harga keseimbangan (**E**), maka jumlah harga yang ditawarkan lebih besar daripada barang yang diminta, barang-barang tidak laku atau menumpuk sehingga terpaksa diturunkan oleh penjual. Sebaliknya kalau suatu harga berada dibawah harga keseimbangan, maka jumlah barang yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan, sehingga pembeli saling berebut, persediaan barang menipis dan harga akan naik lagi.

Penawaran dari dan permintaan akan suatu produk menentukan beberapa harga dari produk itu berada diatas atau dibawah tingkat harga umum. Jika penawaran dari permintaan akan suatu produk sama dengan penawaran dari dan permintaan akan keseluruhan produk maka harga-harga dari setiap produk individuil akan mendekti tingkat yang sama dari semua harga, akan tetapi

jika penawaran dari suatu produk tertentu relatif lebih besar dari pada permintaan, maka harga barang tersebut secara relatif akan berada dibawah tingkat harga umum, dan sebaliknya apabila penawaran dari suatu barang relatif lebih kecil daripada permintaan, maka harga barang tersebut secara relatif akan berada diatas tingkat harga umum (Hanafiah dan Saefudin, 2006: 90)

4.5.2 Hubungan Pedagang Lokal Dengan Pedagang Luar Daerah

Dari hasil pengamatan langsung/Observasi yang cukup menarik dari proses pelelangan adalah di TPI tersebut pedagang dari luar daerah seakan-akan ditolak untuk ikut dalam melakukan pelelangan. Apabila pedagang luar daerah ingin membeli ikan di Prigi, ada ketentuan yang harus dipatuhi bahwa mereka harus melalui perantara pedagang lokal. Dalam istilah nya meng-klaim yaitu pengakuan terhadap sesuatu yang seakan-akan itu adalah menjadi hak (nya) atas daerah tempat tinggal yang ditempatinya. Hal ini juga terjadi bila mereka (pedagang Prigi) apabila melakukan transaksi diluar Prigi. Sehingga harga yang terbentuk kurang optimal, karena pendorinasian kekuasaan pedagang lebih besar dari pada nelayan. Hal ini mirip dengan kondisi pasar Oligopsoni (banyak penjual dan sedikit atau beberapa pembeli) dimana terdapat kong-kalikong antara beberapa pedagang yang menguasai daerah pemasaran di TPI Prigi.

4.5.3 Menciptakan Pasar Oligopsoni

Sebagian besar para nelayan waktu sehari-hari (mencapai 2/3 hari) habis untuk menangkap ikan dilaut. Nelayan selain tidak mempunyai cukup waktu untuk menjual hasil tangkapan juga merasa sangat lelah. Bagi para nelayan yang tidak terlibat dalam utang, seluruh hasil tangkapan pada waktu pelelangan harus segera dipasarkan karena mengingat hasil produk yang rentan terhadap waktu (cepat busuk) dan mahalnya biaya transportasi serta mengolah hasil tangkapan.

Alasan-alasan ini dipergunakan oleh pedagang dengan sebaik-baiknya untuk menekan harga penjualan hasil perikanan, sehingga nelayan tidak mendapatkan keuntungan yang wajar bahkan menderita rugi. Hal ini mengakibatkan lemahnya posisi tawar (*bargainig power*) nelayan pada waktu pelelangan. Dengan kondisi demikian yang terjadi pada waktu pelelangan jarang sekali para nelayan menang dengan pedagang pada waktu proses pelelangan.

Praktek pasar pelelangan di TPI Prigi menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan sistem pelelangan yang sebenarnya. Harga ikan di pasar pelelangan banyak dipengaruhi oleh pedagang berskala besar sebagai pembeli. Pedagang ini jumlahnya tidak banyak, namun diantara mereka tidak mampu mempengaruhi pasar, malah mereka bekerjasama secara kompak dalam hal menentukan harga di pasar pelalangan itu sehingga seakan-akan pasar pelelangan di TPI Prigi terbentuk pasar oliogopsoni (banyak penjual dan beberapa pembeli), yang berarti harga ikan di TPI Prigi ditentukan pembeli (pedagang).

Sebenarnya pedagang di TPI Prigi bukanlah penentu harga (*price maker*) seperti yang diduga oleh mayoritas masyarakat. Mereka juga merupakan pihak yang menjalankan (*price taker*) atau seperti nelayan kebanyakan, walaupun tingkatannya berbeda. Akan tetapi para pedagang juga menanggung resiko apabila harga ikan dipasaran lain anjlok. Pedagang yang ada di TPI Prigi dalam menentukan harga dasar penawaran biasanya didasarkan kepada harga ikan hari kemarin di pasaran luar. Hasil dari keadaan yang demikian ini sangat melemahkan pihak produsen (nelayan) dikarenakan mereka benar-benar merupakan pihak yang tidak berdaya dalam menghadapi polemik tersebut.

Semua pedagang menginginkan laba yang jumlahnya besar dan tidak ingin mengalami kerugian. Begitu juga nelayan, ingin mendapatkan pendapatan yang banyak dan layak dari hasil tangkapannya. Cara yang digunakan oleh pedagang untuk mencapai tujuannya tersebut adalah dengan cara menekan biaya pengeluaran (harga beli) serendah-rendahnya dan menjual produknya dengan harga tinggi. Sementara bagi nelayan, jalan untuk meningkatkan pendapatannya adalah dengan jalan memperbanyak ikan hasil tangkapannya, padahal belum tentu hasil tangkapan yang didapat selalu selalu banyak.

Berikut pernyataan para pedagang (bu Wiji) pada alat tangkap purse seine mengenai pembentukan harga:

“....mas, sebenarnya saya tidak mau merugikan para nelayan, tapi saya juga tidak mau rugi, karena penentuan harga di TPI Prigi tersebut berdasarkan harga jual ikan kemarin di pasaran luar....!!!”

4.6 Persepsi Nelayan Dengan Adanya Pedagang (tengkulak)

Persepsi hubungan antara nelayan dengan pedagang adalah beragam dari satu orang dengan orang lain. Persepsi hubungan ini dinyatakan dengan hal-hal yang menyangkut masalah penyediaan modal, pemasaran hasil tangkap dan kesejahteraan yang diperoleh dari nelayan ataupun pedagang. Pada umumnya nelayan mengakui dan percaya bahwa keberadaan pedagang sangat mempengaruhi proses penangkapan ikan yang mereka peroleh serta menjadi partner kerja yang baik, baik berupa permodalan untuk melaut, pemenuhan pinjaman pada waktu musim paceklik guna kebutuhan sehari-hari serta pemasaran hasil tangkapan mereka. Keberadaan pedagang bagi nelayan pada saat tertentu cukup menguntungkan walaupun terkadang hasil yang didapat kurang memuaskan terhadap hasil yang didapat pada waktu perolehan penjualan hasil tangkap. Para nelayan pada umumnya tidak peduli dengan keadaan tersebut asalkan dapat uang untuk kebutuhan berlayar esok harinya.

Berikut ini salah satu pernyataan dari nelayan pancing ulur (bapakk Toha)

yang meminjam modal kepada pedagang :

“...saya beruntung dapat bekerja sama dengan Bpk Abs, selain enak dalam peminjaman modal, beliau tidak menuntut saya untuk segera melunasinya...”

“...alhamdulillah mas, sedikit-demisedikit kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi...”

“...ya alhamdulillah sudah punya modal...”

“....sebenarnya setiap ada hasil tangkapan kalau ingin saya jual ke pedagang lain juga tidak masalah, tapi saya segan. Soalnya dulunya sering ditolong waktu musim paceklik. Toh ya harganya juga sama dengan pedagang lainnya....”

“....saya malah senang, soalnya hasil tangkapan saya langsung ada yang membeli, jadi saya tidak perlu repot-repot mencari pedagang lagi...”

Pernyataan nelayan purse seine pada alat bantu tonda (rumpon) bapak

Imam yang meminjam modal ke pedagang (bu Wiji):

“...alhamdulillah mas, saya dapat pinjaman dari Bu Wj waktu pembuatan rumpon, selain prosesnya mudah uang dapat langsung segera cair....”

“...akan tetapi setiap ada hasil tangkap, harus diserahkan kepadanya karena saya mempunyai tanggungan utang....”

‘.....walaupun ada potongan sedikit, tapi gak apalah yang penting bisa digunakan untuk melaut besoknya dan kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi....”

Pernyataan nelayan umum (bapak Mat dan bapak Suriyono) pada alat

tangkap purse seine pada waktu menjual hasil tangkapan kepada pedagang

(bakul):

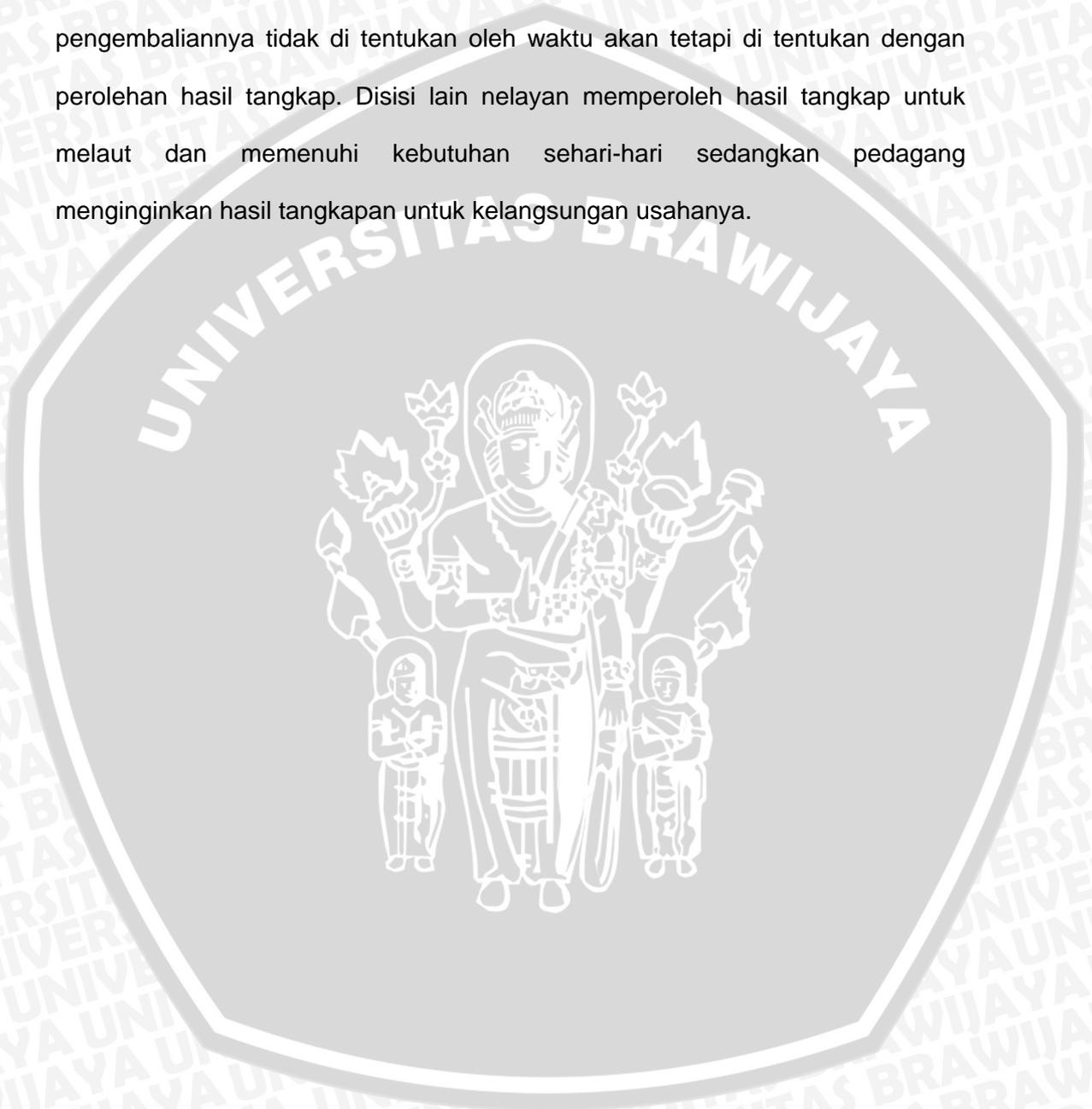
“...oalah mas!!! timbangane iwak bosok, luweh becik ndang tak dol nang bakul sak payu-payune...”

“...masio regane ora patek untung akeh, sa itik-sa itik iso tak gawe modal kanggo sesok maneh wektu golek iwak...!!!!”

“...ya bagaimana lagi mas!!!dari pada ikan busuk, lebih baik saya jual selaku-lakunya...”

“,,,walaupun harganya tidak banyak untungnya, sedikit-sedikit bisa dibuat modal buat berlayar pada besok waktu mencari ikan...!!!!!!”

Oleh karena itu, nelayan sangat menjaga hubungan baik (sosial-ekonomi) dan sebagai patner kerja dengan pedagang dikarenakan apabila ada kebutuhan yang mendadak selain pemasaran hasil tangkap yang meliputi penyediaan modal atau kebutuhan sehari-hari dapat segera tercukupi yang jangka waktu pengembaliannya tidak di tentukan oleh waktu akan tetapi di tentukan dengan perolehan hasil tangkap. Disisi lain nelayan memperoleh hasil tangkap untuk melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan pedagang menginginkan hasil tangkapan untuk kelangsungan usahanya.



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian tentang Kekuasaan Pedagang Dalam Sistem Pemasaran Di TPI Prigi, Kecamatan watulimo, Trenggalek dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemasaran hasil perikanan tangkap sebelum dijual ke daerah pemasaran lain oleh para nelayan di lakukan Di TPI Prigi. Untuk kapal yang kapasitasnya lebih dari 15 GT sistem pelelangannya dilakukan di TPI sebelah barat, sedangkan kapal yang kapasitasnya kurang dari 15 GT dilakukan di TPI sebelah timur. Alur sistem pemasaran kegiatan pra lelang (pendaratan ikan), proses lelang, Pasca lelang.
2. Penguasaan daerah pemasaran di TPI Prigi sampai saat ini masih di pegang oleh pedagang lokal. Penyebab kekuasaan tersebut adalah a). sifat produk yang rentan terhadap waktu (cepat busuk) sehingga hasil tangkapan harus segera dipasarkan mengingat pendapatan nelayan yang bersifat harian (*one day fishing*) serta mahalnnya biaya yang di kekuarkan untuk mengolah hasil tangkapan dan pemasaran ke daerah lain, b) perangkat utang. mahalnnya biaya yang dikeluarkan pada saat melaut serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari dianggap sebagai pemicu. Sehingga mau tidak mau nelayan harus menjalin hubungan dengan pedagang (tengkulak/bakul ikan). c) gaya hidup yang sebagian para nelayan yang berlebihan yang cenderung konsumtif ketika pendapatannya naik tanpa memikirkan hari esok di saat musim paceklik. Pola hubungan ini dinamakan patron-klien, dimana pedagang seakan akan menyelewengkan kekuasaanya kepada nelayan dengan mengeksploitasi nelayan yang mengalami ketergantungan terhadap pedagang, Dari ke

tiga faktor tersebut, maka jarang sekali para nelayan yang menang pada waktu tawar (*bargaining power*) dengan pedagang pada waktu pelelangan ikan di TPI Prigi.

3. Mengenai penguasaan daerah pemasaran yang didominasi oleh pedagang lokal, seakan-akan pedagang dari daerah lain ditolak pada waktu pelelangan. Apabila pedagang dari luar yang ingin membeli ikan terlebih dahulu harus melewati pedagang lokal sehingga harga yang terbentuk kurang optimal.
4. Persepsi nelayan tentang keberadaan tengkulak atau pedagang tersebut adalah hubungan patner kerja yang baik, walaupun terlihat secara kasat mata semacam hubungan patron-klien. Hal ini menyangkut masalah penyediaan modal, pemasaran hasil tangkap maupun pengadaan pinjaman modal pada waktu musim paceklik guna kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu satu-sama lain kedua belah pihak tersebut menjaga hubungan baik guna keterkaitan dengan usaha masing-masing.

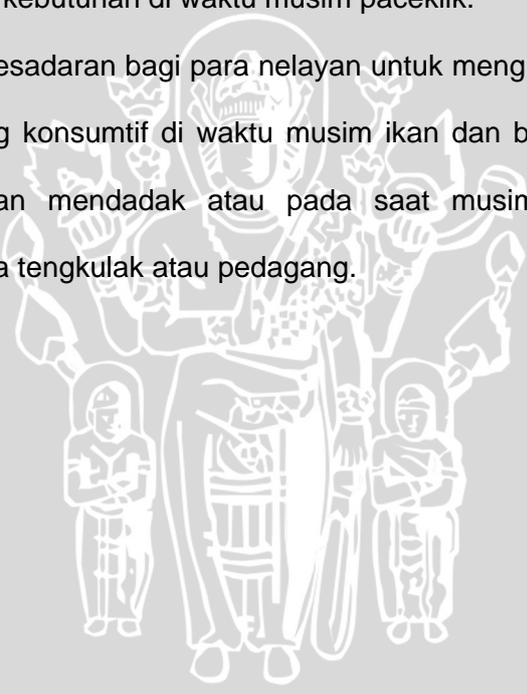
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang di sampaikan, antara lain :

1. Bagi pengelola TPI Prigi, perlu adanya profesionalisme yang tinggi mengenai peningkatan pengelolaan TPI mengenai faktor tingkat keamanan sehingga fungsi adanya TPI bisa berjalan semaksimal mungkin dan tidak merugikan pihak lain (nelayan dan pedagang) pada waktu proses pelelangan.
2. Perlu dikembangkannya lembaga keuangan yang menyediakan kredit lunak dan mudah serta dapat segera cair guna mengurangi ketergantungan kepada pedagang atau tengkulak (patron-klien) dalam

kehidupan sehari-hari ataupun dalam pengembangan usaha lain yang dilakukan oleh mereka (nelayan).

3. Perlu adanya peningkatan SDM melalui penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosisl lainnya secara bekesinambungan / terus-menerus bagi masyarakat pesisir agar mereka lebih mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara maksimal tanpa merusak ekosistem yang ada.
4. Perlu adanya pembentukan antar kelompok nelayan untuk membentuk suatu badan usaha, guna untuk memenuhi kebutuhan pada waktu melaut dan mencukupi kebutuhan di waktu musim paceklik.
5. Perlu adanya kesadaran bagi para nelayan untuk mengurangi gaya hidup yang cenderung konsumtif di waktu musim ikan dan budaya menabung untuk kebutuhan mendadak atau pada saat musim paceklik tanpa tergantung pada tengkulak atau pedagang.



DAFTAR PUSTAKA

Acheson, James, M. 1981. "Antrhrpologi of Fishing" dalam Annual Riview of Anthropologi" dalam judul "Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial", penulis Kusnadi (penyunting) Humaniora Utama Pres (HUP). Bandung.hal:112-113.

Budiardjo, M . 1984. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Sinar Harapan. Jakarta.

DKP, 2006. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek. Hal 20.

_____, 2007. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek. Hal 56-60.

DKP Jatim, 2005. Kiprah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. <http://www.dkp.go.id> diakses tanggal 21 Februari 2008 jam 21.30 WIB

Hanafiah, A.M dan A.M Saefudin. 2006. *Tataniaga Hasil Perikanan.* Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Hariadi, Bima W. 2007. Usaha Penangkapan Ikan Dengan Meanggunakan Alat Tangkap Purse Seine Pada "KM. ILHAM" Di Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. PKL. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang.

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007

Karim, M. 2005 Benang Kusut Kemiskinan Nelayan.www Republika on line.com diakses tanggal 21 Februari 2008 jam 21.00

Kusnadi, 2000. Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial. Humoraria Utama Pres (HUP). Bandung.

_____, **2001.** "PENGAMBA" Kaum Perempuan Fenomenal. Humoraria Utama Pres (HUP). Bandung.hal: 209-213.

_____, **2004.** Polemik Kemiskinan Nelayan. Pustaka Jogja Mandiri. Bantul. Hal 16-17.

Legg, Keith R. 1983. Tuan, Hamba, dan Politisi. Sinar Harapan. Jakarta.

- Prianata, Yoga E.** 2007. Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Penangkapan Dengan Alat Tangkap *Purse Seine* Yang Menggunakan Alat Bantu Rumpon Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Raharjo, P.** 2002. Nelayan Nusantara Sebuah Falsafah Kehidupan. Makalah Falsafah Sains Program Pasca Sarjana / S3. Institut Pertanian. Bogor. www.w3.org diakses tanggal 21 Februari 2008 jam 22.00
- Rohani, A.** 2009. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pelelangan Hasil Perikanan Tangkap Nelayan *Purse Seine* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Satria, Arif.** 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta Selatan.
- Scoot, James C.** 1986. *Weapons of the Weak: Everday Form of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, dalam judul "Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial, penulis Kusnadi (penyunting), 2000. Humaniora Utama Pres (HUP). Bandung hal: 18.
- Sorokin, Pitirim.** 1962. "*Social Strification*" dalam Talcot Parson, Edward Shills, Kaspar P. Naegele, Jasse R Pits (ed, *The Theory of society: Foundation Of modern Sociologi Theory*. The Free Press Of Glence dalam judul Sosiologi Masyarakat Pesisir, penulis Arif Satria (penyunting), 2002. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta Selatan. Hal: 41-42.
- Susilo, Edi.** 1986. Nelayan, di Antara tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan Suatu Analisa teoritik. Makalah pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial di Ujung Pandang, 15-19 Desember 1986. hal 21.
- Sutawi, Hermawan. D.** 2004. Mengurangi Benang Kusut Nelayan Jawa Timur dalam Kusnadi. "Polemik Kemiskinan Nelayan". Pondok Edukasi & Pokja Pembaruan. Bantul: 28-35
- Suyanto, B.** 2004. "Meningkatkan Produktivitas Atau diversifikasi Usaha?" dalam Kusnadi. "Polemik Kemiskinan Nelayan". Pondok Edukasi & Pokja Pembaruan. Bantul:13-20
- Suyanto, B. & Sutinah (ed.).** 2005. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana. Jakarta : 17-18.
- Virgavani, R.** 2008. Hubungan Sosial Ekonomi Antara Nelayan Dan Tengkulak (Studi kasus Dugaan Eksploitatif Tengkulak Terhadap Nelayan dan Penyebab Kemiskinan Nelayan Di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Surabaya) Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Yin, Robert. K.** 2006. Studi Kasus Desain & Metode. Rajawali Pers. Jakarta.

A. Wawancara pada staf pegawai TPI Prigi

Nama : Bu Tatik

Pekerjaan : Staf pegawai TPI Prigi

Alamat : Desa Margomulyo

Tanggal : 7-11 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Bahwa sistem pemasaran perikanan yang dijalankan adalah sistem lelang. Bahwa sistem pelelangan ini memberikan peluang kepada nelayan untuk mengambil peran dalam penentuan harga dengan memberikan kepastian tentang produk ikan yang dilelang, akan tetapi pada kenyataannya malah justru kebalikannya, justru pedaganglah yang menentukan harga dengan penawaran tertinggi. Dalam hal ini nelayan menjadi pihak yang dirugikan karena harga yang diterima tidak sesuai dengan angan-angan para nelayan pada umumnya yang mencari ikan. Pihak TPI pun mengakui tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan itu.yaitu menampung semua hasil tangkapan para nelayan yang bersifat harian.</p> <p>Pihak TPI hanya menyediakan sarana dan prasarana dan menarik biaya retribusi guna terlaksanya transaksi penjualan di TPI. Biaya retribusi dikenakan untuk nelayan 3% dan pedagang 2% dari pendapatan yang diperoleh. Alasan utama mengapa para bakul atau pedagang ikut andil dalam menentukan harga yaitu karena para pedagang lokal-lah satu-satunya yang membeli hasil tangkapan dari para nelayan, dan mengapa harga ikan sering anjlok pada waktu musim ikan ? karena para pedagang mempunyai alasan yaitu “pasar” dimana para pedagang melihat situasi pasar didaerah lain untuk menjual hasil ikan olahannya. Alasan mengapa pihak TPI tidak bisa menetapkan harga maksimal yaitu pendapatan nelayan bersifat harian, sehingga cold storage tidak mampu menampung hasil tangkapan, dan hanya para pedagang lokal satu-stunya yang membeli hasil tangkapan nelayan tersebut.</p>

B. Wawancara pada para pedagang ikan di TPI Prigi

Nama : Bu Wiji (38) dan bapak Sunoto (40)

Pekerjaan : pedagang ikan dan nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpun (pancing tonda) dan buka konter pulsa

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 24 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Beliau menjelaskan bahwa usaha pedagang atau bakul ikan ini karena letak kondisi yang dekat dengan pesisir dan permintaan akan ikan segar dan pindang yang meningkat. Awal usaha ini perolehan modal didapat modal sendiri, yaitu menjadi pedagang pedagang kecil (pemapak) lalu bisa mengolah ikan sendiri yaitu menjadi pemindang dan setelah itu menjadi pedagang ikan basah (ikan di es) sampai sekarang. Dalam pembentukan harga dilakukan dengan system lelang (tawar-menawar) antara nelayan produsen dan para pedagang atau bakul ikan (konsumen).</p> <p>Transaksi ini dilakukan di TPI Prigi dengan sistem lelang dan pada akhirnya harga terbentuk dengan penawaran tertinggi oleh pihak konsumen atau pedagang. Sebagai acuan dalam penentuan harga, para pedagang, para pedagang menggunakan patokan harga kemarin dipasaran luar daerah. Pada waktu puncak musim ikan maka harga ikan menjadi turun atau anjlok, karena penawaran banyak sedangkan barang yang diminta sedikit dan sebaliknya. Proses tersebut berlangsung setiap hari selama musim ikan. Alasan itulah yang menjadi dasar utama mengapa pada waktu musim puncak ikan harga menjadi anjlok atau turun sehingga harga dikuasai oleh pedagang besar pada khususnya.</p>

Nama : Bu Wiji (38) dan bapak Sunoto (40)
 Pekerjaan : pedagang ikan dan nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon (pancing tonda) dan buka konter pulsa
 Alamat : Desa Tasikmadu
 Tanggal : 25 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Ikan yang peroleh dari saya sendiri selaku nelayan pemilik (juragan kapal) karena saya mempunyai kapal dan alat tangkap sendiri dan para nelayan yang menjual langsung ke saya atau nelayan yang meminjam modal ke saya. Untuk nelayan yang meminjam modal biasanya terdiri dari nelayan purse seine, payang, tonda maupun pancing ulur. Pada musim ikan ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada waktu musim paceklik. Mengenai prosedur peminjamannya sangat mudah, dimana setiap ada nelayan yang meminjam modal, maka secepat mungkin dilayani dengan tidak menggunakan syarat jaminan (seperti BPKB atau surat-surat berharga lainnya). Akan tetapi, setiap ada hasil ada hasil panen berupa hasil tangkapan harus diserahkan ke saya (pedagang yang meminjami modal).</p> <p>Mengenai cara pengembaliannya yaitu terserah, tidak ada jangka waktu tertentu yang menentukan, tetapi tetap ada hitungannya / pencatatan pembukuan. Mengenai potongan ada sedikit, misalnya harga kesepakatan lelang per Kg Rp 5000 maka nelayan yang meminjam modal dipotong Rp 500 rupiah /kg nya sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>Hubungan kami (pedagang) dengan nelayan yang meminjam modal yaitu sangat baik atau patner kerja yang baik, dimana tidak ada keterpaksaan antara kedua belah pihak. Dimana kedua belah pihak saling membutuhkan. Mengenai adanya pedagang dari daerah lain yaitu pedagang dari daerah lain tidak boleh ikut pada waktu pelelangan untuk menentukan harga ikan di TPI Prigi. Jadi pedagang dari daerah lain harus menunggu dulu kalau ingin membeli ikan. Dengan kata lain harus melewati pedagang lokal dulu. Karena itu sudah menjadi kesepakatan para bakul lokal di kecamatan Watulimo dan begitupun sebaliknya.</p> <p>Pernyataan bu Wiji tentan pembentukan harga: “....mas, sebenarnya saya tidak mau merugikan para nelayan, tapi saya juga tidak mau rugi, karena penentuan harga di TPI Prigi tersebut berdasarkan harga jual ikan kemarin di pasaran luar....!!!”</p>

Nama : Bapak Abi Suprpto (45)
Pekerjaan : Pedagang ikan dan nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon (pancing tonda) dan pegawai TPI Prigi
Alamat : Desa Tasikmadu
Tanggal : 26 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Bahwa latar belakang usaha ini bakul ini adalah berdomisili di sekitar pantai pesisir yang dekat dengan laut serta tingginya permintaan akan ikan dipasaran. Pada awalnya modal didapat dari sendiri dan pinjaman di bank. Dalam transaksi jual beli ikan dilakukan di TPI Prigi, dimana transaksi dilakukan pada saat musim panen ikan. Pada penentuan pembentukan harga berdasarkan sistem lelang atau proses tawar-menawar antara nelayan sebagai produsen dan para pedagang sebagai konsumen (pembeli) dan pada akhirnya para pedaganglah yang menetapkan harga dengan penawaran tertinggi. Saya mendapatkan ikan dari saya sendiri selaku nelayan pemilik alat tangkap, nelayan umum yang menjual ke saya maupun nelayan yang meminjam modal.</p> <p>Pada waktu musim ikan harga menjadi turun, dikarenakan saking banyaknya jumlah produksi yang ada serta permintaan yang sedikit dipasaran dan begitupun sebaliknya. Ada nelayan yang meminjam modal ke saya. Mengenai proses peminjamannya sangatlah mudah dan secepat mungkin dipenuhi. Tinggal maunya nelayan yang ingin meminjam: berapa dan kapan biasanya nelayan yang meminjam modal. Hal ini terjadi pada nelayan yang umumnya keterbatasan dalam penyediaan modal.</p>



Nama : Bapak Abi Suprpto (45)
 Pekerjaan : Pedagang ikan dan nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon (pancing tonda) dan pegawai TPI Prigi
 Alamat : Desa Tasikmadu
 Tanggal : 27 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Pada umumnya nelayan yang meminjam modal adalah nelayan purse seine, pancing ulur, payang, maupun tonda (rumpon). Mengenai pengembaliannya tidak ditentukan oleh waktu, dicicil bisa ataupun langsung dilunasi juga bisa. Dengan syarat apabila setiap mendapatkan hasil tangkapan harus diserahkan ke saya atau di jual ke saya (yang meminjami modal). Menganai potongan ya ada tapi sedikit, namanya juga bisnis kata beliau. Misaalnya harga di TPI per kg Rp 5000,00 maka ada potongan Rp 500,00 dari saya karena ada karena ada nelayan yang meminjam modal tersebut. Bagi nelayan yang tidak meminjam modal, pada waktu menjual hasil tangkapan ikan ke saya dalam jumlah yang besar, maka pembayaran yang saya lakukan separo dulu kemudian sisanya saya lunasi ketika ikan olahan yang saya pasarkan kedaerah lain sudah laku.</p> <p>Hubungan saya dengan nelayan yang meminjam modal ataupun tidak yaitu sangat baik (patner kerja), dimana tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak yang berangkutan (pedagang dan nelayan produsen). Mengenai adanya pedagang dari daerah lain yang ingin membeli hasil tangkapan harus melalui pedagang lokal dulu atau pedagang asli daerah. Jadi pedagang dari daerah lain tersebut tidak boleh ikut pada waktu proses pelelngan di TPI Prigi dan begitupun sebaliknya.</p> <p>Pernyataan bapak Abi Suprpto:</p> <p>”...alhamdulillah mas, hubungan saya dengan nelayan masih baik sampai sekarang tentang penyedian modal, tetapi ada potongan sedikit dari hasil penjualan...!!!”</p> <p>”....kami menjadi patner kerja, karena saling membutuhkan antara kedua belah pihak, dimana nelayan membutuhkan pinjaman untuk melaut, sedangkan saya menginginkan hasil tangkapannya untuk melangsungkan usaha ,,,,”</p> <p>”....bagi yang sudah tidak mempunyai tanggungan, mereka bebas menjualnya kepada siapapun, tetapi mereka masih baik sama saya. Setiap ada hasil tangkap mereka menjualnya kesaya, mungkin mereka ingat jasa-jasa saya....”</p> <p>”....kalau harga ikan di TPI per kg Rp 5000,00 ya saya kasih harga ke mereka Rp 5000,00</p>

C. Wawancara pada para nelayan yang menghutang di TPI Prigi

Nama : Bapak Imam (25)

Pekerjaan : nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon (pancing tonda)

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 28 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh orang tua saya, karena orang tua sudah tua maka saya mengambil alih usaha penangkapan ini. Hasil tangkap yang kurang menentu dan mahalnya biaya produksi pada waktu melaut membuat saya harus meminjam modal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya mendapatkan modal dari pedagang atau bakul ikan. Alasan saya meminjam pada pedagang karena proses peminjamannya dapat segera saya terima atau langsung cair dengan mudah tanpa adanya syarat-syarat yang memberatkan. Berbeda seperti lembaga seperti bank yang proses peminjamannya berbelit-belit dan membutuhkan jaminan pada waktu proses peminjaman selain itu uang tidak bisa langsung segera cair. Sementara kapal harus segera beroperasi guna memperoleh hasil tangkapan.</p> <p>Modal tersebut saya butuhkan untuk biaya beroperasi sehari-hari dan pembuatan pancing tonda. Memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembuatan pancing tonda sekitar ± 25 juta, maka mau tidak mau saya harus meminjam modal pada pedagang, hasil tangkapan dari pancing tonda tersebut berfungsi ketika musim paceklik tiba. Untuk melunasi hutang, setiap hasil tangkapan tersebut saya jual ke pedagang yang meminjami modal ke saya, walaupun terkadang harga yang saya terima tidak sesuai dengan harga kesepakatan lelang, dalam artian ada potongan sedikit dari hasil penjualan. Saya pasrah dengan keadaan tersebut, asalkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dalam melaut. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak (nelayan dan pedagang yang meminjamkan modal).</p>

Nama : Bapak Toha (60)

Pekerjaan : nelayan pancing ulur, nelayan ABK dan petani

Alamat : Desa Prigi

Tanggal : 29 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Beliau mengungkapkan bahwa para nelayan pada umumnya pasrah dengan keadaan tersebut, mengingat hasil tangkapan dari tahun-ketahun semakin menurun dan kondisi perairan yang dipengaruhi oleh musim sehingga pendapatan menjadi kurang menentu, mengandalkan hasil tangkapan dan tanipun terkadang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta mahalnya biaya operasional pada waktu melaut (sarana produksi dan teknologi). Sarana perlengkapan produksi nelayan pancing berupa sterofoam dan es balok, dapat pula berupa biaya operasional, pembelian mesin kapal maupun untuk perawatan kapal apabila terjadi kerusakan.</p> <p>Mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, maka mau tidak mau harus meminjam modal. Dan modal tersebut bisa saya dapatkan dari pedagang ikan. Katakanlah saya meminjam modal pada "bapak Abi Suprpto". Alasan mengapa saya meminjam modal pada pedagang karena selama ini belum ada lembaga seperti bank atau koperasi yang meminjamkan modal dengan mudah (harus ada jaminan berupa BPKB atau surat-surat berharga lainnya) selain itu uang tersebut belum tentu bisa langsung dapat segera cair. Berbeda dengan meminjam uang ke pedagang, selain prosesnya mudah dan uang segera dapat saya peroleh dengan mudah dan tidak berbelit-belit. Peminjaman modal tersebut terjadi pada waktu musim ikan maupun waktu musim paceklik (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari)</p>



Nama : Bapak Toha (60)
 Pekerjaan : nelayan pancing ulur, nelayan ABK dan petani
 Alamat : Desa Prigi
 Tanggal : 29 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Mengenai cara pengembaliannya yaitu dapat diangsur ataupun segera langsung dilunasi. Yang jelas pada waktu panen ikan, maka hasil tangkapan harus diserahkan pada pedagang yang meminjami modal tersebut. Proses transsaksi penjualan dilakukan pada saat musim ikan, setelah ikan diturunkan dari kapal lalu ditimbang setelah itu dilelang di TPI Prigi. Setelah proses pelelangan dilakukan maka hasil tangkapan tersebut segera diambil pedagang yang meminjamkan modal. Akan tetapi harga yang diterima kadang-kadang kurang dari kesepaakatan harga lelang karena terikat peminjaman modal (ada potongan sedikit dari harga lelang). Nelayan pun pasrah dengan keadaan tersebut walaupun harga yang diterima tidak sesuai dengan angan-angan. Karena dengan cara tersebut utang dapat segera dapat dilunasi. Para nelayan yang meminjam modal pada pedagang mengakui menyukai pola hubungan ini. Selain menjadi mitra kerja yang baik bisa juga mempererat hubungan persaudaraan. Mengingat pada waktu musim paceklik, semua kebutuhan dapat segera teratasi seperti biaya kesehatan, acara kondangan, maupun kebutuhan sehari-hari.</p> <p>Seiring berjalannya waktu, ketika, ketika utang dapat dilunasi, nelayan tersebut pada waktu musim panen ikan pun enggan menjual hasil tangkapannya kepada orang lain. Hal ini nelayan mengaku mempunyai “hutan budi” kepada pedagang yang dulu meminjami modal. Selain itu nelayan merasa beruntung karena hasil tangkapannya segera dibeli oleh pedagang yang pernah meminjamkan modal dulu. Mengingat hasil tangkapan cepat busuk, pendapatan nelayan bersifat harian, mahalnya biaya pada waktu proses penangkapan dan mengolah serta menjualnya ketempat pemasaran kedaerah lain maka satu-satunya jalan untuk menyiasatinya yaitu menjual secepat mungkin pada pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun terkadang hasil yang didapat kurang memuaskan.</p> <p>Berikut pernyataan bapak toha:</p> <p>“...saya beruntung dapat bekerja sama dengan Bpk Abs, selain enak dalam peminjaman modal, beliau tidak menuntut saya untuk segera melunasinya...”</p> <p>“...alhamdulillah mas, sedikit-demisedikit kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi....”</p> <p>“..ya alhamdulillah sudah punya modal...”</p> <p>“....sebenarnya setiap ada hasil tangkapan kalau ingin saya jual ke pedagang lain juga tidak masalah, tapi saya segan. Soalnya dulunya sering ditolong waktu musim paceklik. Toh ya harganya juga sama dengan pedagang lainnya....”</p> <p>“....saya malah senang, soalnya hasil tangkapan saya</p>

langsung ada yang membeli, jadi saya tidak perlu repot-repot mencari pedagang lagi...”

Nama : Bapak Imam (25)

Pekerjaan : nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon (pancing tonda)

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 29 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Bagi nelayan melihat keadaan tersebut tidak membuat nelayan jera ataupun memutuskan hubungan dengan, asalkan yang terpenting adalah bisa melaut dan mendapatkan hasil setiap hari sudah cukup. Andaikataupun semua hutang sudah terlunasi, nelayan tersebut enggan menjualnya kepada pedagang lain. Hal ini dikarenakan nelayan sudah percaya dan senang setiap hasil tangkapan dapat langsung dibeli oleh pedagang, mengingat hasil tangkapan yang rentan terhadap waktu (cepat busuk) dan mahal biaya untuk mengolah serta memasarkannya ke daerah lain. Selain itu mengingat bahwa dulunya pernah meminjam ke pedagang (bapak bu Wiji), istilahnya dulunya pernah dipinjami modal pada waktu musim paceklik. Hal tersebut yang menyebabkan nelayan kalah dalam posisi tawar pada waktu proses pelelangan ikan di TPI Prigi sehingga para pedagang bisa lebih leluasa dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi.</p> <p>Pernyataan bapak Imam:</p> <p>“...alhamdulillah mas, saya dapat pinjaman dari Bu Wj waktu pembuatan rumpon, selain prosesnya mudah uang dapat langsung segera cair....”</p> <p>“...akan tetapi setiap ada hasil tangkap, harus diserahkan kepadanya karena saya mempunyai tanggungan utang....”</p> <p>‘.....walaupun ada potongan sedikit, tapi gak apalah yang penting bisa digunakan untuk melaut besoknya dan kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi....”</p>

Nama : Bapak Mat (30)

Pekerjaan : nelayan pemilik alat tangkap purse seine (nelayan setempat)

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 30 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>beliau mengungkapkan bahwa kondisi hasil tangkap yang dipengaruhi musim, hasil tangkap yang dari tahun-ketahun semakin menurun dan kegiatan penangkapan yang penuh resiko dan ketidakpastian hasil yang didapat, pendapatan yang bersifat harian serta ketergantungan terhadap satu mata pencaharian yaitu melaut. Nelayan pun pada umumnya pasrah dengan keadaan tersebut. Pada waktu musim ikan kegiatan transaksi jual beli ikan dilakukan di TPI Prigi. Setelah ikan didaratkan lalu dibawa ke TPI untuk ditimbang setelah itu kegiatan proses tawar-menawar dengan cara lelang antara nelayan produsen dan para pedagang (konsumen).</p> <p>Dalam hal ini nelayan tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu keputusan dari para pedagang, nelayan hanya menanti penawaran tertinggi dari para pedagang. Harga yang diperoleh biasanya tidak sesuai dengan angan-angan nelayan pada umumnya. Terlebih pada waktu musim puncak, harga bisa semakin anjlok. Dengan alasan para bakul tidak mau menanggung resiko apabila hasil ikan olahan (segar atau pindang) apabila dijual di daerah lain juga anjlok karena banyaknya pasokan ikan dari daerah lain sedangkan permintaan ikan sedikit di pasar luar daerah.</p> <p>Dalam hal ini pihak TPI tidak bisa berbuat banyak, TPI hanya menyediakan sarana dan prasarana untuk lelang dan menarik biaya retribusi. Retribusi untuk nelayan 3% dan pedagang 2% serta menyiarkan harga lewat mikrofon. Mengingat hasil tangkapan bersifat harian maka TPI tidak bisa menampung seluruh hasil tangkapan. Dengan alasan itulah mengapa nelayan kalah dalam posisi tawar dan pada akhirnya para pedaganglah yang menguasai dalam hal penentuan harga. Para nelayan hanya pasrah dengan keadaan tersebut asalkan mendapat uang setiap hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan proses melaut.</p>

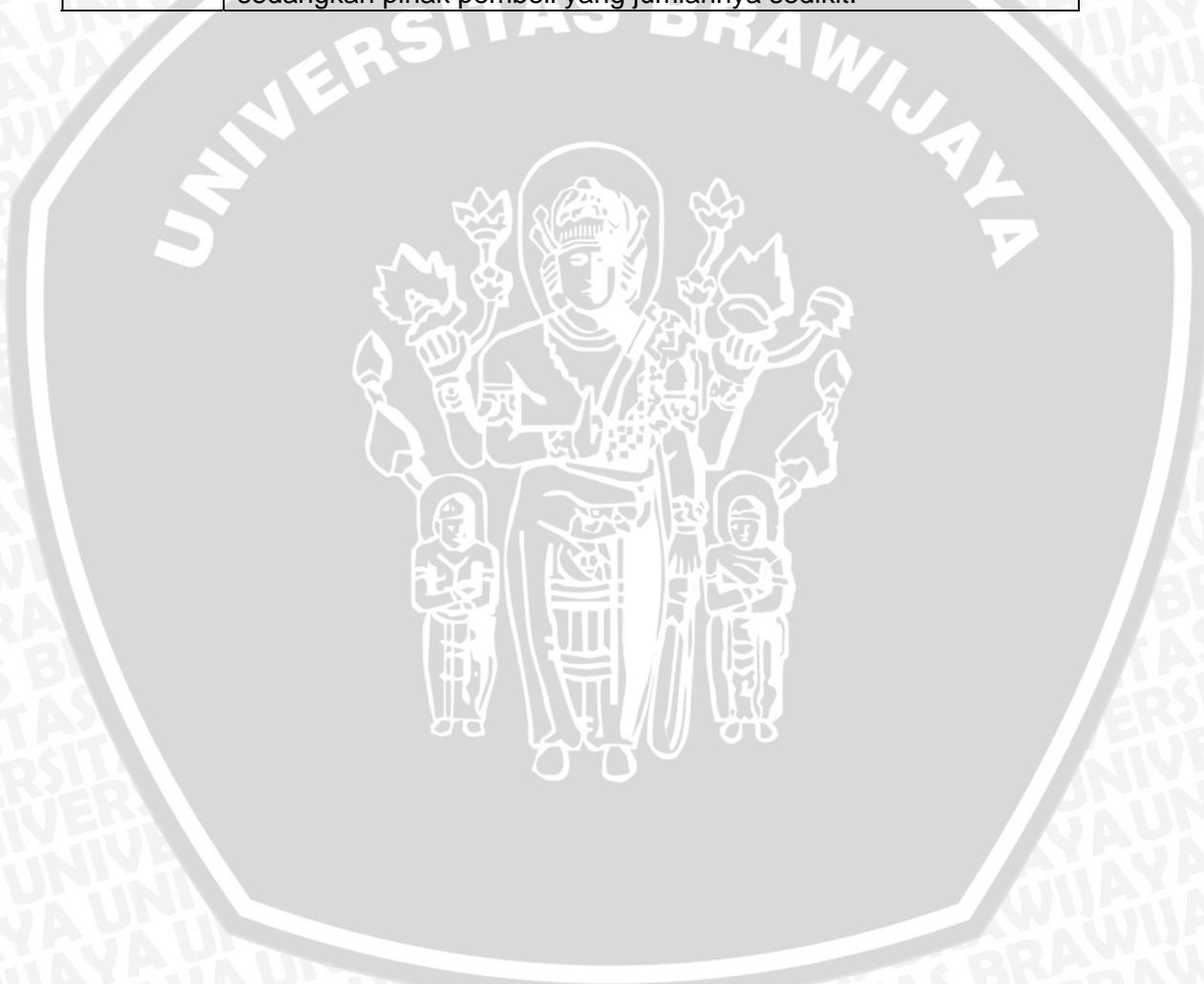
Nama : Bapak Supriyono (24)

Pekerjaan : nelayan ABK (nelayan setempat)

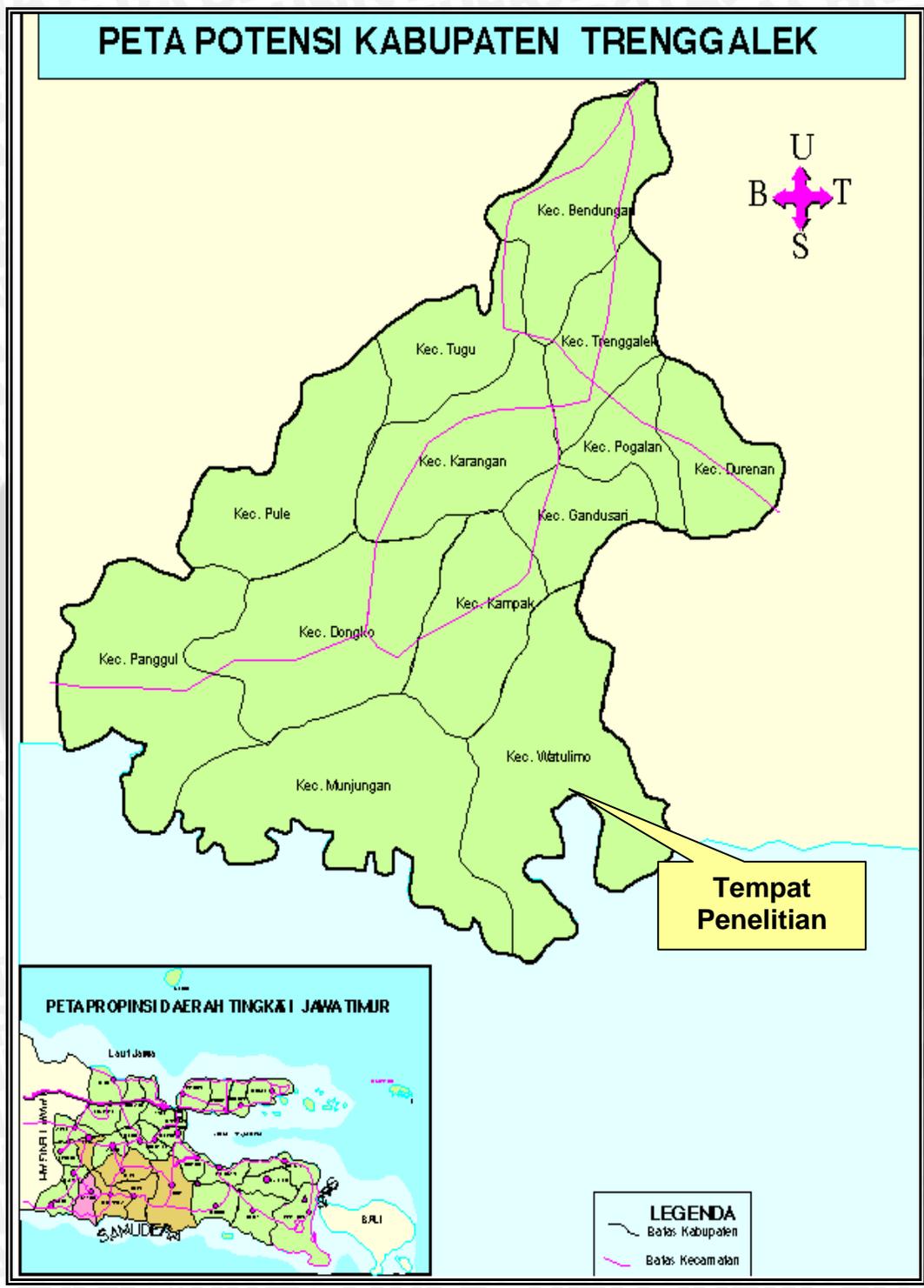
Alamat : Desa Prigi

Tanggal : 31 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Menurut beliau, para bakul atau pedagang tersebut kebanyakan enawar dengan harga murah. Hal ini tentu memberatkan bagi nelayan yang menangkap ikan. Mengingat halnya menangkap ikan yang penuh resiko dan ketidakpastian. Pada kenyataannya nelayan hanya pasrah dengan keadaan tersebut karena banyaknya nelayan yang mencari ikan sedangkan pihak pembeli yang jumlahnya sedikit.</p>

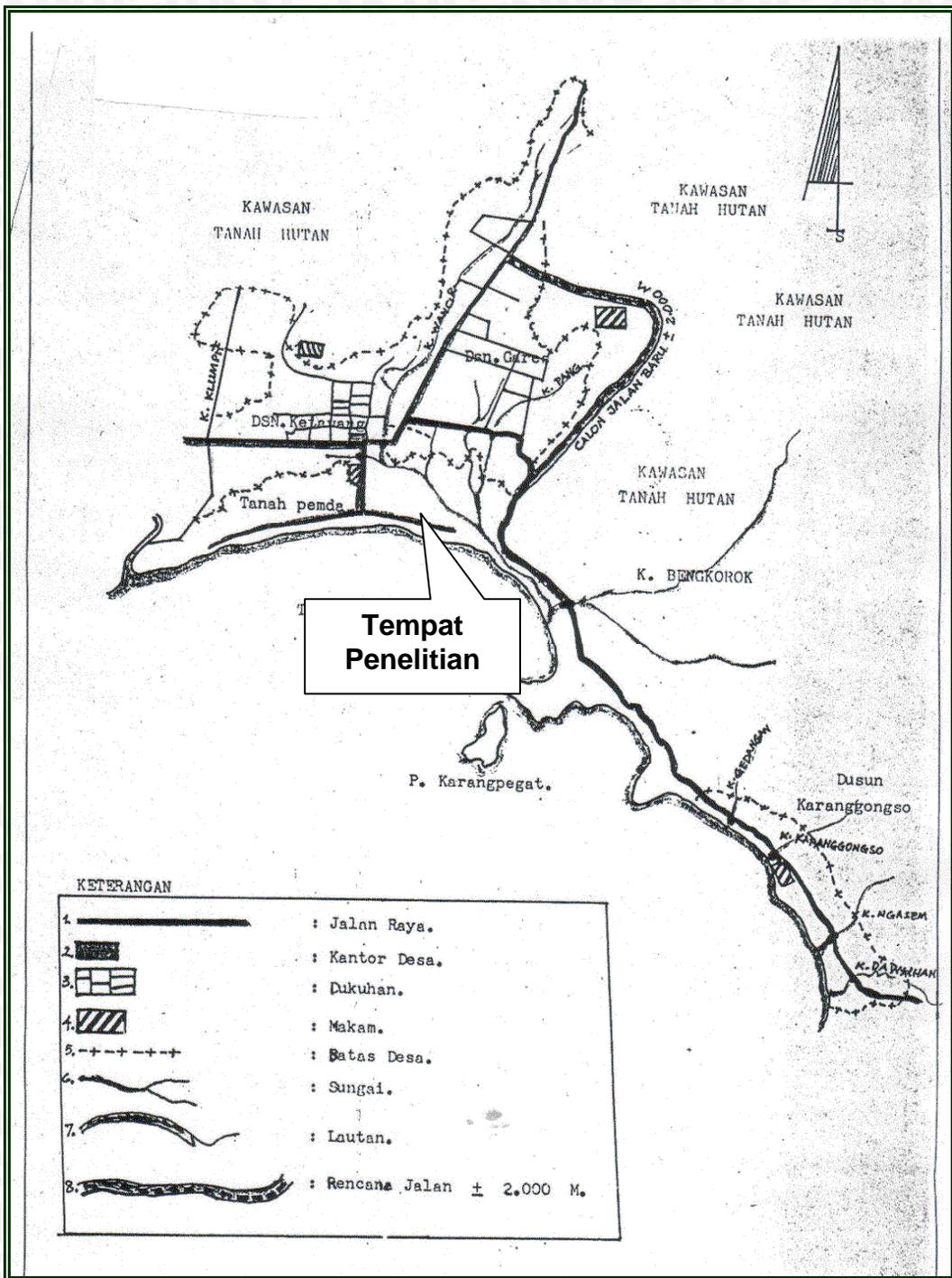


Lampiran 1. Peta Kabupaten Trenggalek



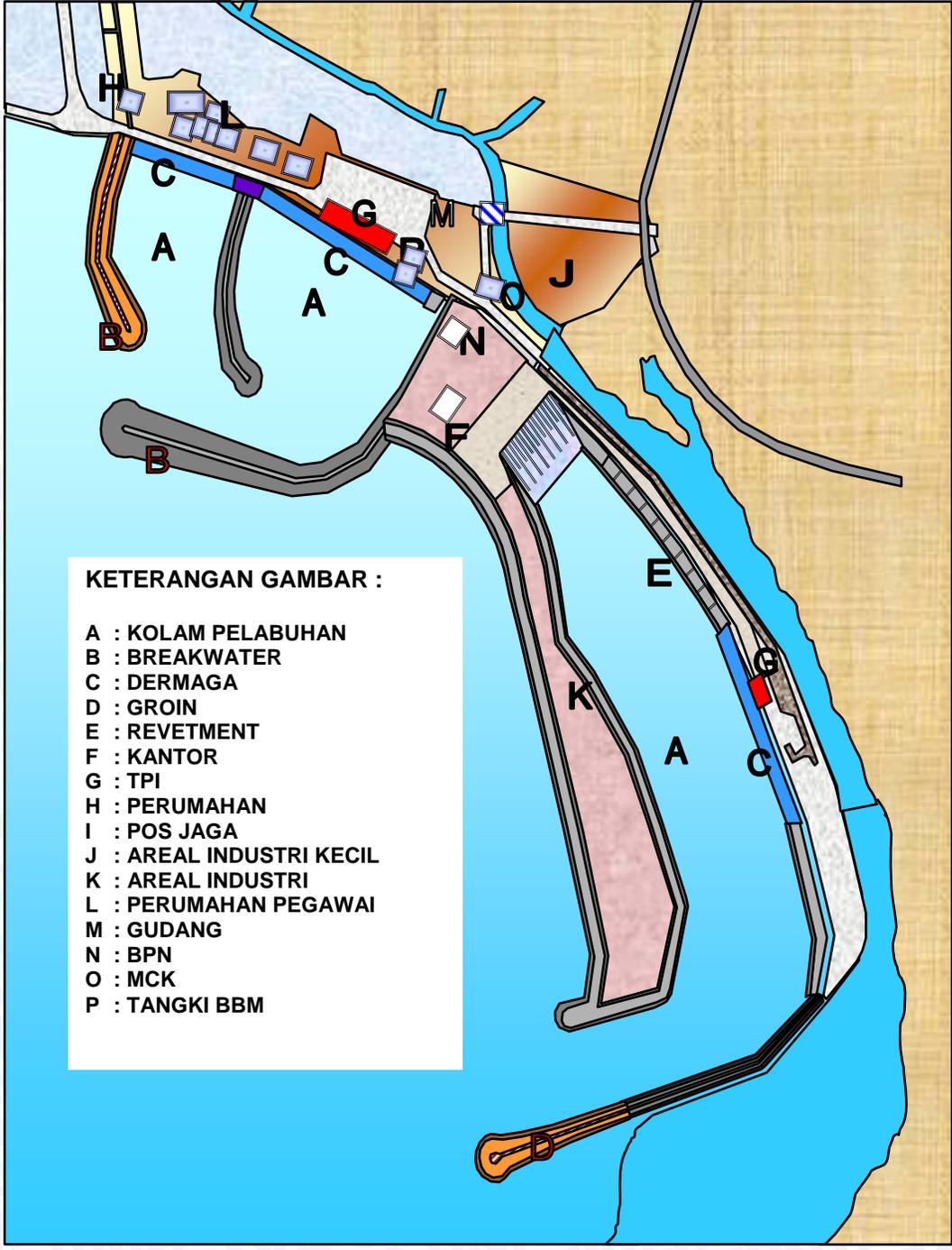
Skala 1 : 750.000

Lampiran 2. Denah lokasi penelitian di Perairan Prigi, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek



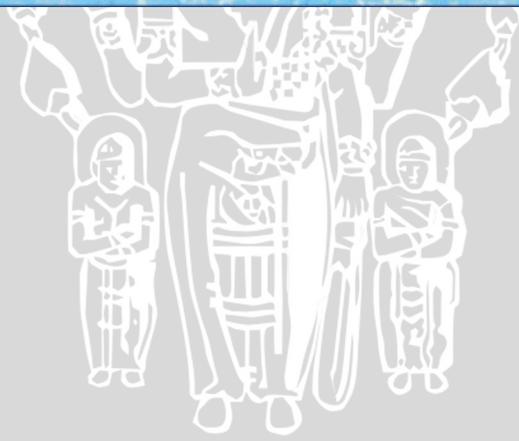
(Sumber : Kantor Desa Tasikmadu, 2007 dalam Hariadi, 2007)

Lampiran 3. Lay Out Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



(Sumber : Kantor PPN Prigi, 2007 dalam Hariadi, 2007)

Lampiran 4. Daerah Lokasi Pemasaran Pedagang Ikan



Lampiran 5. Hasil Wawancara Penelitian

A. Wawancara pada staf pegawai TPI Prigi

Nama : Bu Tatik

Pekerjaan : Staf pegawai TPI Prigi

Alamat : Desa Margomulyo

Tanggal : 7-11 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Bahwa sistem pemasaran perikanan yang dijalankan adalah sistem lelang. Bahwa sistem pelelangan ini memberikan peluang kepada nelayan untuk mengambil peran dalam penentuan harga dengan memberikan kepastian tentang produk ikan yang dilelang, akan tetapi pada kenyataannya malah justru kebalikannya, justru pedaganglah yang menentukan harga dengan penawaran tertinggi. Dalam hal ini nelayan menjadi pihak yang dirugikan karena harga yang diterima tidak sesuai dengan angan-angan para nelayan pada umumnya yang mencari ikan. Pihak TPI pun mengakui tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan itu. yaitu menampung semua hasil tangkapan para nelayan yang bersifat harian.</p> <p>Pihak TPI hanya menyediakan sarana dan prasarana dan menarik biaya retribusi guna terlaksanya transaksi penjualan di TPI. Biaya retribusi dikenakan untuk nelayan 3% dan pedagang 2% dari pendapatan yang diperoleh. Alasan utama mengapa para bakul atau pedagang ikut andil dalam menentukan harga yaitu karena para pedagang lokal-lah satu-satunya yang membeli hasil tangkapan dari para nelayan, dan mengapa harga ikan sering anjlok pada waktu musim ikan ? karena para pedagang mempunyai alasan yaitu “pasar” dimana para pedagang melihat situasi pasar didaerah lain untuk menjual hasil ikan olahannya. Alasan mengapa pihak TPI tidak bisa menetapkan harga maksimal yaitu pendapatan nelayan bersifat harian, sehingga cold storage tidak mampu menampung hasil tangkapan, dan hanya para pedagang lokal satu-stunya yang membeli hasil tangkapan nelayan tersebut.</p>

B. Wawancara pada para pedagang ikan di TPI Prigi

Nama : Bu Wiji (38) dan bapak Sunoto (40)

Pekerjaan : pedagang ikan dan nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon
(pancing tonda) dan buka konter pulsa

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 24 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Beliau menjelaskan bahwa usaha pedagang atau bakul ikan ini karena letak kondisi yang dekat dengan pesisir dan permintaan akan ikan segar dan pindang yang meningkat. Awal usaha ini perolehan modal didapat modal sendiri, yaitu menjadi pedagang pedagang kecil (pemapak) lalu bisa mengolah ikan sendiri yaitu menjadi pemindang dan setelah itu menjadi pedagang ikan basah (ikan di es) sampai sekarang. Dalam pembentukan harga dilakukan dengan sistem lelang (tawar-menawar) antara nelayan produsen dan para pedagang atau bakul ikan (konsumen).</p> <p>Transaksi ini dilakukan di TPI Prigi dengan sistem lelang dan pada akhirnya harga terbentuk dengan penawaran tertinggi oleh pihak konsumen atau pedagang. Sebagai acuan dalam penentuan harga, para pedagang, para pedagang menggunakan patokan harga kemarin dipasaran luar daerah. Pada waktu puncak musim ikan maka harga ikan menjadi turun atau anjlok, karena penawaran banyak sedangkan barang yang diminta sedikit dan sebaliknya. Proses tersebut berlangsung setiap hari selama musim ikan. Alasan itulah yang menjadi dasar utama mengapa pada waktu musim puncak ikan harga menjadi anjlok atau turun sehingga harga dikuasai oleh pedagang besar pada khususnya.</p>

Nama : Bu Wiji (38) dan bapak Sunoto (40)

Pekerjaan : pedagang ikan dan nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon
(pancing tonda) dan buka konter pulsa

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 25 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Ikan yang peroleh dari saya sendiri selaku nelayan pemilik (juragan kapal) karena saya mempunyai kapal dan alat tangkap sendiri dan para nelayan yang menjual langsung ke saya atau nelayan yang meminjam modal ke saya. Untuk nelayan yang meminjam modal biasanya terdiri dari nelayan purse seine, payang, tonda maupun pancing ulur. Pada musim ikan ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada waktu musim paceklik. Mengenai prosedur peminjamannya sangat mudah, dimana setiap ada nelayan yang meminjam modal, maka secepat mungkin dilayani dengan tidak menggunakan syarat jaminan (seperti BPKB atau surat-surat berharga lainnya). Akan tetapi, setiap ada hasil ada hasil panen berupa hasil tangkapan harus diserahkan ke saya (pedagang yang meminjami modal).</p> <p>Mengenai cara pengembaliannya yaitu terserah, tidak ada jangka waktu tertentu yang menentukan, tetapi tetap ada hitungannya / pencatatan pembukuan. Mengenai potongan ada sedikit, misalnya harga kesepakatan lelang per Kg Rp 5000 maka nelayan yang meminjam modal dipotong Rp 500 rupiah /kg nya sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>Hubungan kami (pedagang) dengan nelayan yang meminjam modal yaitu sangat baik atau patner kerja yang baik, dimana tidak ada keterpaksaan antara kedua belah pihak. Dimana kedua belah pihak saling membutuhkan. Mengenai adanya pedagang dari daerah lain yaitu pedagang dari daerah lain tidak boleh ikut pada waktu pelelangan untuk menentukan harga ikan di TPI Prigi. Jadi pedagang dari daerah lain harus menunggu dulu kalau ingin membeli ikan. Dengan kata lain harus melewati pedagang lokal dulu. Karena itu sudah menjadi kesepakatan para bakul lokal di kecamatan Watulimo dan begitupun sebaliknya.</p> <p>Pernyataan bu Wiji tentan pembentukan harga: “....mas, sebenarnya saya tidak mau merugikan para nelayan, tapi saya juga tidak mau rugi, karena penentuan harga di TPI Prigi tersebut berdasarkan harga jual ikan kemarin di pasaran luar....!!!”</p>

Nama : Bapak Abi Suprpto (45)

Pekerjaan : Pedagang ikan dan nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon
(pancing tonda) dan pegawai TPI Prigi

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 26 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Bahwa latar belakang usaha ini bakul ini adalah berdomisili di sekitar pantai pesisir yang dekat dengan laut serta tingginya permintaan akan ikan dipasaran. Pada awalnya modal didapat dari sendiri dan pinjaman di bank. Dalam transaksi jual beli ikan dilakukan di TPI Prigi, dimana transaksi dilakukan pada saat musim panen ikan. Pada penentuan pembentukan harga berdasarkan sistem lelang atau proses tawar-menawar antara nelayan sebagai produsen dan para pedagang sebagai konsumen (pembeli) dan pada akhirnya para pedanglah yang menetapkan harga dengan penawaran tertinggi. Saya mendapatkan ikan dari saya sendiri selaku nelayan pemilik alat tangkap, nelayan umum yang menjual ke saya maupun nelayan yang meminjam modal.</p> <p>Pada waktu musim ikan harga menjadi turun, dikarenakan saking banyaknya jumlah produksi yang ada serta permintaan yang sedikit dipasaran dan begitupun sebaliknya. Ada nelayan yang meminjam modal ke saya. Mengenai proses peminjamannya sangatlah mudah dan secepat mungkin dipenuhi. Tinggal maunya nelayan yang ingin meminjam: berapa dan kapan biasanya nelayan yang meminjam modal. Hal ini terjadi pada nelayan yang umumnya keterbatasan dalam penyediaan modal.</p>

Nama : Bapak Abi Suprpto (45)

Pekerjaan : Pedagang ikan dan nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon
(pancing tonda) dan pegawai TPI Prigi

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 27 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Pada umumnya nelayan yang meminjam modal adalah nelayan purse seine, pancing ulur, payang, maupun tonda (rumpon). Mengenai pengembaliannya tidak ditentukan oleh waktu, dicicil bisa ataupun langsung dilunasi juga bisa. Dengan syarat apabila setiap mendapatkan hasil tangkapan harus diserahkan ke saya atau di jual ke saya (yang meminjami modal). Mengenai potongan ya ada tapi sedikit, namanya juga bisnis kata beliau. Misaalnya harga di TPI per kg Rp 5000,00 maka ada potongan Rp 500,00 dari saya karena ada karena ada nelayan yang meminjam modal tersebut. Bagi nelayan yang tidak meminjam modal, pada waktu menjual hasil tangkapan ikan ke saya dalam jumlah yang besar, maka pembayaran yang saya lakukan separo dulu kemudian sisanya saya lunasi ketika ikan olahan yang saya pasarkan kedaerah lain sudah laku.</p> <p>Hubungan saya dengan nelayan yang meminjam modal ataupun tidak yaitu sangat baik (patner kerja), dimana tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak yang berangkutan (pedagang dan nelayan produsen). Mengenai adanya pedagang dari daerah lain yang ingin membeli hasil tangkapan harus melalui pedagang lokal dulu atau pedagang asli daerah. Jadi pedagang dari daerah lain tersebut tidak boleh ikut pada waktu proses pelelngan di TPI Prigi dan begitupun sebaliknya.</p> <p>Pernyataan bapak Abi Suprpto: "...alhamdulillah mas, hubungan saya dengan nelayan masih baik sampai sekarang tentang penyediaan modal, tetapi ada potongan sedikit dari hasil penjualan...!!!" "....kami menjadi patner kerja, karena saling membutuhkan antara kedua belah pihak, dimana nelayan membutuhkan pinjaman untuk melaut, sedangkan saya menginginkan hasil tangkapannya untuk melangsungkan usaha ,,,," "....bagi yang sudah tidak mempunyai tanggungan, mereka bebas menjualnya kepada siapapun, tetapi mereka masih baik sama saya. Setiap ada hasil tangkap mereka menjualnya kesaya, mungkin mereka ingat jasa-jasa saya...." "....kalau harga ikan di TPI per kg Rp 5000,00 ya saya kasih harga ke mereka Rp 5000,00</p>

C. Wawancara pada para nelayan yang menghutang di TPI Prigi

Nama : Bapak Imam (25)

Pekerjaan : nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon (pancing tonda)

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 28 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh orang tua saya, karena orang tua sudah tua maka saya mengambil alih usaha penangkapan ini. Hasil tangkap yang kurang menentu dan mahalny biaya produksi pada waktu melaut membuat saya harus meminjam modal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saya mendapatkan modal dari pedagang atau bakul ikan. Alasan saya meminjam pada pedagang karena proses peminjamannya dapat segera saya terima atau langsung cair dengan mudah tanpa adanya syarat-syarat yang memberatkan. Berbeda seperti lembaga seperti bank yang proses peminjamannya berbelit-belit dan membutuhkan jaminan pada waktu proses peminjaman selain itu uang tidak bisa langsung segera cair. Sementara kapal harus segera beroperasi guna memperoleh hasil tangkapan.</p> <p>Modal tersebut saya butuhkan untuk biaya beroperasi sehari-hari dan pembuatan pancing tonda. Memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembuatan pancing tonda sekitar ± 25 juta, maka mau tidak mau saya harus meminjam modal pada pedagang, hasil tangkapan dari pancing tonda tersebut berfungsi ketika musim pakeklik tiba. Untuk melunasi hutang, setiap hasil tangkapan tersebut saya jual ke pedagang yang meminjami modal ke saya, walaupun terkadang harga yang saya terima tidak sesuai dengan harga kesepakatan lelang, dalam artian ada potongan sedikit dari hasil penjualan. Saya pasrah dengan keadaan tersebut, asalkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dalam melaut. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak (nelayan dan pedagang yang meminjamkan modal).</p>

Nama : Bapak Toha (60)

Pekerjaan : nelayan pancing ulur, nelayan ABK dan petani

Alamat : Desa Prigi

Tanggal : 29 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Beliau mengungkapkan bahwa para nelayan pada umumnya pasrah dengan keadaan tersebut, mengingat hasil tangkapan dari tahun-ketahun semakin menurun dan kondisi perairan yang dipengaruhi oleh musim sehingga pendapatan menjadi kurang menentu, mengandalkan hasil tangkapan dan bertani terkadang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta mahal biaya operasional pada waktu melaut (sarana produksi dan teknologi). Sarana perlengkapan produksi nelayan pancing berupa sterofoam dan es balok, dapat pula berupa biaya operasional, pembelian mesin kapal maupun untuk perawatan kapal apabila terjadi kerusakan.</p> <p>Mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, maka mau tidak mau harus meminjam modal. Dan modal tersebut bisa saya dapatkan dari pedagang ikan. Katakanlah saya meminjam modal pada "bapak Abi Suprpto". Alasan mengapa saya meminjam modal pada pedagang karena selama ini belum ada lembaga seperti bank atau koperasi yang meminjamkan modal dengan mudah (harus ada jaminan berupa BPKB atau surat-surat berharga lainnya) selain itu uang tersebut belum tentu bisa langsung dapat segera cair. Berbeda dengan meminjam uang ke pedagang, selain prosesnya mudah dan uang segera dapat saya peroleh dengan mudah dan tidak berbelit-belit. Peminjaman modal tersebut terjadi pada waktu musim ikan maupun waktu musim panceklik (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari)</p>

Nama : Bapak Toha (60)

Pekerjaan : nelayan pancing ulur, nelayan ABK dan petani

Alamat : Desa Prigi

Tanggal : 29 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Mengenai cara pengembaliannya yaitu dapat diangsur ataupun segera langsung dilunasi. Yang jelas pada waktu panen ikan, maka hasil tangkapan harus diserahkan pada pedagang yang meminjami modal tersebut. Proses transsaksi penjualan dilakukan pada saat musim ikan, setelah ikan diturunkan dari kapal lalu ditimbang setelah itu dilelang di TPI Prigi. Setelah proses pelelangan dilakukan maka hasil tangkapan tersebut segera diambil pedagang yang meminjamkan modal. Akan tetapi harga yang diterima kadang-kadang kurang dari kesepakatan harga lelang karena terikat peminjaman modal (ada potongan sedikit dari harga lelang). Nelayan pun pasrah dengan keadaan tersebut walaupun harga yang diterima tidak sesuai dengan angan-angan. Karena dengan cara tersebut utang dapat segera dapat dilunasi. Para nelayan yang meminjam modal pada pedagang mengakui menyukai pola hubungan ini. Selain menjadi mitra kerja yang baik bisa juga mempererat hubungan persaudaraan. Mengingat pada waktu musim paceklik, semua kebutuhan dapat segera teratasi seperti biaya kesehatan, acara kondangan, maupun kebutuhan sehari-hari.</p> <p>Seiring berjalannya waktu, ketika, ketika utang dapat dilunasi, nelayan tersebut pada waktu musim panen ikan pun enggan menjual hasil tangkapannya kepada orang lain. Hal ini nelayan mengaku mempunyai "hutan budi" kepada pedagang yang dulu meminjami modal. Selain itu nelayan merasa beruntung karena hasil tangkapannya segera dibeli oleh pedagang yang pernah meminjamkan modal dulu. Mengingat hasil tangkapan cepat busuk, pendapatan nelayan bersifat harian, mahalnya biaya pada waktu proses penangkapan dan mengolah serta menjualnya ketempat pemasaran kedaerah lain maka satu-satunya jalan untuk menyiasatinya yaitu menjual secepat mungkin pada pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun terkadang hasil yang didapat kurang memuaskan.</p> <p>Berikut pernyataan bapak Toha:</p> <p>"...saya beruntung dapat bekerja sama dengan Bpk Abs, selain enak dalam peminjaman modal, beliau tidak menuntut saya untuk segera melunasinya..."</p> <p>"...alhamdulillah mas, sedikit-demisedikit kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi..."</p> <p>"..ya alhamdulillah sudah punya modal..."</p> <p>"....sebenarnya setiap ada hasil tangkapan kalau ingin saya jual ke pedagang lain juga tidak masalah, tapi saya segan. Soalnya dulunya sering ditolong waktu musim paceklik. Toh ya harganya juga sama dengan pedagang</p>

	lainnya....” “....saya malah seneng, soalnya hasil tangkapan saya langsung ada yang membeli, jadi saya tidak perlu repot-repot mencari pedagang lagi...”
--	---

Nama : Bapak Imam (25)

Pekerjaan : nelayan pemilik alat tangkap purse seine dan Rumpon (pancing tonda)

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 29 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Bagi nelayan melihat keadaan tersebut tidak membuat nelayan jera ataupun memutuskan hubungan dengan, asalkan yang terpenting adalah bisa melaut dan mendapatkan hasil setiap hari sudah cukup. Andaikataupun semua hutang sudah terlunasi, nelayan tersebut enggan menjualnya kepada pedagang lain. Hal ini dikarenakan nelayan sudah percaya dan senang setiap hasil tangkapan dapat langsung dibeli oleh pedagang, mengingat hasil tangkapan yang rentan terhadap waktu (cepat busuk) dan mahalnnya biaya untuk mengolah serta memasarkannya ke daerah lain. Selain itu mengingat bahwa dulunya pernah meminjam ke pedagang (bapak bu Wiji), istilahnya dulunya pernah dipinjami modal pada waktu musim paceklik. Hal tersebut yang menyebabkan nelayan kalah dalam posisi tawar pada waktu proses pelelangan ikan di TPI Prigi sehingga para pedagang bisa lebih leluasa dalam menentukan harga ikan di TPI Prigi.</p> <p>Pernyataan bapak Imam: “...alhamdulillah mas, saya dapat pinjaman dari bu Wiji waktu pembuatan rumpon, selain prosesnya mudah uang dapat langsung segera cair....” “...akan tetapi setiap ada hasil tangkap, harus diserahkan kepadanya karena saya mempunyai tanggungan utang.....” ‘.....walaupun ada potongan sedikit, tapi gak apalah yang penting bisa digunakan untuk melaut besoknya dan kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi....”</p>

Nama : Bapak Mat (30)

Pekerjaan : nelayan pemilik alat tangkap purse seine (nelayan setempat)

Alamat : Desa Tasikmadu

Tanggal : 30 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>beliau mengungkapkan bahwa kondisi hasil tangkap yang dipengaruhi musim, hasil tangkap yang dari tahun-ketahun semakin menurun dan kegiatan penangkapan yang penuh resiko dan ketidakpastian hasil yang didapat, pendapatan yang bersifat harian serta ketergantungan terhadap satu mata pencaharian yaitu melaut. Nelayan pun pada umumnya pasrah dengan keadaan tersebut. Pada waktu musim ikan kegiatan transaksi jual beli ikan dilakukan di TPI Prigi. Setelah ikan didaratkan lalu dibawa ke TPI untuk ditimbang setelah itu kegiatan proses tawar-menawar dengan cara lelang antara nelayan produsen dan para pedagang (konsumen).</p> <p>Dalam hal ini nelayan tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu keputusan dari para pedagang, nelayan hanya menanti penawaran tertinggi dari para pedagang. Harga yang diperoleh biasanya tidak sesuai dengan angan-angan nelayan pada umumnya. Terlebih pada waktu musim puncak, harga bisa semakin anjlok. Dengan alasan para bakul tidak mau menanggung resiko apabila hasil ikan olahan (segar atau pindang) apabila dijual kedaerah lain juga anjlok karena banyaknya pasokan ikan dari daerah lain sedangkan permintaan ikan sedikit di pasar luar daerah.</p> <p>Dalam hal ini pihak TPI tidak bisa berbuat banyak, TPI hanya menyediakan sarana dan prasarana untuk lelang dan menarik biaya retribusi. Retribusi untuk nelayan 3% dan pedagang 2% serta menyiarkan harga lewat mikrofon. Mengingat hasil tangkapan bersifat harian maka TPI tidak bisa menampung seluruh hasil tangkapan. Dengan alasan itulah mengapa nelayan kalah dalam posisi tawar dan pada akhirnya para pedaganglah yang menguasai dalam hal penentuan harga. Para nelayan hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut asalkan mendapat uang setiap hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan proses melaut.</p>

Nama : Bapak Supriyono (24)
Pekerjaan : nelayan ABK (nelayan setempat)
Alamat : Desa Prigi
Tanggal : 31 -12 – 2008

Tema	Uraian
	<p>Menurut beliau, para bakul atau pedagang tersebut kebanyakan menawar dengan harga murah. Hal ini tentu memberatkan bagi nelayan yang menangkap ikan. Mengingat halnya menangkap ikan yang penuh resiko dan ketidakpastian. Pada kenyataanya nelayan hanya pasrah dengan keadaan tersebut karena banyaknya nelayan yang mencari ikan sedangkan pihak pembeli yang jumlahnya sedikit.</p>

